

MODUL



PELATIHAN

REVOLUSI MENTAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, maka modul Pelatihan Revolusi Mental ini dapat disusun dengan baik, sebagai upaya dalam membangun dan mengembangkan sikap perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, moralitas dan sikap kepribadian yang terpuji.

Dalam kesempatan ini kami menghaturkan terimakasih yang tak terhingga, terutama kepada para Nara Sumber/Widyaiswara, Pejabat Struktural maupun Staf di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun pikirannya, sehingga modul pelatihan revolusi mental ini dapat tersusun dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan.

Modul Pelatihan Revolusi Mental ini disusun sebagai pendukung pelaksanaan Pelatihan Revolusi Mental yang materinya merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dalam peraturan tersebut secara tegas disebutkan bahwa salah satu dari sembilan program *Quick Wings* Reformasi Birokrasi adalah “ Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara “. Dalam tataran yang lebih konkrit, modul Pelatihan Revolusi Mental ini adalah sebagai salah satu upaya yang menyebarkan doktrin revolusi mental sebagai aparatur sipil negara yang mampu mengakselerasi perubahan mindset untuk memiliki budaya melayani, dan memberikan pesan kepala masyarakat tentang tekad pemerintah untuk hadir dan memberikan pelayanan publik secara prima.

Modul Pelatihan Revolusi Mental ini terbagi dalam 6 (enam) bagian yaitu: (1) Membangun Komitmen Belajar, (2) Revolusi Mental Berbasis Pancasila, (3) Membangun Karakter Dalam Inovasi Pelayanan Publik, (4) Membangun Budaya Kerja Pelayanan Pegawai ASN, (5) Membangun Kepribadian dan Pola Pikir ASN, (6) Membuat Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Revolusi Mental. Adapun pengembangan aplikasi maupun keterkaitan masing-masing bagian sampai kepada *best practice* akan disampaikan langsung oleh narasumber.

Para pembaca yang arif dan bijaksana, modul pelatihan revolusi mental ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik, saran maupun masukan yang bersifat membangun guna penyempurnaan modul ini sangat kami harapkan.

Depok, Februari 2017

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai



Dr. Drs. Bambang Winarji, M.Pd
NIP. 196101261988031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Modul 1	
Revolusi Mental Berbasis Pancasila	
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Revolusi Mental Dan Mental Pancasila	7
BAB 3 Pancasila Sebagai Jati Diri Dan Kepribadian Bangsa	21
DAFTAR PUSTAKA	
Modul 2	
Membangun Karakter Dalam Inovasi Pelayanan Publik	
BAB 1 Pendahuluan	43
BAB 2 Inovasi Dalam Pelayanan Publik	47
BAB 3 Dinamika Proses Inovasi Pelayanan Publik	53
BAB 4 Karakter Pemimpin Inovatif di Sektor Publik	55
DAFTAR PUSTAKA	
Modul 3	
Membangun Budaya Kerja Pelayanan Pegawai ASN	
BAB 1 Pendahuluan	63
BAB 2 Konsep Budaya Kerja	67
BAB 3 Pengembangan Budaya Kerja ASN	81

Modul 4

Pengembangan Kepribadian Dan Pola Pikir ASN

BAB 1	Pendahuluan	103
BAB 2	Konsep Dasar Kepribadian	109
BAB 3	Konsep Pola Pikir ASN	115
BAB 4	Teknik Pengembangan Kepribadian	125
DAFTAR PUSTAKA		

Modul 5

Membuat Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Revolusi Mental

BAB 1	Pendahuluan	129
BAB 2	Nilai-Nilai Revolusi Mental	133
BAB 3	Menyusun Rencana Aktualisasi	139
BAB 4	Menyusun Laporan Aktualisasi	143
DAFTAR PUSTAKA		

MODUL 01

REVOLUASI MENTAL BERBASIS PANCASILA

BAB 01

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi mental merupakan jargon yang diusung persiden Joko widodo sejak masa kampanye Pemilu Preiden tahun 2014. Sasaran utamanya untuk mengubah cara berpikir dan cara pandang untuk merekonstruksikan kembali mulai dari tataran diri sendiri, tatanan sosial maupun berbangsa dan bernegara. Regulasi yang konstruktif berbasis sosial yang memadai agar mampu menghasilkan sebuah visi, misi dan program yang berkesinambungan yang berorientasi jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Kondisi ril bangsa pada sat ini setelah 70 tahun lebih Pancasila hadir sebagai dasar dan haluan negara dapat dianalogikan seperti diliputi awan tebal pesimime, ketimbang cahaya optomisme.

Kita memerlukan optimisme dengan keadaran dan memandang jauh, melirik dengan mata terbuka merupakan suatu harapan yang berjejak pada visi yang diperjuangkan untuk menjadi kenyataan. Psikolog Martin Saligman menyatakan: Optimismelah yang mendorong kesuksesan, impian kemajuan suatu bangsa tidak bisa dibangun dengan pesimisme.

Upaya menyemai politik harapan harus memperkuat kembali visi dengan mempertimbangkan masa lalu, peluang masa kini, serta keampuannya mengantisipasi masa depan. Pancasila sesungguhnya mampu memberikan landasan visi transformasi yang holistik dan antisipatif. Berdasarkan pandangan hidup Pancasila perubahan sistem sosial merupakan fungsi dari perubahan pada ranah mental kultural, ranah politikal, dan ranah material.

Indonesia saat ini meghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari pimpinan nasional, maka muncullah suatu kesepakatan bahwa Indonesia perlu melaksanakan revolusi mantal. Dari manakah memulai revolusi mental. Revolusi

mental mulai dari masing-masing kita sendiri, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan seterusnya. **Revolusi Mental** adalah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang **berdaulat, mandiri dan berkepribadian**.

Revolusi Mental dengan kata lain dapat dikatakan sebagai **Gerakan Hidup Baru** bangsa Indonesia. **Revolusi Mental** bertumpu pada tiga nilai-nilai dasar: **Integritas, Etos kerja dan Gotong Royong**.

B. Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan dapat menjelaskan ranah dan tujuan revolusi mental, sejarah Pancasila, serta Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia.

Tujuan revolusi mental adalah untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti.

Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul menerapkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat gotong royong.

C. Pengalaman Belajar

Untuk memperoleh hasil belajar di atas, melalui serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari membaca materi diklat sesuai skenario pembelajaran, materi pokok, mendengar dan berdiskusi baik dengan tenaga pengajar maupun sesama peserta tentang materi pokok, melakukan simulasi, perenungan,

menonton film pendek dan membahas kasus yang relevan dengan materi pokok, dan terakhir proses internalisasi hasil belajar. Akhir pembelajaran pembelajaran, peserta menghasilkan suatu produk pembelajaran yang menunjukkan kompetensi yang diharapkan.

Pembelajaran ini dilaksanakan melalui membaca materi Diklat, melakukan kegiatan pembelajaran tentang substansi diklat, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar, berdiskusi, simulasi, nonton film pendek dan apresiasinya, membahas kasus dan menyaksikan tokoh panutan. Dipenghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran sebagai bekal menginternalisasikan nilai-nilai revolusi mental Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia di tempat kerjanya. Pengalaman belajar diperoleh dengan mensintesakan substansi mata diklat kedalam aktualisasi nilai pancasila melalui gerakan nasional revolusi mental, mendapatkan bimbingan untuk menerapkan aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini juga dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya revolusi mental berbasis Pancasila sebagai kompetensi dalam melaksanakan tugas.

D. Deskripsi Singkat

Salah satu yang diharapkan dalam revolusi mental adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan Indonesia baru yang kuat melalui internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat gotong royong. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup revolusi mental yang sejalan dengan Nawacita. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera, serta mandiri diperlukan manusia-manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian, dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, etos kemajuan, bersikap optimis, dalam menatap masa depan, dan memiliki nilai luhur yaitu gotong royong, toleransi, solidaritas, rukun, dan saling menghargai dan menghormati. Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan ranah revolusi mental dan kedudukan Pancasila sebagai jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Mata

Diklat disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi eksploratif, studi kasus, dan simulasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menjelaskan ranah revolusi mental dan Pancasila sebagai jati diri dan identitas bangsa Indonesia.

Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul menerapkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat gotong royong.

E. Cara Penggunaan Modul

Peserta Diklat diharapkan memiliki sikap mandiri dalam belajar, dapat berperan aktif dan berinteraksi secara optimal dengan sumber belajar. Oleh karena itu langkah mempelajari modul ini perlu diperhatikan secara baik :

1. Bacalah modul ini secara berurutan dari halaman paling depan sampai halaman paling belakang. Pahami dengan benar isi dari setiap kegiatan belajar yang ada.
2. Untuk memudahkan anda dalam mempelajari modul ini, maka pelajari terlebih dahulu Tujuan Akhir Pembelajaran dan Ruang Lingkup yang akan dicapai dalam modul ini.
3. Laksanakan semua tugas-tugas yang ada dalam modul ini agar kompetensi anda berkembang sesuai standar.
4. Lakukan kegiatan belajar untuk mendapatkan kompetensi sesuai rencana yang telah anda susun.
5. Sebelum anda dapat menjawab dengan baik latihan dan tugas atau tes yang ada pada setiap akhir materi, berarti anda belum memperoleh ketuntasan dalam belajar. Ulangi lagi pembelajarannya sampai tuntas, setelah itu diperbolehkan untuk mempelajari materi berikutnya. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan saling bertukar pikiran dengan teman, apabila menemui hal-hal yang dirasa kesulitan dikonsultasikan dengan fasilitator.

6. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, pustaka, disarankan juga download dari internet.
7. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dalam modul dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan mandiri dengan teman sejawat.
8. Kerjakan semua latihan dan tugas, jangan ada yang dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan modul.

BAB 02 **REVOLUSI MENTAL DAN MENTAL PANCASILA**

A. Indikator Hasil Belajar

Peserta diharapkan mampu:

1. Menjelaskan ranah revolusi mental.
2. Menjelaskan Tujuan Revolusi Mental
3. Menyebutkan bangsa Indonesia hidup sesuai citacita proklamasi 17 Agustus 1945
4. Menjelaskan program nasional revolusi mental
5. Menjelaskan Revolusi mental merupakan salah satu unsur revolusi pancasila

B. Uraian materi

1. Revolusi Mental

Warisan terburuk dari kolonialisme, feodalisme, dan otoritarisme tidaklah terletak pada besaran kekayaan yang dirampas, penderitaan yang ditimbulkan, serta nyawa yang melayang, melainkan pada pewarisan nilai-nilai yang koruptif, penindasan, dan perbuakan yang tertanam dalam mental bangsa. Kata mental berasal dari bahasa Latin “mens” (mentis) yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Mental dapat diartikan sebagai suasana kejiwaan dan pola pikir seseorang atau kelompok orang.

Para pendiri bangsa menyadari benar bahwa perjuangan kemerdekaan masih jauh dari titik tuntas. Proklamasi kemerdekaan hanyalah jembatan emas untuk meraih kemerdekaan sejati. Sebagai jembatan emas, proklamasi kemerdekaan hanyalah titik keberangkatan untuk meraih cita-cita adil dan makmur melalui serangkaian perjuangan yang istiqamah.(persisten)

Dalam amanat presiden pada ulang tahun proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1956 dalam suasana limbung politik pasca pemilu 1955, Bung

Karno menjelaskan 3 fase revolusi bangsa. Dua fase telah dilalui seara berhasil, dan satu fase lagi menghadang sebagai tantangan. Indonesia telah melewati tahap revolusi fisik (1945-1949) dan tahap survifal (1950-1955) . sekarang berada dalam tahap infesment, yaitu tahap menanamkam modal dalam arti yang seluas-luasnya (keterampilan, material, dan mental).

Investasi keterampilan dan material sangat penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah investasi mental. Investasi keterampilan dan mateial tidak dapat menjadi dasar persatuan dan kemakmuran bersama tanpa dilandasi dengan investasi mental. Tanpa kekayaan mental upaya-upaya pemupukan keterampilan dan material hanya mencipkan perbudakan. Dikatakannya “ lebih baik kita membuka hutan kita dengan menggaruk tanah dengan jari dan kuku kita dari pada menjual serambutpun dari pada kemerdekaan kita ini untuk dolar. Untuk robel. Mental kita harus mengangkat diri kita atas kekecilan jiwa yang membuat kita suka geger dan eker-ekeran mempertentangkan urusan-urusan yag tidak penting.

Itulah sebabnya, Bung Karno sangat menekankankan pada “nation and character building” Dalam pandangannya bangsa Idonesia adalah bangsa besar, namun sering kali memberi nilai terlalu rendah pada bangsanya alias bermental kecil, Bangsa ini beum bebas dari metal kaum terjajah yang masih mengindap perasaan rendah diri. Bung Karno menyadari bahwa akibat penjajahan dan feodalisme selama ratusan tahun mengakibatkan terbentuk karakter rakyat. Akibatnya terbentuknya mentalias pecundang dengan penuh perasaan tidak berdaya dan tidak memiliki kepercayaan diri.

Memasuki alam kemerdekaan, Bung Karno menyerukan watak tersebut harus segera dikikis habis. Rakyat harus berjiwa merdeka, mandiri, dan menghargai diri sendiri.

Dalam kaitannya dengan perkembangan global, Bung Karno mengingatkan munculnya berbagai peluang dan ancaman yang di akibatkan oleh kemajuan teknologi. Sekarang kita sedang berada di abad atom , seribu kali lebih besar kemungkinan-kemungkinan abad atom itu dari pada abad

mesin uap dan abadinya mesin listrik. Seribu kali lebih besar kemungkinan jalan-jalan baru untuk mempercepat pembangunan bagi kesejahteraan dunia kemanusiaan. Meski demikian, Bung Karno mengingatkan bahwa peluang-peluang baru yang didorong oleh perkembangan teknologi tersebut bisa membawa musibah bagi kemanusiaan sekiranya tidak dibarengi prasyarat-pasyarat mental dan moral. Revolusi atom harus disertai oleh revolusi mental. Revolusi atom harus dikawani revolusi mental. Kita harus berani berpikir dalam alam damai, bukan dalam alam perang. Kita harus berani berpikir dalam alam percaya mempercayai, bukan dalam alam jegal menjegal, Kalau revolusi atom itu tidak dikawal oleh revolusi mental dan revolusi moral, maka kemajuan yang dibawanya itu akan mengantarkan manusia masuk dan terjungkal dalam jurang kebencanaan.

Itulah sebabnya Bung Karno mengajak semua ummat manusia untuk bantu membantu satu sama lain, mengangkat derajat hidupnya bersama-sama ketingkat hidup yang lebih tinggi baik di lapangan jasmaniah maupun lapangan rohaniah. Untuk itu ummat manusia khususnya bangsa Indonesia harus memiliki “isi hidup” dan “arah hidup”. Bangsa yang tidak mempunyai sisi hidup dan arah hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak mendalam, bangsa yang dangkal, bangsa yang tidak mempunyai levensdiepte (isi hidup) sama sekali. Ia adalah bangsa penggemar emas sepuhaan bukan emas batin. Ia mengagumkan penguasaan pentung bukan kekuasaan moral, ia cinta kepada gebyar lahir bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat, tetapi kuatnya adalah kuat kulit, padahal kosong melompong di bagian dalamnya.

Lebih lanjut dalam amanat Presiden pada ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1957, Bung Karno mengingatkan perlunya bangsa Indonesia untuk memerangi dirinya sendiri, sehubungan dengan kecedarungan menurunnya kesadaran nasional dan menurunnya kekuatan jiwa nasional kita. Selanjutnya dia mengingatkan, ‘Kelemahan jiwa kita adalah bahwa kita kurang percaya pada diri kita sendiri sebagai bangsa sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, sudah kurang percaya-mempercayai satu sama lain, adah kita ini pada asalnya ialah

rakyat gotong royong, kurang berjiwa gigih, melainkan teralu lekas mau enak dan mencari gampangya saja. Semua itu karena semakin menipisnya rasa harkat nasional, semakin menipisnya rasa nasional dignity, semakin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri.

Di samping itu juga menyedihkan pudarnya jiwa kerakyatan dari para pemimpin.

“Berapa orangkah dari alam pemimpin Indonesia sekarang ini yang masih benar-benar “rakyat” seperti dahulu, masih benar-benar “volk” seperti dahulu. Pada hal menurutnya, dulu kita semua adalah “rakyat” dulu kita semua adalah “volk”. Api pergerakan kita dulu kita ambil dari dapur apinya rakyat. Segala fikiran dan angan-angan kita dulu itu kita tunjukkan kepada kepentingan rakyat. Tujuan pergerakan kita dulu adalah suara masyarakat adil dan makmur bagi rakyat. Segala apa saja sebagai hasil penggabungan tenaga rakyat, dulu kita pakai sebagai alat perjuangan. Segenap kekuatan perjuangan kita dulu adalah kekuatan rakyat.

Selanjutnya dia tegaskan, dengan kekuatan rakyat, api rakyat, kekuatan rakyat inilah kita pada tanggal 17 Agustus 1945 mencapai kemerdekaan. Secara retorik ia pun bertanya, Rakyat apa?, Rakyat mana?, Rakyat Indonesia. Maka dari itu menurutnya, Revolusi kita ini mempunyai karakteristik tersendiri. Berbeda dengan revolusi-revolusi orang lain. Maka oleh karena itu revolusi kita mempunyai kepribadian revolusi Indonesia sendiri, bukan jiplakan revolusi orang lain, mempunyai cap Indonesia sendiri dan mempunyai cap persoalan-persoalan Indonesia sendiri, yang berbeda daripada persoalan-persoalan revolusi orang lain.

Dalam penilaiannya, inilah yang banyak pemimpin kita telah lupakan”. Bukan *think and rethink* serta *individualized* bangsa Indonesia sendiri. Bukan mereka pulangkan segala persoalan kepada kepribadian obyektif dari pada bangsa Indonesia sendiri, tetapi karena mereka lepasnya kontak dengan rakyat, mengkopi saja dan menjiplak saja secara hantam kromo

apa yang mereka lihat sebagai suatu politike wijheid di negeri orang lain. Akibatnya segala sesuatu lepas dari buminya, segala sesuatu lepas dari rilnya, segala sesuatu lantas rontok. Segala sesuatu peringisan, kerana mukanya bukan lagi muka yang ia bawa tak kala ia keluar dari garda ibu pertiwi.

Akibat itu semua menurut Bung Karno, bangsa Indonesia mengalami krisis multi demendional. Segala macam krisis sudah menumpah kepada kita, krisis demokrasi, krisis akhlak, krisis kewibawaan,. Nasionalisme dignity kita sudah amblas, sehingga banyak di antara kita ini tidak merasa malu bahwa dunia luar sorak kesenangan. Tidak merasa malu kalau dunia baru berkata, Indonesia mulai runtuh, kemana engkau Indonesia, suatu bangsa yang sedang ambruk.

Meski demikian, Bung Karno menganjurkan perlunya merawat optimisme. Dalam pandangannya, “di segala lapangan kita membutuhkan lebih banyak positifisme. Negatifisme belaka tidaklah mencukupi untuk dijadikan panji-panjinya revolusi,

Dia mengingatkan bahwa sekarang ini kita berada dalam tingkat kedua dalam revolusi kita yaitu tingkat “nationbuilding”; tingkat pembina bangsa. Pada tingkat pertama dari pada revolusi, yakni tingkat “pemerdekaan” (liberation), semua hal menurutnya lebih mudah. “Persoalannya hanya satu; pro atau kontra penjajahan, habis perkara! Siapa yang pro penjajah, hantam remuk rendam dia!, siapa yang kontra penjajah, ayo pegang bambu runcing ini, ayo panggullah ini senapan. Pembagian kekuatan-kekuatan konstruktif dan destruktif sangat mudah, dan tidak ada komplikasi. Selain itu pada masa kemerdekaan, “idealisme membumbung tinggi, idealisme manyala-nyala. Rajawali Indonesia pada waktu itu benar-benar menggaruda di sapta angkasa.

Situasinya amat berbeda pada tingkat kedua, dalam masa nation building, pada tahap ini, “idealisme agk luntur dan ego-sentrisme, atau sentrisme makin tumbuh. Menurutny, “kebebasan yang masih dalam pertumbuhan

selalu membangun rasa egosentris. Kebebasan yang belum menetap itu selalu bersifat 'bebas untuk bebas' , dan selalu ia berpusat kepada kebebasan ego, kebebasan aku yang membawa kepada sikap egosentris.

Untuk bisa keluar dari berbagai krisis tersebut, Bung Karno menyerukan perlunya revolusi mental. "lebih-lebih lagi dalam suatu masa nation building dengan segala godaan-godaannya dan dengan segala aberasinya, sebagai yang diuraikan tadi itu, maka revolusi mental adalah mutlak diperlukan untuk mengatasi segala penyelewengan, lebih diperlukan dari pada dalam masa sebelum nation building itu, yaitu dalam masa liberation.

Dalam rangka menggelorakan revolusi mental, sejak 17 Agustus 1957, Bung Karno menggulirkan gerakan hidup baru. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa gerakan hidup baru ini tidak sekedar menyerukan hidup sederhana. "Seluruh jiwa kita harus kita permudahkan kembali harus kita cuci kembali, harus kita sikat kembali. Seluruh jiwa kita harus kita tempa kembali, harus kita gembelng kembali. Buat apa sederhana, kalau sederhana itu, sederhananya seorang jambel yang makan nasi dengan garam saja, tidak dalam piring, tapi dalam daun pisang, dan tidur di tikar yang sudah amoj tetapi jiwanya mati seperti kapas yang sudah basah, jiwa mati yang tiada gelora, jiwa mati tiada ketangkasan nasional sama sekali, jiwa mati yang tiada idealisme yang berkobar-kobar, jiwa mati tiada kesediaan untuk berjuang. Buat apa kesederhanaan yang demikian itu.

Gerakan hidup baru bertujuan untuk melaksanakan revolusi mental sebagai persiapan pembangunan masyarakat yang dicita-citakan oleh proklamasi 17 Agustus 1945 isi gerakan hidup baru adalah:

1. Perombakan cara berpikir, cara kerja, cara hidup, yang merintangki kemajuan
2. Peningkatan dan pembagunan cara berpikir, cara kerjja, cara hidup yang lebih baik.

Singkat kata, gerakan hidup baru adalah gerakan revolusi mental untuk menggembelng manusia Indoneia manjadi manusia baru, yang berhati

putih, berkemauan baja, bersemangat elang raja wali, berjiwa yang menyala-nyala. Maksudnya tidak kecil, maksudnya amat besar untuk menyelesaikan suatu perjuangan yang amat berat.

Apa hendak dikata, gerakan hidup baru tidak bertahan lama karena krisis yang berkepanjangan dalam dunia politik. Dalam perkembangan lebih lanjut, pemabangunan yang dijalankan terlalu menekan pada pembangunan raga dengan mengabaikan pembangunan jiwa. Perubahan-perubahan besar dan massif dalam penampilan fisik-material tidak diikuti oleh perubahan mendasar pada struktur mentalitas. Pada relung terdalam kejiwaan bangsa ini masih bercokol mentalitas feodalis yang mengisap ke bawah, tetapi mudah bermetamorfosis menjadi mentalitas budak di hadapan tuan-tuan agng. Mentalitas budak (inferior) menjadikan bangsa ini mudah mengekor bangsa lain, saat yang sama sulit menghargai kelebihan dan kemenangan sesama bangsanya sendiri.

Dengan struktur mentalitas seperti itu, kemerdekaan dan pembangunan Indonesia tidak diikuti oleh kemandirian dalam ekonomi, kedaulatan dalam politik, dan kepribadian dalam kebudayaan. Lemahnya mentalitas kemandirian membuat wajah perekonomian bangsa ini belum kunjung beranjak dari gambaran perekonomian, negeri terjajah yang dilukiskan oleh Bung Karno pada tahun 1930-an. Pertama sumber daya alamnya hanya dijadikan bahan baku murah oleh negara maju. Kedua, negeri kita hanya dijadikan sebagai pangsa pasar untuk menjual hasil produk-produk hasil industri negara maju. Ketiga . dijadikan tempat untuk memutarakan kelebihan modal (kapital) oleh negara-negara kapitalis atau dengan kata lain menjadi tempat investasi asing.

Lemahnya mentalitas kedulatan membuat politik negeri ini tidak leluasa mengembangkan pilihan sistem dan kebijakan politik sendiri. Keluar, kewibawaan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasioanal kian memudar. Ke dalam, pilihan-pilihan pembangunan tidaklah ditentukan apa yang disebut Tan Malaka sebagai “kemauan, pelor, atau bambu runcingnya rakyat Indonesia sendiri. Tanpa

kedaulatan mengembangkan sistem pemerintahan sendiri, demokrasi padat modal membuat pilihan-pilihan politik kerap dimenangkan kepentingan korporasi, karena aspirasi rakyat tidak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri.

Lemahnya mentalitas kepribadian membuat kebudayaan bangsa ini tidak memiliki jangkar karakter yang kuat. Tanpa kekuatan karakter Indonesia adalah bangsa yang besar tetapi bermental kecil, bangsa besar mengindap penyakit rendah diri. Bangsa yang selalu melihat dunia luar sebagai pusat teladan, tanpa menyadari dan menghargai kelebihan-kelebihan bangsa sendiri. Tanpa kekuatan karakter kita sulit menjadi pemenang dalam era persaingan global. Sebab seperti diingatkan Napolion Bonaparte dalam pertempuran. (baca:persaing) tiga perempat faktor kemenangan ditentukan oleh kekuatan karakter dan relasi personal, adapun seperempat lagi oleh keseimbangan antara keterampilan manusia dan sumber daya material.

Untuk bisa bangkit dari keterpurukan, bangsa ini harus kembali ke trayek sejarah yang tercegat: melanjutkan revolusi mental. Inti dari revolusi mental ini adalah perubahan besar dalam struktur mental manusia Indonesia melalui proses nation karakter building.

Gerakan revolusi mental ini beragkat dari asumsi, bahwa dengan mengubah mentalitas (pola pikir dan sikap kejiwaan) akan menimbulkan perubahan perilaku yang terus diulang akan menjadi kebiasaan (adat istiadat/moalitas) sedangkan kebiasaan yang terus dipertahankan akan membentuk karakter.

Dengan demikian, meskipun nama gerakan ini lazim disebut “revolusi Mental” tetapi tidak terhenti pada perubahan pola pikir dan sikap kejiwaan saja, melainkan konsekwensi turunannya dalam bentuk perubahan kebiasaan (moralitas) dan perwujudan karakter yang menyatukan antara pikiran , sikap, dan tindakan sebagai suatu integritas.

Pembangunan mental karakter ini harus bertuan antara proses pembentukan pribadi yang bermental karakter baik dengan kolektivitas bangsa yang bermental karakter baik. Bahwa kebaikan dan kekuatan mental-karakter individual hanya bisa memperoleh kepenuhan manfaatnya jika terintegrasi kedalam kebaikan dan kekuatan mental-karakter bangsa secara kolektif

2. Mental Pancasila

Dasar dan haluan pembangunan mental karakter ini adalah nilai Pancasila. Menurut pandangan hidup Pancasila keberadaan manusia merupakan ada yang dicipta oleh cinta kasih sang maha pencipta. Di depan sang maha kasih semua manusia sederajat yang melahirkan semangat mental egalitarianisme. Setiap pribadi dimuliakan sang pencipta dengan bawaan hak azasi yang tidak bisa dirampa, seperti hak hidup, hak milik dan kehormatan kemerdekaan dengan kedudukan yang sama di depan hukum.

Penghormatan terdapat eksistensi individu dan hak asasinya tidak berarti harus mengarah pada individualisme. Individualisme memandang bahwa manusia secara perseorangan merupakan unit dasar dari seluruh pengalaman manusia. Postulat dasar dari individualisme adalah otonomi independen dari setiap pribadi. Sebuah ungkapan untuk individualisme menyatakan: "kamu datang ke dunia seorang diri." Meskipun kenyataannya tidak ada seorang lahir ke dunia seorang diri. Selalu ada Ibu dan budaya komunitas yang menyertainya, bahkan mengantarnya hingga ketempat peristirahatan yang terakhir'.

Apa yang menjadi karakteristik dari individualisme merupakan kenyataan implisit bahwa relasi sosial bukanlah pembentukan perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental. Dengan kata lain perseorangan tidak dipandang sebagai produk relasi-relasi sosial. Relasi sosial adalah suatu yang terjadi pada individu ketimbang suatu yang mendefinisikan identitas dan mengkoordinasikan eksistensi individu. Individu tidaklah dibentuk dan diubah secara fundamental oleh relasi sosial, dan oleh karenanya tetap sebagai pribadi yang otonim-independen. (Gilbert 2014:29-34)

Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidak dapat bisa berdiri sendiri terkecuali dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, tergantung dalam bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya (Gilbert, 2014:69-88).

Tanpa kehadiran yang lain manusia tidak akan pernah menjadi manusia sepenuhnya. Kebijakan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu untuk menjadi manusia yang baik, manusia harus membentuk kolektivitas yang baik pula.

Dalam kaitannya dengan ini bahwa pengembangan mental karakter harus berorientasi ganda baik ke dalam maupun ke luar. Pengembangan ke dalam, mental karakter harus memberi warna kepada setiap individu untuk mengenali dirinya sebagai perwujudan khusus (deferensiasi) dari alam. Sebagai perwujudan khusus dari alam bahwa setiap individu memiliki keistimewaan kecerdasannya masing-masing. Proses pengembangan mental-karakter harus membantu peserta menemukan kekhasan potensi diri tersebut sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan.

Aktualisasi dari kesadaran ini adalah pemupukan keandalan khusus seseorang yang memungkinkannya memiliki kepercayaan diri, daya tahan dan daya juang dengan tetap memiliki sensitivitasnya terhadap nilai-nilai kebudayaan yang baik, benar, dan indah. Pengenalan terhadap kekhasan potensi diri dan komitmennya terhadap kebersamaan nilai-nilai kebudayaan itulah yang menjadi dasar pembentukan karakter. Karakter dalam pengertian ini adalah kecenderungan psikologis yang membentuk kepribadian moral (Likona, 2011).

Sedangkan pengembangan ke luar, pengembangan mental-karakter haru memberikan wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem prilaku bersama melalalui olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga, kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem prilaku ini secara keeluruhan membentuk lingkungan sosial yang menentukn apakah disposisi karakter seseotrang berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Kebudayaan sebagai lingkungan sosial tersebut sebagai wahana pembentukan karakter klektif. Engertin bangsa (nation) menurut Otto Bauer menyatakan bahwa, bangsa adalah sustu, atu persatuan karakter, watak yang peratuan karakter atau watak ini tumbuh , terjadi karena persatuan pengalaman. Dalam kaitan ini Bung Karno pernah menyatakan bahwa “tidak ada dua bangsan yang cara berjungnya sama. Tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunya karakteriistik sendiri. Oleh karena itu pada hakkatna bangsa sebagai indivvidu memiliki kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal dalam kebudayaan, dalam perekonomian, dalam watak, dan lain sebagainya (Soekarno, 1958)

Dalam menghadirkan kolektifitas yang baik, etiap pribadi memiliki sosial (bahkan dituntut unuk mendahulukan kewajiban di atas hak). Sehubungan dengan itu selain ada hak individu ada pulu hak kolektif (ekonomi, sosil, budaya). Sebagai panan dar semangat egaliterinisme pada level pribadi bangsa Indonesi sebagai sustu kolektifits juga harus memperoleh, bahkan lebih dahulu memperoleh hak kemrdekaannya. Ini merupakan pesan moral dari aalinea pertama UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya Kemrdekaan itu ialah hak segala bangsa”.

Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kemerdekaan bangsa ini adalah mental kemandirian. Kemandirian berbeda denan kesendirian. Kemandirian yang diangun adalah sikap mental yang bisa dan berani bepikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat, bebas dari intervensi dan paksaan pihak lain. Menumbuhkan mental mandiri. Selain

mansyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan dan kreatifitas berbasis pengembangan ilmu dan teknologi.

Kemandirian bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara konsisten bila warga Indonesia dapat menunaikan kewajiban publiknya yang amanah, jujur, dan bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalita kejujuran akan mengubah kemandirian bangsa. Mentalitas bangsa yang koruptor akan berakibat kedaulatan bangsa tersebut mudah jatuh ke dalam dikte-dekte bangsa lain.

Selain semangat mental egaliter, mandiri dan amanah, manusia sebagai makhluk religius yangberkemanusiaan juga haru membebaskan diri dari berhala materialisme dan hedonisme.

Menurut pandangan hidup Pancasila materi itu penting tetapi tidak diberhalakan. Dihdapan yang Maha Kuasa materi itu yang bersifat relatif yang tidak dapat dimutlakkkan. Dengan semangat ketuhanan yang berpri kamanusiaan, materi sebagai hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan sesuai perintah Nya.

Dengan mental altruis manusia Indonesia sebagai makhluk sosial dapat mengebangkan pergulsn hidup kebangsaan yang ditandai oleh segala kemajmukan dengan mentalitas gotong royong (bhinneka tunggal ika) persatuan dan keragaman. Dengan semangat gotong royong persatuan manusia (warga negara Indonesia) dapat dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan, sedang dalm perbedaan dapat merawat persatuan.

Untuk menumbuhkan mentaltas persatuan dalam keragaman itu diperlukan smangat mental pengorbanan dan pelayanan. Hasil dari semangat persamaan, kemandirian, kejujuran dan persatuan adalah pelayanan manusia. Makna pelayanan di sini bukan hanya dalam bentuk kesiapan mental untuk menunaikan kewajiban sosial sesuai dengan tugas dan fungsi namun juga dalam bentuk pengaktualisasian potensi diri hingga meraih

pretasi tinggi di bidang masing-masing yang akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan bangsa dan umat manusia.

C. Latihan

1. Deskripsikan dan berikan alasan rasionalnya tujuan gerakan nasional revolusi mental
2. Deskripsikan tiga ranah revolusi mental
3. Uraikan gerakan hidup baru sesuai cita-cita proklamasi tahun 1945
4. Sebutkan alasan bahwa gerakan hidup baru belum berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
5. Uraikan gerakan revolusi mental dimulai dari mana dan sampai dimana

EVALUASI

1. Revolusi mental (superstruktural) mental kultural diarahkan untuk menciptakan...
 - a. Masyarakat yang religius, berprikemanusiaan egaliter, mandiri, amanah dan bebas dari berhala materialisme-hedonisme.
 - b. Perekonomian yang merdeka, berkeadilan, dan berkemakmuran.
 - c. Memberikan transformasi sosial, yang holistik dan antisipatif
 - d. Agen perubahan dalam bentuk integrasi, kekuatan sosial melalui pemusyawaratan.
2. Gerakan hidup baru bertujuan untuk melaksanakan revolusi mental sebagai persiapan membangun masyarakat yang dicita-citakan oleh semangat proklamasi 17 Agustus 1945 adalah:
 - a. Masyarakat yang religius, berprikemanusiaan egaliter, mandiri, amanah dan bebas dari berhala materialisme-hedonisme.
 - b. Perombakan, peningkatan dan pembangunan cara berpikir, cara kerja, cara hidup yang melindungi kemajuan dengan cara hidup yang baik
 - c. Memberikan transformasi sosial, yang holistik dan antisipatif
 - d. Agen perubahan dalam bentuk integrasi, kekuatan sosial melalui pemusyawaratan.

3. Menurut pandangan hidup kita, pembangunan mental karakter ini merupakan nilai yang terdapat dalam Pancasila, yaitu dalam...
 - a. A. 1,4, dan 5
 - b. B.2.3, dan 5
 - c. C. A. Sila 1,2 dan 3
 - d. D. 1, 4, dan 5
4. Revolusi mental merupakan salah satu unsur dari revolusi Pancasila, revolusi yang diorientasikan . Inti dari revolusi mental ini adalah....
 - a. Perubahan mendasar pola pikir dan sikap kejiwaan bangsa Indonesia
 - b. Perubahan mengikuti perkembangan negara-negara maju
 - c. perubahan kebiasaan sesuai dengan karakter masing-masing suku bangsa
 - d. Perubahan mengikuti perkembangan IPTEK
5. Suatu nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat, misalnya gotong royong di dalam membersihkan lingkungan dapat menjadi norma apabila...
 - a. Telah dibakukan
 - b. Dihayati secara mendalam
 - c. Telah dikenal secara turun menurun
 - d. Telah menjadi kebiasaan

UMPAN BALIK

Setelah menjawab soal-soal evaluasi di atas, cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban yang benar disesuaikan dengan kunci jawaban untuk mengetahui tingkat penguasaan anda.

BAB 02	PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI DAN KEPRIBADIAN BANGSA
-------------------	---

A. Indikator Hasil Belajar

Peserta diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi lahirnya Pancasila dalam nilai juang dikaitkan dengan nilai revolusi mental.
2. Mengidentifikasi macam-macam norma dalam penerapan kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar (nilai praxis Pancasila)
3. Menganalisis kegiatan perjuangan pendiri NKRI sebagai pembelajaran
4. Menyebutkan nilai-nilai jati diri bangsa dan kepribadian yang diharapkan sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila

B. Uraian Materi

1. Nilai-Nilai Juang Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Nilai-nilai (*values*) merujuk kepada sesuatu “objek”, tapi bukan objek itu sendiri, melainkan sesuatu yang melekat pada suatu objek. Manusia baik, merujuk manusia, tapi tidak berhenti pada “subjek”, melainkan sifat- sifat subjek, kualitas subjek. Nilai-nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, nilai-nilai merupakan realita yang tersembunyi di balik objek (metafisika). Nilai-nilai ada sebab ada kenyataan-kenyataan di baliknya, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga (kualitas).

Melakukan penilaian (menilai) berarti membuat atau melakukan proses menimbang, membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan (*judgement*). Keputusan sebagai hasil mempertimbangkan (subjek penilai) terhadap objek tentu saja sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada pada subjek, unsur jasmani, rasio (cipta), karsa (wiil, moral), dan rasa

(estetika), religiusitas (iman, kepercayaan), subjek. Bernilai atau tidak suatu objek apabila sesuatu itu berguna, berharga, benar, indah, baik dan sebagainya, menurut subjek yang menilai.

Perlu dicatat bahwa dalam nilai-nilai terkandung cita-cita (*ide*), harapan, keharusan (*das sollen*). Ada tali-temali yang tidak dapat dipisahkan antara "*das sollen*" (cita-cita) itu dengan "*das sein*" (realita). Keinginan untuk mewujudkan cita-cita menjadi kenyataan, sesuatu yang normatif menjadi perbuatan real sehari-hari itulah yang akan menentukan kualitas subjek (manusia) sistem etika (filsafat moral) menunjukkan bahwa tidak ada pandangan tunggal tentang nilai-nilai. Bergantung subjek dan sudut pandang yang digunakan dalam memandang "harga" suatu objek dalam hubungannya dengan subjek. Kaum *Hedonis* memandang yang berharga yang sanggup memberikan kenikmatan kaum *Utilitaris* menganggap yang bernilai yang memberikan kegunaan bagi banyak orang. Kaum *Eudemonis* menganggap "kebahagiaan" sebagai sesuatu yang bernilai dan berupaya diwujudkan melalui perbuatan "utama". Kaum *Deontologis* menganggap yang berharga adalah berbuat sesuatu sebagai suatu kewajiban. Kaum *Teologis* yang berharga jika mematuhi dan menjauhi norma ke Illahian. Kaum *Vitalistik* menganggap yang bernilai apabila memiliki kemampuan pengendalian diri. Kaum *Materialis* menganggap harga manusia diukur dari kepemilikan harta dunia (materi), pendek kata sangat variatif dan tidak bermakna tunggal.

Max Scheler berpendapat bahwa nilai-nilai itu merupakan hierarki. Ada tingkatan-tingkatan kualitas nilai-nilai. Posisi suatu nilai dapat dikategorikan dalam nilai-nilai tinggi, nilai-nilai lebih rendah, berharga dan kurang berharga. Nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan, sebagai berikut:

- a. **Nilai-nilai Kenikmatan:** Nilai-nilai yang menimbulkan rasa senang ataupun tidak menyenangkan, menimbulkan rasa suka atau menderita.
- b. **Nilai-nilai Kebudayaan:** Nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti : kesehatan, kesejahteraan umum, ketertiban lingkungan.
- c. **Nilai-nilai Kejiwaan:** Nilai-nilai keindahan, kebenaran, kejujuran,

kesetiaan.

- d. **Nilai-nilai Kerokhanian:** Nilai tertinggi dalam kehidupan, nilai-nilai yang lazimnya bersifat pribadi (personal) tentang yang suci dan tidak suci.

Notonegoro, guru besar UGM membagi nilai-nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a. **Nilai Material:** Segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, nilai-nilai yang mengakomodasi kebutuhan fisik-jasmani manusia.
- b. **Nilai Vital:** Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam mengadakan aktivitas dalam kehidupan.
- c. **Nilai Kerohanian:** Segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam aspek rohaniannya. Nilai kerohanian dibedakan menjadi empat :
 - 1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
 - 2) Nilai kebaikan (moral), bersumber pada kehendak (will, karsa manusia).
 - 3) Nilai keindahan (rasa, esthetis geooel) manusia.
 - 4) Nilai religius, nilai tertinggi dan obsolut, nilai yang bersumber pada agama, kepercayaan, umat manusia.

Mengacu pada konsep Notonegoro tentang nilai-nilai, maka dalam menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan Pancasila mengacu pada kategori nilai-nilai Notonegoro sebagai berikut.

a. *Peneladanan Nilai Juang dalam Proses Perumusan Pancasila*

Pancasila merupakan karya besar para tokoh-tokoh besar pendiri negara. Karya besar yang “digali” dari ibu Pertiwi. Hasil “renungan” sedalam- dalamnya dari dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Konsensus bersama (konsensus nasional), janji kstaria tokoh nasional, komitmen untuk menjadi “*belief system*”, *way of life* bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai luhur Pancasila pastilah lahir dari pemilikan sikap ucap dan tindakan luhur para bapak bangsa. Mustahil pikiran besar lahir dari manusia yang tidak memiliki konsepsi besar, jiwa besar, kemampuan membaca tanda-tanda jaman dalam memperjuangkan masa depan menjadi lebih baik. Namun tetap kuat berakar pada jati diri kepribadian bangsa sendiri sosio- budaya sendiri. Karena itulah generasi penerus perlu meneladani menjadikannya “panutan” dalam bertutur, bersikap, bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Soenoto dalam bukunya “Menenal Filsafat Pancasila-Etika Pancasila” (1982:72-73) menyatakan bahwa menanamkan moral Pancasila dalam keluarga tidak sama dengan di sekolah. Di dalam keluarga lebih dititik beratkan pada pengamalan berupa contoh-contoh konkrit.

Pengamalan sila Ketuhanan yang Maha Esa wajib ditunjukkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari sesuai dengan agama dan kepercayaan masing- masing. Misalnya:

- 1) Memberi bantuan kepada fakir miskin, orang-orang lanjut usia, panti asuhan, korban bencana alam.
- 2) Menunjukkan dalam arti berbuat kasih sayang pada sesama manusia, sesama anggota keluarga.
- 3) Tidak bertindak kejam pada makhluk hidup, binatang, menembak burung semena-mena. Memelihara hewan dan memperlakukannya dengan baik- manusiawi.

Pengamalan persatuan Indonesia-moral persatuan dapat dilakukan dengan contoh perbuatan nyata sebagai berikut:

- 1) Hidup rukun di dalam keluarga antara ibu-ayah, orang tua-anak, adik- kakak, kakek-nenek, cucu.
- 2) Hidup rukun dengan tetangga, tidak menjadi tetangga yang “berisik” *trouble maker* lingkungan. Kehidupan rukun dengan masyarakat di mana kita hidup dan berdomisili

Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dapat memberikan contoh perbuatan nyata sebagai berikut:

- 1) Tidak bersikap otoriter, diktatorik dan mau atau asal menang sendiri.
- 2) Memberi kesempatan anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat.
- 3) Menjadi pembicara yang santun” dan pendengar yang sabar.
- 4) Tidak memotong pembicaraan orang yang sedang mengemukakan pendapat.
- 5) Memilih kata-kata yang tidak menyakitkan dan menyinggung perasaan orang lain.
- 6) Berlaku bijaksana (hikmat, wisdom), mendengar dan mau menerima pendapat anggota keluarga.
 - a) Menghargai perbedaan pendapat dan menemukan kesepakatan dalam sharing di keluarga.
 - b) Tenggang rasa

Gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan di keluarga. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melaksanakan tindakan nyata dengan contoh sebagai berikut:

- 1) Memperlakukan sama anggota keluarga tidak pilih kasih.
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan masing-masing.
- 3) Tidak memberi beban berlebihan pada anggota keluarga.
- 4) Tidak menuntut hak di luar kemampuan.
- 5) Berlaku “paramarta” terhadap sesama anggota masyarakat tetangga terdekat.

Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan berlangsung dalam “tri pusat” pendidikan. Pendidikan di keluarga (informal), pendidikan di sekolah (formal), pendidikan di masyarakat (non Formal). Ketiganya saling terkait, berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Jika pendidikan tidak mendukung dari salah satu bagian maka hasil pendidikan tidak

dapat optimal, contoh

- 1) Pendidikan formal “baik” pendidikan di keluarga tidak mendukung pendidikan masyarakat “baik” maka hasilnya tidak akan optimal
- 2) Pendidikan di keluarga “baik” pendidikan di sekolah mendukung, pendidikan di masyarakat tidak mendukung maka hasil pendidikan tidak optimal
- 3) Pendidikan di keluarga “baik”, pendidikan di masyarakat juga baik, pendidikan di sekolah tidak mendukung maka hasil pendidikan tidak optimal

Salah satu bagian dari tripusat tidak mendukung, hasilnya tidak akan optimal. Apalagi jika dua bagian tidak mendukung. Lebih-lebih lagi jika ketiga-tiganya tidak berjalan baik (pesan dan cara) maka secara hipotetik hasilnya pasti tidak akan optimal.

Tinjauan histories, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 dan kemudian disusul oleh organisasi lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajah. Perjuangan ini jelas memperlihatkan dinamika bangsa Indonesia dan ini memberikan corak khas kepada Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandiri (Soerjanto, 1989:5).

Tinjauan cultural, menempatkan nilai-nilai Pancasila yang pada hakekatnya bertumpu pada budaya bangsa yang terebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berkat jasa para pendiri negara yang dengan daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi paangan hidup bangsabagi kelestarian hidupnya dalam masa yang akan datang.

Daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang dari para pendiri negara dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 dan 32, pasal 18 UUD 1945.

Pasal 18 UUD 1945 itu dinyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” (UUD 1945 hasil amandemen)

Nilai-nilai ini sebagian diangkat dari khasanah budaya bangsa di daerah- daerah melalui pasal 18 UUD 1945; dan sebagian lagi berdasar peluang yang dimungkinkan oleh pasal 32 UUD 1945 dengan mengakulturasi kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing (Moerdiono, 1992:411)

Melalui tinjauan politis, Pancasila merupakan hasil kompromi bangsa Indonesia yang serba berbhinneka, suatu konsensus bangsa Indonesia yang mampu menjamin persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, suatu kesepakatan konseptual dengan visi dan orientasi yang luas dan mendalam.

Berdasarkan tinjauan politis ini, maka perstuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu keharusan. Nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah nilai fundamental Pancasila. Wujudnya dalam kehidupan bernegara dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”*.

Negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan system desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Di samping pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila seperti telah disebutkan di atas, maka pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila suatu keharusan pula. Hal ini disebabkan pembentukan UUD membatasi nilai-nilai fundamental Pancasila itu pada “aturan-aturan pokok” saja. Sebagaimana dinyatakan Moerdiono, pendalaman nilai-nilai instrumental Pancasila antara lain dalam bentuk wawasan, doktrin, kebijakan, strategi (Moerdiono, 1992:411-413).

Wawasan disini dimaksudkan, bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila harus dipandang dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan demikian sifatnya adalah subyektif.

Doktrin disini dimaksudkan bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila didalami melalui doktrin, yakni suatu pedoman untuk bertindak, ajaran yang sifatnya kaku (Panyarikan, dkk, 1993/1994:16).

Sedangkan kebijakan disini dimaksudkan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang (pemimpin pemerintah/penyelenggara negara) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, berdasarkan wawasan atau doktrin yang telah ditetapkan. Strategi disini dimaksudkan adalah suatu rencana induk untuk melaksanakan suatu kebijakan, dengan mempergunakan sumber daya yang tersedia. Contoh Strategi yang akan dicapai adalah swasembada pangan, melalui program pembukaan lahan gambut menjadi daerah penghasil padi, program jagungisasi di Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Dsb

b. *Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.*

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Hal ini dikarenakan Pancasila diyakini kebenarannya dan dapat membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia apabila implementasi nilai

diwujudkan dalam tata kenegaraan dan tata laku kehidupan sehari-hari. Disamping itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama apapun. Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kesatuan, keadilan, dan sebagainya.

Memahami Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa dapat di implementasi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara antara lain:

- 1) Mengetahui keteladanan proklamator
- 2) Mengetahui sila-sila Pancasila
- 3) Menampilkan tutur kata, sikap, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar.
- 4) Mengetahui baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap dalam kehidupan
- 5) Mengetahui keteladanan tokoh-tokoh BPUPKI
- 6) Menampilkan tutur kata, perilaku, dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan keluarga.
- 7) Mengetahui baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku, dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar.
- 8) Mengetahui keteladanan tokoh-tokoh PPKI dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- 9) Membiasakan diri untuk bertutur kata, berperilaku, dan bersikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar.

c. Pancasila sebagai pedoman hidup dan budaya bangsa

Pancasila merupakan lima prinsip kebijaksanaan hidup (*wisdom*, kearifan, *belief sistem*) dalam berbangsa bernegara. Pancasila merupakan roh – semangat jaman, semangat, tekad bangsa Indonesia menjawab masalah, tantangan jaman. Sekaligus juga merupakan cita-cita bangsa, cita-cita yang akan diperjuangkan (nilai-juang) untuk menjadi kenyataan (*das Sein*). Cita-cita (*das Sollen*) yang harus

membumi menjadi perilaku hidup sehari-hari (*Pancasila in action*).

Causa materialis Pancasila sesuatu yang tidak asing bagi bangsa Indonesia, sesuatu yang kokoh "*inherent*" pada cara hidup dan kehidupan (sosio budaya) bangsa Indonesia dari waktu ke waktu, dari jaman ke jaman. Di dalam sosio budaya bangsa Indonesia itulah eksis, tumbuh, berkembang "keyakinan" (*belief system*) tentang apa yang baik dan tidak baik menurut bangsa Indonesia. Apa yang diyakini benar dan tidak benar oleh bangsa Indonesia. Apa yang dianggap indah dan tidak indah menurut bangsa Indonesia. Apa yang diyakini religius dan tidak religius menurut bangsa Indonesia. Kristalisasi dari keyakinan tentang baik dan tidak baik (karsa, etika, will), benar dan tidak benar (cipta, logika, rasio), indah dan tidak indah (rasa, estetika, seni dan keindahan), religius dan tidak religius itulah filsafat. Jika, filsafat itu sudah "*inherent*", menjadi cara hidup (*way of life*), pedoman hidup, acuan hidup, pandangan hidup, jadilah filsafat hidup. Apabila filsafat hidup itu diangkat menjadi dasar negara jadilah dia ideologi bangsa (pandangan hidup bangsa), dasar negara (ideologi negara).

Soepomo menyebutkan Negara Indonesia yang mau didirikan mestilah Negara yang tidak menjiplak (tiruan) Negara-bangsa lain. Negara yang memiliki akar kuat – adat istiadat bangsa itu sendiri, Negara Integralistik. Sebab setiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri, memiliki cara spesifik dalam menjawab masalah – tantangan untuk tetap eksis sebagai bangsa.

Bangsa Indonesia sejak jaman dulu mengembangkan kebudayaan sebagai wujud "jati diri" sebuah bangsa. Kemudian datanglah berbondong-bondong bangsa asing ke Indonesia, tidak hadir secara pisik saja, tapi juga membawa nilai-nilai sosio-budayanya.

Berturut-turut bangsa dan budaya asing itu ialah Hindu-syiwa, Budha, Islam dan kemudian modernitas, kemudian globalisasi datang ke Indonesia membawa sosio-budayanya. Bangsa Indonesia memiliki cara

spesifik (khusus-khas) dalam menerima, mengolah filsafat dari luar menjadi milik bangsa Indonesia dengan bertumpu kokoh pada filsafat hidup bangsa Indonesia. Proses menerima dan mengolah dengan metode “*ekletik-inkorporasi*”, termasuk konsep-konsep modern seperti humanisme, demokrasi, sosialisme. Nilai-nilai Pancasila yang secara definitif dirumuskan dan disahkan sejak tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, 18 Agustus 1945.

Notonegoro menegaskan Pancasila digali dari: tri prakara”. Sejak neneng moyang pra Hindu sudah merupakan : asas kemasyarakatan, asas kenegaraan, dan asas religiusitas bangsa Indonesia.

Bung Karno menegaskan bahwa beliau tidak “menciptakan” Pancasila, tapi menggantinya dari kandungan ibu pertiwi. Sudah sejak tahun 1918, melakukan perenungan dan memperjuangkannya. Tri sila : sosio-nasionalisme, sosio demokrasi, dan Ketuhanan yang Maha Esa menjadi ideologi PNI yang didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Pancasila, tri sila, eka sila yang pada waktu pidato 1 Juni 1945 diusulkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila tersebut yang digali dari lapis-lapis sosio budaya pra Hindu, Hindu syiwa, Budha, Islam, Modernitas – globalisasi ditemukan lima mutiara (butir-butir) yang berupa Pancasila. Causa formalis dan causa efisien Pancasila (asal mula bentuk, asal mula karya) dalam sejarah ideologi Pancasila pernah mengalami pengaburan, sejarawan Nugroho Notosusanto menyimpulkan bahwa penggali-penggali utama Pancasila adalah tiga orang : Muh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno, Bung Karno merupakan salah satu penggali saja. Sejarah siapa “perumus” Pancasila perlu diluruskan, begitu menurut Asvi Warman Adam (sejarawan LIPI) dalam bukunya Membongkar Manipulasi Sejarah. Kontroversi pelaku dan peristiwa (2009: 26-31), selama pemerintahan orde baru sengaja direayasa sejarah Perumusan Pancasila. Hal ini, bertalian dengan strategi pengendalian sejarah dengan cara mengecilkan jasa Soekarno dan melebih-lebihkan peran Soeharto dalam panggung sejarah nasional.

AB. Kusuma dalam makalah “Menelusuri Dokumen Historis Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan”, berdasarkan notula yang ditemukan kembali tahun 1989, menyatakan “tidak benar” Yamin yang pertama mengungkap dasar Negara Pancasila, Yamin justru mengakui Bung Karno sebagai satu-satunya penggali Pancasila. Panitia lima yang diketuai Hatta, juga “wasiat” Hatta pada keluarga Bung Karno menegaskan Soekarno yang pertama berpidato mengenai Pancasila.

Dr. Anhar Gonggong menyatakan Bung Karno amat berperan dalam tiga peristiwa yang terkait proses lahirnya Pancasila yaitu 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945. Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai penyampai gagasan yang sudah di kepala beliau sejak muda (1918, 1927), 22 Juni 1945 sebagai ketua panitia 9 (Tim 9) yang melahirkan Piagam Jakarta, kemudian 18 Agustus sebagai ketua PPKI yang lalu dipilih sebagai presiden RI. Pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno yang secara eksplisit menyampaikan pidato Pancasila. Formulasi pidato 1 Juni 1945 itulah melalui dinamika pembicaraan diantara “*founding fathers*” menjadi Piagam Jakarta, finalnya rumusan otentik pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

Hatta dalam buku yang berjudul “Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan” yang disusun oleh putrinya Meutia Farida Swasono pada halaman 627-628 dimuat testamen Bung Hatta pada Guntur Soekarno Putra menegaskan bahwa pada sidang pertama BPUPKI mengemukakan pertanyaan “Negara Indonesia yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?”. Kebanyakan anggota tidak ada yang menjawab pertanyaan itu, takut akan menimbulkan persoalan filosofis yang berkepanjangan. Inginnya langsung membicarakan Undang-Undang Dasar. Bung Karno yang menjawab pertanyaan itu dengan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Sesudah itu sidang mengangkat panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila pidato Soekarno tersebut. Panitia kecil 9 orang itu yang merumuskan kembali termasuk menata sila-silanya. Sila ke-5 Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila yang

diletakkan di atas. Internasionalisme atau peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kebangsaan Indonesia yang semula diletakkan diatas menjadi sila ke-3 Persatuan Indonesia. Sila ke-4 yang semula diletakkan sebagai sila ke-3 mufakat atau demokrasi menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ke-5 kesejahteraan sosial dalam rumusan Bung Karno sila keempat menjadi keadilan sosial. Pada tanggal 22 Juni 1945 pembaruan rumusan panitia 9 itu diserahkan kepada BPUPKI, dinamakan "Piagam Jakarta". Kemudian Piagam Jakarta dijadikan "Pembukaan" UUD 1945 sehingga "Pancasila dan UUD" menjadi dokumen pokok.

Dokumen pokok itu yang diterima dan disahkan oleh PPKI pada 18-08-1945 dengan sedikit perubahan. Mencoret 7 perkataan di belakang Ketuhanan yaitu "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Sungguhpun tujuh perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja, pemimpin-pemimpin umat kristen di Indonesia Timur berkebaratan, jika tujuh kata itu dibiarkan saja sebab tertulis dalam pokok dari dasar negara, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Begitu bunyi testamen Hatta.

Pada tanggal 16 s.d. 20 Februari 1959 diadakan seminar Pancasila di Sasono-Hinggal Dwi Abad alun-alun kidul, Yogyakarta. Moh. Yamin sebagai anggota Dewan Nasional menjadi pemrasaran seminar, prasarannya berjudul: "Tinjauan Pancasila Terhadap Revolusi Fungsional". Pada halaman 31 menyatakan dengan tegas bahwa: "Menurut sejarah dan kenyataannya, maka Pancasila adalah penggalian Bung Karno".

Dari pengakuan para tokoh yang terlibat aktif dalam Causa Formalis, Causa Efisien Pancasila. Mulai BPUPKI, Panitia 9, PPKI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada satupun dari para pendiri Republik Proklamasi yang menyebut Yamin atau Soepomo sebagai penggali Pancasila.
- 2) Para tokoh yang tidak diragukan integritas personal dan intensitasnya dalam merumuskan Dasar Negara dan UUD negara yang akan merdeka, sepakat berpendapat bahwa penggali Pancasila adalah Ir. Soekarno.
- 3) Ir. Soekarno dengan tegas menyatakan menggali Pancasila dari bumi pertiwi sebagai bidan kepala dibantu para bidan yang lain, ini logis dan ada fakta historis, Bung Karno pengusul Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945 Ketua Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ketua PPKI “versi baru” yang menetapkan-mengesahkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Asvi Warman Adam dalam bukunya membongkar manipulasi sejarah. Kontroversi pelaku dan Peristiwa (2009:30) menulis bahwa seyogyanya kita tidak lagi mempermasalahkan kontroversi yang diciptakan Orde Baru mengenai Pancasila lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, peran Soekarno yang sengaja dikerdilkan. Pengkultusan individu perlu dihindari. Jasa Soekarno sebagai penggali Pancasila meski rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 secara objektif adalah hasil rumusan kolektif bapak-bapak pendiri bangsa. Membesar-besarkan peran seseorang adalah immoral, tapi mengkerdilkan peran seseorang perlu pelurusan sejarah. Agar generasi muda menjadi arif–menghargai pahlawan. Hanya bangsa besar yang mampu menghargai para pahlawannya.

Sekarang di masa modernitas dan globalisasi, seharusnya kita lebih memusatkan perhatian tentang penerapan ideologi di semua bidang kehidupan bangsa bagaimana lebih meyakinkan seluruh komponen bangsa bahwa Pancasila adalah ideologi paling tepat bagi bangsa Indonesia. Pancasila memberi tempat kepada semua agama, golongan,

dan suku bangsa yang pluralistik-majemuk Bhinneka Tunggal Ika. “Causa Finalis” Pancasila memang dirumuskan untuk ideologi negara atau dasar negara menjadi ideologi bangsa atau pandangan hidup bangsa jati diri bangsa Indonesia sejak dulu kala.

2. Implementasi Pancasila dalam sistem pemerintahan demokrasi

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam pada jaman dulu pernah dikenal doktrin manipol usdek disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando *Pemimpin Besar Revolusi*(Bung Karno) kemudian dalam sejarah perkembangannya pernah juga diberlakukan doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan(Soeharto) arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan terutama dalam lembaga-lembaga negara.

a. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:

Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.

b. Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia

Jati Diri adalah ciri khas atau karakteristik suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa yang lain. Pancasila yang menjadi filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu, sebenarnya digali dari tradisi masyarakat berbangsa sepanjang sejarahnya. Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal pluralisme ala Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari keberhasilan para Bapak Pendiri

yang berpandangan toleran dan terbuka dalam beragama dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang.

Jati diri bangsa merupakan suatu pilihan, dan Jati Diri Bangsa Indonesia merupakan pencerminan atau tampilan dari karakter Bangsa Indonesia.

Pancasila dan Jati Diri tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai landasan idiil, landasan filosofis bangsa, sumber dari segala hukum di negeri Indonesia ini, sedangkan jati diri adalah implementasi sehari-hari, sebagai perilaku insan Indonesia, seperti dengan jelas diuraikan di bawah ini:

1) KeTuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mensyaratkan agar warga negara Indonesia sebagai insan hamba Tuhan taat dalam melaksanakan ajaran agamanya. Perilaku kesehariannya senantiasa meninggikan hakekat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari segala sumber kehidupan baik sebagai individu maupun dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai wujud Jati Diri bahwa Indonesia adalah bangsa yang Agamis. Jati Diri ini jelas bahwa Indonesia adalah bangsa yang agamis serta jelas artinya dan jelas konsekuensinya, jelas bentuknya. Sebagai bangsa yang Agamis, bangsa yang beragama, bangsa yang percaya akan adanya Tuhan, bangsa yang beriman. Maka jelas bahwa Indonesia memang bukan negara sekuler.

Sebagai jati diri bangsa dalam sila pertama ini adalah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius/agamis. Sebagai indikatornya setiap warga negara Indonesia diharapkan

- a) dapat membedakan yang baik dan yang buruk
- b) dapat membedakan yang halal dan yang haram
- c) dapat membedakan yang hak dan yang batil.

2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sila ini mensyaratkan agar bangsa Indonesia senantiasa memperjuangkan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia yang beridentitas sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari segala sumber tatanan nilai keadilan dan peradaban. Dalam pelaksanaannya senantiasa harus mempertimbangkan kebebasan individu dan golongan untuk mengembangkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan sesuai budaya daerah dengan tidak meninggalkan identitas nasional. Wujud Jati Diri dari sila kedua Pancasila bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati Hak Azasi Manusia. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum kekuasaan negara/pemerintah dilaksanakan sesuai dengan dasar dan prinsip keadilan, sehingga terikat pada undang-undang (rule of law). Prinsip negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan ada jaminan atas hak asasi manusia untuk rakyatnya.

Jati diri dalam sila kedua ini adalah bangsa Indonesia menghormati hak asasi manusia. Sedangkan perilaku yang diharapkan setiap warga:

- a) berlaku adil
- b) menghormati hak sasi orang lain dalam wujud nyata diharapkan warga negara Indoesia menjadi manusia toleran, tidak dhlim, sopan/santun, dan saling tolong menolong..

3) Persatuan Indonesia

Sila ini mensyaratkan agar para warga bangsa Indonesia senantiasa mengutamakan nilai-nilai persatuan, dan kesatuan bangsa yang menjadi sumber dari segala sumber kekuatan kebangsaan dan pilar kedulatan bagsa sehingga tidak menttolerir terjadinya desintegrasi bangsa. Oleh karena itu jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu prasyarat dominan yang mutlak dipertahankan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Sebagai wujud Jati Diri sila ketiga adalah Bangsa yang cinta Tanah Air. Rasa cinta tanah air atau nasionalisme dalam tulisan ini adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

Sebagai jati diri dalam sila ini adalah bangsa yang cinta tanah air. Sebagai perilaku yang diharapkan setiap warga:

- a) siap sedia membela negara
- b) siap sedia membela kehormatan bangsa
- c) siap sedia menjaga persatuan dan kesatuan

Perilaku yang diharapkan dalam sila ini adalah menjadi warga negara rukun dan damai. Menjaga keutuhan bangsa, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara.

4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Sila ini mensyaratkan agar bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi kehidupan demokrasi dengan menghargai setiap perbedaan pendapat sebagai bagian dari relitas kehidupan. Bhinneka Tunggal Ika bagi kepentingan semua komponen bangsa melalui cara-cara bermusyawarah bermartabat dan berkepribadian kebangsaan untuk mencapai mufakat kebangsaan.

Sebagai wujud sila keempat yaitu Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang Demokratis. Secara umum dapat dikatakan bahwa Demokrasi adalah sistem politik yang memungkinkan semua warga bangsa mempunyai kesempatan mewujudkan aspirasinya.

Sebagai jati diri dalam sila keempat ini adalah menjadi bangsa yang demokratis. Setiap warga diharapkan memiliki jati diri:

- a) tidak mau menang sendiri
- b) tidak menghalalkan semua cara
- c) tidak berbuat merugikan orang lain
- d) bertanggung jawab
- e) tolong—menolong
- f) tidak hirarkhis

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini mensyaratkan agar bangsa Indonesia senantiasa bertindak adil, arif, dan bijaksana demi kepentingan perjuangan nasional. Setiap keputusan publik merupakan sumber kebijaksanaan politik negara yang menempatkan kepentingan bangsa dan kemaslahatan bangsa di atas segalanya. Hal ini merupakan bagian pertanggungjawaban moral bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional serta cita-cita perjuangan bangsa dan negara.

Sebagai Wujud sila kelima adalah Kebersamaan, atau bangsa yang menghormati kebersamaan. Jadi diri dalam sila kelima ini adalah menjadi bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan dengan berkepribadian:

- a) Tidak mementingkan diri sendiri
- b) Memperhatikan nasib orang lain
- c) Gotong royong.
- d) Ringan sama dijinjing berat sama dipikul

Dengan jati diri ini diharapkan warga negara Indonesia menjadi warga yang tidak serakah, berdisiplin/tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, sera suka menolong.

c. Pancasila adalah jalan menuju Pluralisme

Wikipedia On Line Dictionary menjelaskan: pluralisme adalah ilmu social, pluralisme merupakan cara pandang dalam interaksi social di mana masing-masing kelompok memiliki rasa hormat dan toleransi satu dengan yang lain, sehingga mereka berada secara saling menguntungkan dan berinteraksi tanpa konflik. Semangat keberagaman yang cenderung meunja fundamentalism menjadikan masalah serius seringnya pluralitas berpeluang menjadi bencana dari pada rahmat.

Pluralisme biasanya dibicarakan dalam kontek sehubungan antar agama. Dalam perspektif tersebut, jelas dikemukakan tentang pengakuan dan penghargaan terhadap pluralitas suku dan agama.

Pluralime juga merupakan kelanjutan dari model keberagaman yang bercorak inklusif. Inklusivisme meniscayakan adanya pemahaman bahwa agama lain memiliki kesamaan-kesamaan sehingga ada keinginan untuk mencari titik temu. Berbeda dari inklusivisme, pluralisme justru mengakui danya perbedaan-perbedaan. Pluralisme memandang bahwa setiap agama memiliki realitas yang unik. Pemahaman terhadap pluralisme indonesia sebagai satukesatuan dan merupakan aset bangsa yang berperan besar dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa enggan berasaskan Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara menjadi falsafah hidup dan landasan pergerakan kelIndonesiaan. Di dalam pancasila terkandung nilai-nilai yang merupakan cirikhas kepribadian bangsa dan itulah yang seharusnya terus kita pakai sebagai patokan hidup.

Jati Diri adalah ciri khas atau karakteristik suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa yang lain. Pancasila yang menjadi filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu, sebenarnya digali dari tradisi masyarakat berbangsa sepanjang sejarahnya. Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal pluralisme ala Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara menjadi falsafah hidup dan landasan pergerakan ke Indonesiaan. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa dan itu lah yang seharusnya teruskita pakai sebagai patokan hidup.

Sebagai rakyat Indonesia kita wajib menjaga jati diri bangsa Indonesia, dimana dalam hal ini Pancasila adalah salah satu jati diri yang dimiliki bangsa Indonesia yang berperan penting dalam menjaga jati diri bangsa. Oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu menjaga jati diri kita dalam mengenalkan bangsa dimata dunia.

C. Latihan

1. Jelaskan sejarah perjuangan singkat lahirnya Pancasila sebagai dasar negara NKRI
2. Deskripsikan dan berikan alasan lahirnya Pancasila merupakan perjuangan berat para negrawan kita.
3. Deskripsikan Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia
4. Uraikan bahwa Pacasila sebagai jati diri bangsa Indonesia
5. Sebutkan alasan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
6. Uraikan gerakan revolusi mental dimulai ari mana dan menuju ke mana

EVALUASI

1. Jati diri sila kedua dalam Pancasila adalah bangsa Indonesia menghormati hak asasi manusia. Sedangkan perilaku yang diharapkan setiap warga:
 - a. berlaku adil ,menghormati hak sasi orang lain dalam wujud nyata diharapkan warga negara Indoesia menjadi manusia toleran, tidak dhlim, sopan/santun, dan saling tolong menolong
 - b. Tidak mementingkan diri sendiri,Memperhatikan nasib orang lain, dan Gotong royong.
 - c. tidak mau menang sendiri, tidak menghalalkan semua cara, dan tidak berbuat merugikan orang lain
 - d. dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dapat membedakan yang halal dan yang haram, dapat membedakan yang hak dan yang batil.

2. Jadi diri sila kelima dalam Pancasila adalah menjadi bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan dengan berkepribadiannya:
 - a. berlaku adil ,menghormati hak sasi orang lain dalam wujud nyata diharapkan warga negara Indoesia menjadi manusia toleran, tidak dhlim, sopan/santun, dan saling tolong menolong
 - b. tidak mau menang sendiri,tidak menghalalkan semua cara, dan tidak berbuat nerugikan orang lain
 - c. Tidak mementingkan diri sendiri,Memperhatikan nasib orang lain, dan Gotong royong.
 - d. dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dapat membedakan yang halal dan yang haram, dapat membedakan yang hak dan yang batil.
3. Tinjauan historis, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali..
 - a. Budi Utomo 20 Mei 1908
 - b. Serikat Islam
 - c. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
 - d. Serikat Dagang Islam
4. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat obyektif adalah ...
 - a. Nilai yang diwariskan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan
 - b. hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia sejak nenek moyang kita.
 - c. nilai yang terkandung di dalmnya bersifat abstrak, umum dan universal.
 - d. nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan.

UMPAN BALIK

Setelah menjawab soal-soal evaluasi di atas, cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian akhir modul. Hitunglah jumlah jawaban yang benar disesuaikan dengan kunci jawaban untuk mengetahui tingkat penguasaan anda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Diana Boxer

Robin Steven, Perilaku organisasi. Jakarta: PT Prenhallindo 2001

Mendikbud. 2013. *Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mendikbud.2007. *Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nana Sudjana, Ahmad Rivai. (2005). *Media Pengajaran*. Bandung: SinarBaruAlgendindo.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Rohani, Ahmad. (1997). *Media InstruksionalEdukatif*.Jakarta :RinekaCipta

Sanjaya. (2008). *Kurikulum berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sadiman, Arief S. dkk. 1986. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Pustekomdan CV Rajawali.

Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad 1989.*Media Pengajaran*. Bandung: Penerbit Sinar Baru

Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad. 1989. *Teknologi Pengajaran*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.

Sadiman, Arief S., R. Rahardjo, Anung Haryono, Rahardjito. 1990. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*.Jakarta: CV Rajawali

[-http://metodeilmiah.com/penjelasan-fungsi-pancasila](http://metodeilmiah.com/penjelasan-fungsi-pancasila)

[-http://satrio-aji-p.blogspot.com/2013/03/pancasila-sebagai-jiwa-bangsa-indonesia.html](http://satrio-aji-p.blogspot.com/2013/03/pancasila-sebagai-jiwa-bangsa-indonesia.html)

[-http://navigasmaritime.blogspot.com/2013/01/implementasi-pancasila-sebagai-jiwa.html](http://navigasmaritime.blogspot.com/2013/01/implementasi-pancasila-sebagai-jiwa.html)

[-http://hukum.kompasiana.com/2013/03/06/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-bangsa-](http://hukum.kompasiana.com/2013/03/06/pancasila-sebagai-pandangan-hidup-bangsa-)

KUNCI EVALUASI BAB 02

1. a
2. b
3. c
4. d
5. a

KUNCI EVALUASI BAB 03

1. a
2. b
3. c
4. d

MODUL 02

MEMBANGUN KARAKTER DALAM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

BAB 01

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjaga agar pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara kontinyu dan relatif stabil, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan cukup independen dari struktur politik pemerintahan negara. Untuk menciptakan Aparatur Negara seperti tersebut perlu diadakan *adjustment* dalam format Aparatur Sipil Negara dengan memisahkan secara tegas antara jabatan politik (*political positions*) pada tiga cabang pemerintahan dengan jabatan Aparatur Sipil Negara yang harus netral dari intervensi politik.

Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, disadari bahwa pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6.84 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6.69 untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti: ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat.

Masih rendahnya kualitas pelayanan publik tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Meskipun mentalitas birokrat telah berubah dari mentalitas penguasa menjadi mentalitas pelayan masyarakat, perubahan itu diyakini belum cukup meluas di kalangan birokrasi. Sebagian besar birokrat kita masih belum menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang harus dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya, manajemen pelayanan publik masih perlu

pembenahan. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan minimal, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Revolusi Mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga Negara. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dan kemaslahatan umum.

Secara spesifik revolusi mental bagi ASN bermuara pada tiga nilai esensial revolusi mental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Secara singkat, integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral dan etika. Etos kerja dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis dan selalu mencari cara-cara yang produktif dan inovatif. Dengan etos kerja yang baik, setiap peserta (aparatur pemerintahan) akan dapat mencapai visi misi lembaga. Sedangkan gotong royong dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, komitmen untuk membangun kualitas birokrasi pemerintahan telah diterbitkan dokumen kebijakan yang dikenal dengan nama "*Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*" berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Untuk membawa pelayanan publik yang inovatif, seorang pemimpin memerlukan apa yang disebut dengan ***informal authority*** atau kompetensi memimpin. Seorang pemimpin perlu memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang harus dibutuhkan untuk memobilisasi manusia. Dengan karakteristik ini, dipadu dengan *formal authority* yang dimilikinya, maka visinya untuk mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dapat dengan mudah diwujudkan.

Untuk maksud inilah, maka modul Revolusi Mental bagi ASN disiapkan dan materi membangun karakter kepemimpinan dalam inovasi pelayanan publik secara spesifik akan membangun kompetensi kepemimpinan dalam mengelola pelayanan publik yang inovatif. Pelayanan publik yang inovatif dimaksud adalah mengelola pelayanan publik di instansi tempatnya memimpin.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas mengenai tugas Aparatur Sipil Negara untuk menjadi ASN yang dapat bekerja secara profesional dan melayani yang memiliki integritas tinggi, yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara, dengan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik yang berintegritas, dan pemersatu bangsa dan negara. Secara khusus modul ini membahas 3 materi pokok, yaitu: (1) Inovasi dalam pelayanan publik, (2) Dinamika proses inovasi pelayanan publik, dan (3) Karakter pemimpin inovatif di sektor publik. Mata Diklat disajikan berbasis *experiential learning*, dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar revolusi mental, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar revolusi mental dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar revolusi mental dan membentuk sikap dan perilaku yang mengedepankan kepentingan publik, melayani dengan profesional dan berintegritas. Kompetensi ini diindikasikan dengan kemampuan peserta pelatihan dalam:

- a. Menjelaskan mekanisme pelayanan publik yang inovatif;
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks pelayanan publik;
- c. Menunjukkan karakteristik kepemimpinan dalam menginovasi pelayanan publik;
- d. Memobilisasi stakeholder dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik.
- e. Memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks pelayanan publik;

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a. Mengidentifikasi Inovasi dalam pelayanan publik,
- b. Mendeskripsikan dinamika proses inovasi pelayanan publik;
- c. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks pelayanan publik;
- d. Memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks pelayanan publik; dan
- e. Menginternalisasikan karakter pemimpin inovatif di sektor publik.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Dalam modul ini dibahas materi sebagai berikut:

1. Inovasi dalam pelayanan publik, dengan sub materi meliputi: 1) pengertian inovasi, 2) ciri-ciri inovasi, 3) Inovasi sektor pelayanan publik, dan 4) faktor-faktor penghambat Inovasi.
2. Dinamika proses inovasi pelayanan publik, dengan sub materi: 1) hubungan negara dengan publik, 2) permasalahan-permasalahan publik, 3) kendala dalam pelayanan publik, 3) teknik inovasi pelayanan publik, dan 4) indeks inovasi pelayanan publik.
3. Karakter pemimpin inovatif di sektor publik, dengan sub materi: 1) karakter kepemimpinan inovatif di sektor publik, 2) praktek kepemimpinan pemimpin yang melayani, 3) prinsip-prinsip pelayanan publik, 4) azas penyelenggaraan pelayanan publik, 5) dimensi pelayanan dan pelayanan prima.

BAB 02 INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari materi pada modul ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian inovasi
2. Mendeskripsikan cirri-ciri inovasi
3. Mengidentifikasi Inovasi Sektor Pelayanan Publik
4. Mengidentifikasi Faktor Penghambat Inovasi

B. Uraian Materi

1. Pengertian Inovasi

Saat ini, inovasi lebih sering diartikan sebagai produk baru atau layanan baru yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan dari sebuah organisasi. Menurut **Syaefuddin** (2010:3), Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) berupa hasil temuan.

Sementara itu menurut **Everett M. Rogers**, Inovasi adalah suatu gagasan, praktik, atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. **Kuniyoshi Urabe** menjelaskan bahwa inovasi bukan merupakan kegiatan sekali waktu, melainkan suatu proses panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dalam oleh organisasi, dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Sedangkan menurut **UU Nomor 18 tahun 2002**, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu dan pengetahuan baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

2. Ciri-Ciri Inovasi

Ciri-ciri suatu inovasi yang dikemukakan **Rogers** mencakup keuntungan relative, kompatibilitas, kompleksitas, ketercobaan, dan keteramatan.

- a. **Keuntungan relatif**, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomi, factor status sosial (gengsi), kesenangan, kepuasan atau mempunyai komponen yang sangat penting yang makin menguntungkan bagi penerimaan dengan makin cepat tersebarnya inovasi.
- b. **Kompatibilitas (*compatibility*)**, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat.
- c. **Kompleksitas (*complexity*)**, yaitu tingkat kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan penerima akan akan lambat proses penyebarannya. Makin mudah dimengerti suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat.
- d. **Ketercobaan (*triability*)**, yaitu dapat tidaknya dicoba suatu inovasi oleh penerima. Misalnya, penyebarluasan penggunaan bibit unggul pada padi gogo akan cepat diterima masyarakat petani jika petani mencoba menamnya dahulu dan dapat melihat hasilnya.
- e. **Keteramatan (*observability*)**, yaitu mudahnya tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima masyarakat. Misalnya, penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi. Karena para petani dapat dengan mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut, maka mudah untuk memutuskan penggunaan bibit unggul yang diperkenalkan (Ibrahim, 1988).

3. Inovasi Sektor Pelayanan Publik

Uraian di bawah ini merupakan contoh inovasi sektor pelayanan publik yang telah dilaksanakan beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

a. Inovasi pelayanan publik kabupaten/kota di Indonesia

DOMESTIC Best Practices

- Kota Yogyakarta: Menjaring keluhan dan mempercepat kinerja melalui Unit Pelayanan Informasi & Keluhan (UPIK);
- Kota Surabaya: Sapa warga kota melalui media center yg "responsif, integrative, informative" (RI-I);
- Kota Surakarta: Pemenuhan layanan ruang terbuka dan peningkatan PAD melalui program penataan & pengelolaan PKL;
- Kota Denpasar: Pemberdayaan pengrajin tenun tradisional untuk menopang ekonomi lokal;
- Kab. Sragen: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
- Kab. Karanganyar: Larasita, mendekatkan pelayanan kpd masyarakat.
- Kab. Kudus: Pelayanan KTP di desa/kelurahan;
- Kota Surakarta: Modernisasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Provinsi Jawa Timur: Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Kab. Jombang: Tindak lanjut thd pengaduan masyarakat sbg katalisator peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas Ploso;
- Kab. Jombang: Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) Puskesmas Sumobito melalui Arisan Berencana;
- Kota Surakarta: Layanan kesehatan melalui program pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Sumber: Kementerian PAN & RB, 2013, Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah

b. Inovasi pelayanan publik kota Surabaya

Risma Sediakan Arena Balap Khusus untuk 'Geng Motor'

Selasa, 8 April 2014 | 13:00 WIB



Risma Patenkan Rujak Uleg dan Semanggi Suroboyo

Minggu, 18 Mei 2014 | 22:36 WIB



Impian Risma, Gang Dolly Jadi Pusat Produksi Sepatu Kulit

Rabu, 23 April 2014 | 14:11 WIB



Kota Surabaya Dapat Penghargaan Socrates Award 2014

Minggu, 13 April 2014 | 18:23 WIB

c. Inovasi pelayanan publik kota Bandung

AGENDA MINGGUAN DI KOTA BANDUNG

Dari enam kegiatan rutin yang diadakan tiap minggu ini, lima di antaranya merupakan program kerja Walikota Bandung yang baru, Ridwan Kamil. Sementara, satu kegiatan lagi (Car Free Day) merupakan program warisan dari walikota lama.

MINGGU

#CarFreeDay (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)
Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Car Free Day (CFD) bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Hingga saat ini, baru dua ruas jalan di Kota Bandung yang dijadikan lokasi CFD, yaitu Jl. Juanda (Dago) serta Jl. Buah Batu. CFD biasa dilaksanakan pada hari Minggu, mulai jam 06.00 hingga 10.00.

#SeninGratisDamri (RABU)
Setiap hari Senin, semua pelajar berseragam bisa menaiki Damri ke segala jurusan tanpa harus membayar ongkos. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meminimalisir jumlah pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. Dengan program ini, diharapkan ke depannya para pelajar bisa menjadikan bus damri sebagai alat transportasi sehari-hari.

#KamisInggris (JUMAT)
Hi you urang talking english lengguli! Thong he love nya!
Tiap hari Kamis, selama sehari penuh, warga Bandung diwajibkan berbicara menggunakan Bahasa Inggris. Tujuannya, agar warga Kota Bandung terbiasa berbicara Bahasa Inggris, sehingga siap menyambut perdagangan bebas Asia Tenggara (AFTA) pada 2015.

#BragaCulinaryNight (Coming Soon) (SABTU)
Braga Culinary Night yang nantinya akan diadakan setiap Sabtu malam bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan Braga yang dipenuhi bangunan bersejarah.

SENIN **#ReboNyunda** **KAMIS** **#JumatSepeda** **SABTU**

4. Faktor Penghambat Inovasi

Di bawah ini diuraikan enam faktor utama penghambat inovasi yang dikemukakan Ibrahim.

a. Estimasi tidak tepat terhadap inovasi

Hambatan yang disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam mempertimbangkan implementasi inovasi, kurang adanya kerjasama antarpelaksana inovasi, tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai, tidak jelas struktur pengambilan keputusan, komunikasi yang tidak lancar, serta adanya tekanan dari pemerintah untuk mempercepat hasil inovasi yang sangat singkat. Oleh karena itu, para pelaksana inovasi perlu benar-benar merencanakan dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi pada tempat yang menjadi sasaran inovasi.

b. Konflik dan Motivasi

Hambatan ini diakibatkan karena adanya masalah-masalah pribadi, seperti adanya pertentangan antaranggota tim, adanya rasa iri antara anggota yang satu dengan yang lain, ada anggota tim yang tidak semangat bekerja, pimpinan yang terlalu kaku dan berpandangan

sempit, kurang adanya penguatan atau imbalan terhadap anggota yang melaksanakan tugas dengan baik.

c. Inovasi Tidak Berkembang

Inovasi tidak berkembang karena hal-hal seperti lambatnya material yang diterima, alokasi dana yang tidak tepat, terjadi inflasi, atau pergantian pengurus yang terlalu cepat sehingga mengganggu kontinuitas tugas.

d. Masalah Keuangan

Termasuk dalam hambatan keuangan adalah tidak memadainya dana dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, kondisi perekonomian nasional, dan penundaan penyampaian dana. Oleh karena itu, dituntut kemampuan untuk mencari sumber-sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan inovasi.

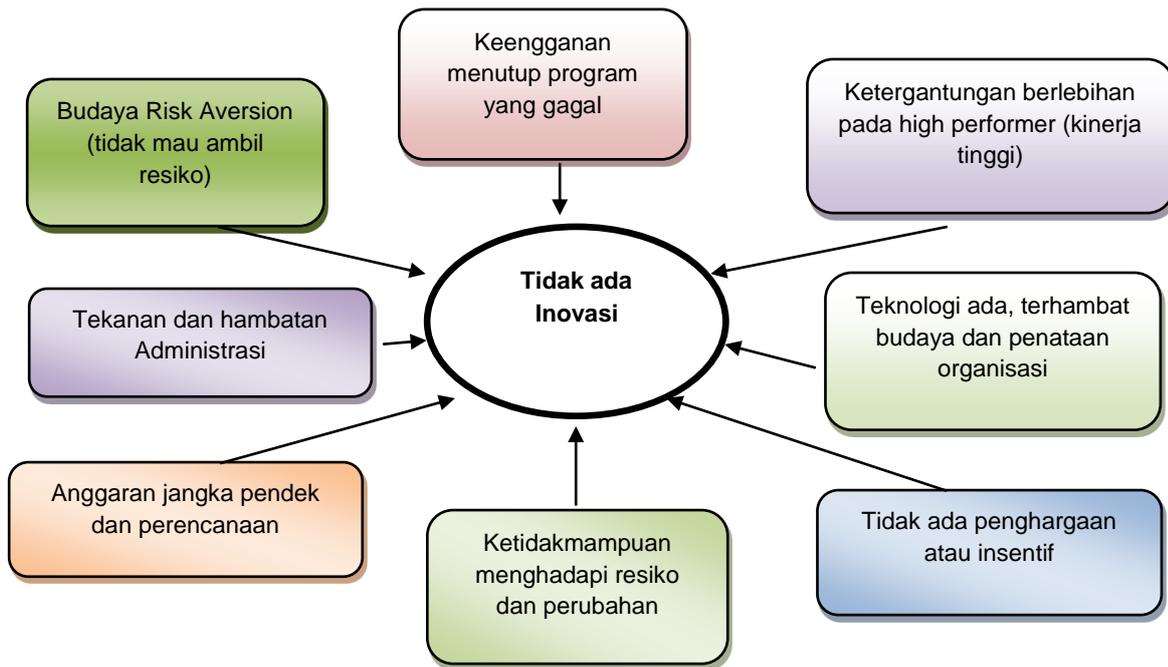
e. Penolakan Inovasi dari Kelompok Tertentu

Maksudnya di sini bukan penolakan karena kurang dana atau masalah personalia, tetapi penolakan masuknya inovasi karena beberapa faktor berikut, yaitu adanya pertentangan dalam memandang inovasi atau adanya kecurigaan masyarakat terhadap inovasi tersebut

f. Kurang Adanya Hubungan Sosial

Faktor terakhir ini terdiri atas dua hal, yaitu hubungan antar anggota kelompok pelaksana inovasi dan hubungan dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketidakharmonisan antaranggota proyek inovasi.

Menurut Albury (dalam Suwarno, 2008) Inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi. Banyak dari kasus inovasi yang justru terkendala oleh berbagai faktor. Biasanya budaya menjadi faktor penghambat terbesar dalam memperkenalkan sebuah inovasi.



Gambar 1. Hambatan Inovasi

Sumber: Albury (2003:31 dalam Suwarna, 2008)

BAB 03 DINAMIKA PROSES INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari materi pada modul ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hubungan negara dengan publik
2. Mendeskripsikan permasalahan-permasalahan publik
3. Mengidentifikasi kendala dalam pelayanan publik
4. Mendeskripsikan teknik inovasi pelayanan publik
5. Mendeskripsikan indeks inovasi pelayanan public

B. Uraian Materi

Dinamika proses inovasi pelayanan publik meliputi: (1) hubungan Negara dengan publik, (2) permasalahan-permasalahan publik, (3) kendala dalam pelayanan publik, (4) teknik inovasi pelayanan publik, dan (5) indeks inovasi pelayanan publik.

1. Hubungan Negara dengan publik

Negara adalah konsep abstrak yang dibentuk oleh masyarakat. Antara Negara dan masyarakat merupakan hubungan kontraktual. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ketertiban, dan keamanan. Dalam konsep *welfare state*, kontrak Negara terhadap masyarakat ini harus terpenuhi. Untuk itu, Negara berharap banyak kepada ASN untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

2. Permasalahan-Permasalahan Publik

Permasalahan publik itu sangat kompleks. Masyarakat mengharapkan pendapatan per kapita yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, juga tingkat pendidikan yang tinggi, termasuk tingkat keamanan dan ketertiban yang tinggi. Tetapi dalam banyak hal, Negara belum mampu memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, sehingga muncullah berbagai permasalahan publik, termasuk juga permasalahan dalam proses layanan publik.

3. Kendala dalam Pelayanan Publik

ASN memberikan pelayanan publik yang baik dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat maupun tidak langsung. Pelayanan public selalu bertujuan untuk meningkatkan *human development indeks*, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun dalam prakteknya, terdapat berbagai kendala dalam pemberian pelayanan public yang prima. Kendala meliputi factor teknis seperti keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan ASN. Juga faktor non teknis yang justru dapat menghambat pemberian pelayanan public yang prima.

4. Teknik Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi merupakan proses memikirkan dan mengimplementasikan kebaruan-kebaruan dalam pelayanan public untuk menghasilkan dampak yang lebih optimal. Secara teknis, inovasi pelayanan public memiliki cara tersendiri. Teknik berpikir kreatif merupakan alat yang handal untuk menghasilkan kebaruan-kebaruan dalam memberikan pelayanan public. Ada teknik yang berpikir yang berpikir template, yang langsung bisa dipakai. Namun ada juga teknik berpikir yang berangkat dari masalah kontekstual, kemudian dianalisis dengan menggunakan instrumen-instrumen manajemen seperti Analisis SWOT dll.

5. Indeks Inovasi Pelayanan Publik

Dalam konteks global, indeks inovasi di Indonesia masih rendah, termasuk inovasi di sector public. Jangankan di tingkat global, di tingkat Negara-negara ASEAN, Indonesia masih jauh dari Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Bahkan, dari negara yang baru merdeka Vietnam. Untuk itulah, maka ASN perlu merevolusi mentalnya. Dari ASN yang tidak inovatif menjadi ASN yang inovatif.

BAB 04 **KARAKTER PEMIMPIN INOVATIF DI SEKTOR PUBLIK**

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari materi pada modul ini peserta diharapkan dapat:

1. Menjelaskan karakter kepemimpinan inovatif di sektor publik
2. Mengidentifikasi praktek kepemimpinan pemimpin yang melayani
3. Mendeskripsikan prinsip-prinsip pelayanan public,
4. Mendeskripsikan azas penyelenggaraan pelayanan public,
5. Mengidentifikasi dimensi pelayanan dan pelayanan prima.

B. Uraian Materi

1. Karakter Pemimpin Inovatif di Sektor Publik

Secara teknis setiap inovasi pelayanan publik, paling tidak terdiri atas empat langkah utama, yaitu (1) menentukan esensi permasalahan pelayanan publik, merumuskan solusi, (2) merancang rencana aksi inovasi, (3) mengimplementasikan, dan (4) melembagakan inovasi tersebut. Dalam mengawal agar pelaksanaan setiap tahap dapat berhasil dengan baik, maka seorang pemimpin perlu memiliki karakter tertentu untuk memastikan bahwa staf dan stakeholder management selalu hadir. Jika bekerja sendirian, bukan pemimpin namanya. Berikut adalah karakter-karakter kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memimpin inovasi di sektor publik.

a. Semangat Belajar

Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia memiliki kapasitas belajar yang jauh lebih tinggi. Dengan Neocortex atau akal pikiran yang dimiliki, manusia memiliki kemampuan mencipta atau menemukan cara-cara baru, produk-produk baru, bahkan konsep dan paradig baru.

Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh merasa ilmunya sudah penuh, sehingga tidak mau lagi menerima masukan dan kritikan dari

bawahan dan stakeholder lainnya. Pemimpin perlu bersifat terbuka, dan selalu memiliki semangat belajar yang tinggi. Dia tidak merasa rendah jika harus menerima pengetahuan sekalipun pengetahuan tersebut dari bawahan.

b. Satu Gelombang

Setiap kali akan melakukan tindakan, seorang pemimpin perlu memastikan bahwa sebelum tindakan tersebut diambil, pemimpin dan seluruh bawahannya serta stakeholdernya sudah satu persepsi, satu pemahaman, satu gelombang atas permasalahan yang dihadapi. Untuk mencapai persamaan persepsi ini, seorang pemimpin perlu terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Kegiatan sosialisasi perlu dikelola dengan baik agar kesamaan gelombang yang menjadi tujuan sosialisasi tersebut dapat terwujud.

c. Merakyat

Berinovasi di sector publik merupakan tindakan bersama, bukan tindakan perseorangan. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu meluangkan waktu lebih banyak bersama dengan bawahan dan stakeholder lainnya di lapangan. Pemimpin tidak menghabiskan waktu di belakang meja dan menerima laporan saja dari bawahan. Kehadiran pemimpin di lapangan juga dapat membantu proses belajarnya. Di lapangan, ketika bersama-sama dengan bawahan dan stakeholder lainnya melakukan “blusukan”, maka pemimpin tersebut dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih otentik, disbanding jika hanya menunggu laporan dari bawahan.

d. Teladan

Esensi kepemimpinan adalah mempengaruhi dan kemudian menggerakkan atau memobilisasi bawahan dan stakeholder, sehingga mereka dapat menjadi *follower* atau pengikut yang efektif. Sebagai manusia mereka tergerak menjadi follower karena dua hal. Pertama karena faktor eksternal dari dirinya, misalnya ada peraturan terutama sanksi atau reward yang akan diterima jika tidak patuh atau patuh terhadap pimpinannya. Kedua adalah faktor internal, atau dorongan motivasi untuk menjadi follower yang baik karena melihat adanya sifat-sifat baik dari seorang pemimpin.

Untuk membangkitkan factor internal ini, maka pemimpin dituntut untuk membangun keteladanan. Keteladanan seyogyanya dibangun sedini mungkin sehingga dalam diri pemimpin sudah terbangun sifat-sifat unggul sehingga mampu menunjukkan sikap keteladanan, seperti integritas, disiplin, dan peduli.

2. **Praktek Kepemimpinan Pemimpin Yang Melayani**

Menurut Spears (2003) ada 10 ciri dari seorang *servant leader* (pemimpin yang melayani), yaitu:

a. **Mendengar (*listening*)**

Servant leader memiliki komitmen untuk mendengar pendapat dan ucapan orang lain dan dia mendengar sepenuh hati apa yang dikatakan (hal ini juga tersirat dalam ucapannya)

b. **Empati (*emphaty*)**

Servant leader akan memperlakukan orang lain dengan ikhlas dan sepenuh hati serta menerima keadaan orang seperti apa adanya dengan keunikan dan kekhususannya.

c. **Meringankan beban mental (*healing*)**

Servant leader menyadari bahwa dia bisa membuat orang lain bahagia dan melakukan hal tersebut serta mau menolong *followernya* (pengikutnya) yang mengalami penderitaan secara emosional dan factor-faktor lain yang mengganggu dalam pencapaian tujuan.

d. **Kesadaran (*awareness*)**

Adanya kesadaran diri untuk memahami situasi dan kondisi orang lain dan memperlakukan orang lain dengan etikal, menghargai kekuatan orang lain dan tata nilai yang dimilikinya.

e. **Persuasi (*persuasive*)**

Servent leader berusaha meyakinkan orang lain, tanpa memaksa orang lain untuk patuh pada dirinya.

f. **Konseptualisasi (*conceptualization*)**

Memiliki impian dan cita-cita besar melebihi kenyataan yang terlihat sehari-hari dengan membuat arahan untuk bawahan secara tertulis, membimbing (menjadi mentor), dan mengajak bawahan bersama-sama untuk mencapai visi dan misi organisasi.

g. Pemahaman akan masa depan (*foresight*)

Seorang pemimpin harus mampu meninjau ke depan akan kemungkinan keberhasilan yang ingin dicapai berdasarkan pengalaman masa lalu, kenyataan sekarang, lalu mengambil keputusan untuk masa yang akan datang.

h. Pengayoman (*stewardship*)

Pemimpin yang memiliki rasa percaya pada orang lain, bahwa orang lain bisa berbuat dan berniat baik, serta memiliki komitmen untuk melayani kebutuhan orang lain dengan prinsip keterbukaan.

i. Komitmen dalam mengembangka follower (*commitment to the growth of the follower*)

Seorang *servent leader* akan berkomitmen untuk mengembangkan pribadi *followernya* untuk berkembang secara professional karena percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi.

j. Membangun komunitas (*building community*)

Servent leader memiliki cara pandang untuk membangun komunitas untuk pada kehidupan manusia dan lingkungannya.

3. Prinsip Pelayanan Publik

Perwujudan dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. (Pasal 1 Ayat 2 UU No. 25 2009).

Mengimplementasikan pelayanan publik yang berpedoman pada isi Keputusan Menteri Pemberdayaan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, maka prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut.

a. Kesederhanaan

Tata cara atau prosedur pelayanan, dilaksanakan semudah mungkin, lancar, dan tidak berbelit-belit.

b. Kejelasan dan Keterbukaan

- 1) Menginformasikan secara terbuka prosedur dan tata cara pemberian pelayanan agar mudah diketahui masyarakat.
- 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- 3) Rincian dan biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

c. Ketepatan Waktu

Pelaksanaan pelayanan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah;

e. Keamanan

Memberikan rasa aman dan nyaman serta menjamin adanya kepastian hukum, selama proses layanan berlangsung;

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

h. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana isi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

- a. kepentingan umum; artinya azas pelayanan harus mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi maupun golongan
- b. kepastian hukum; artinya dalam pelayanan administrasi, jasa maupun bentuk lainnya harus berazaskan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kesamaan hak; artinya dalam melakukan pelayanan semua warga negara berhak memperoleh pelayanan publik, tidak boleh membedakan suku, ras, agama maupun golongan atau sosial.
- d. keseimbangan hak dan kewajiban; artinya semua warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, harus juga memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.
- e. keprofesionalan; artinya pelayanan yang diberikan harus berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dimiliki oleh pelayan.

- f. partisipatif; pelayanan yang disediakan oleh pemerintah harus memberdayakan masyarakat yang dilayani, akses pelayanan dapat diterima oleh pelanggan melalui fasilitas yang tersedia dan menuntut partisipasi masyarakat.
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; artinya dalam melakukan pelayanan hendaknya memperlakukan pelanggan dengan adil, tidak diskriminatif atau membeda-bedakan servis pelayanan.
- h. keterbukaan; artinya pelanggan dapat memperoleh informasi terbuka mengenai bentuk, syarat dan ketentuan lain dalam pemenuhan hak layanan yang dibutuhkan.
- i. akuntabilitas; artinya pelayanan dan layanan yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (akuntabel)
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; artinya pemerintah harus menyediakan fasilitas khusus bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus
- k. ketepatan waktu; artinya pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan waktu yang telah ditetapkan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; artinya pelayanan yang disediakan oleh pemerintah hendaknya dapat diakses dengan cepat, mudah dan terjangkau.

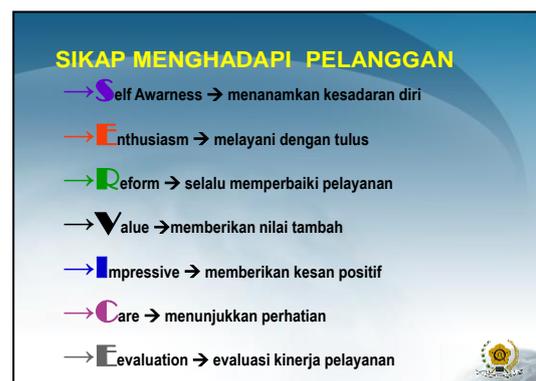
5. Dimensi Pelayanan dan Pelayanan Prima

Dengan prinsip dan karakteristik pelayanan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan terkait dengan standar pelayanan yaitu :

- a. Dimensi waktu agar masyarakat mengetahui bahkan menginginkan ketegasan berapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu urusan atau memperoleh hasil pekerjaan. Pelayanan harus SMART agar dapat memuaskan pelanggan. SMART suatu akronim untuk mudah diingat dan dilakukan.
 - 1) *Spesifik*, bentuk jasa dan layanan apa yang diharapkan oleh pelanggan dari Anda, Apakah memerlukan jasa layanan yang terkait dengan wewenang Anda, atasan Anda atau orang lain selain Anda?

- 2) *Measureable* Apakah Anda dapat menyelesaikan atau memenuhi permintaan pelanggan, dapatkah Anda menentukan kriteria dan batasan untuk pemenuhan permintaan pelanggan Anda?
 - 3) *Achieveable*, bagaimana agar keinginan pelanggan dapat tercapai, apakah sesuai dengan standard yang telah ditentukan oleh unit kerja Anda?
 - 4) *Relevant*, Sudahkan upaya yang dilakukan relevan dengan kebijakan yang ada?
 - 5) *Timebound*, penyelesaian masalah dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu, bahkan kalau ada kemungkin Anda dapat menyelesaikan pelayanan tersebut kurang dari waktu yang diharapkan?
- b. Dimensi biaya, keterbukaan/transparansi mengenai besarnya biaya yang diperlukan untuk setiap jenis urusan. Masih terjadi bahkan lebih sering terjadi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat lebih besar dari biaya standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Dimensi kualitas pelayanan bermutu, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan oleh pelayan yaitu :
- 1) kualitas teknis yang berhubungan dengan *outcomes* pelayanan,
 - 2) kualitas fungsional yang berhubungan dengan proses pemberian layanan kepada pelanggan
 - 3) reputasi penyedia layanan pelanggan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Dimensi moral yakni pelayanan yang dilakukan dengan tulus, tidak memilah-milah prioritas layanan karena azas kepentingan pribadi.

Berikut ini ditampilkan beberapa hal berkaitan dengan Pelayanan Prima dan Pribadi Yang Prima serta Sikap Menghadapi Pelanggan



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lembaga Administrasi Negara. 2016. *Bahan ajar Pelatihan Revolusi Mental Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara*
- Franz Magnis-Suseno. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- H.A.S.Munir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Jogjakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Kemendikbud.2012. *Etika Organisasi Pemerintah.Modul Diklat Prajabatan Golongan 3*. Jakarta: Pusbangtendik
- Kemendikbud.2012. *Pelayanan Prima, Modul Diklat Prajabatan Golongan 3*. Jakarta: Pusbangtendik
- Lembaga Administrasi Negara RI. 2009. *Etiket Pelayanan Publik. Modul Pilot Project Diklat Prajabatan Golongan III (Student's Book)*
- Permenpan dan RB No.53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance* dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

MODUL 03

MEMBANGUN BUDAYA KERJA PELAYANAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB 01

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan grand design reformasi birokrasi dan gerakan revolusi mental, perhatian terhadap kinerja pelayanan publik perlu mendapat prioritas utama dari pemerintah karena hal ini selalu menjadi sorotan masyarakat dewasa ini. Harapan nasyarakat adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) dapat melaksanakan pelayanan publik secara optimal sekaligus menepis citra negatif tentang birokrasi pemerintahan.

Semakin baik kualitas pelayanan publik, maka akan semakin baik dan kuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah harus dapat menciptakan kondisi keseimbangan antara tuntutan masyarakat dengan kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut agar terwujud kinerja pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini akan dapat dicapai jika seluruh pegawai ASN mampu menunjukkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya kerja dalam sikap dan perilaku sebagaimana diharapkan. Dengan demikian pemahaman terhadap budaya kerja yang kuat merupakan salah satu unsur yang dapat membantu pegawai ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu diperlukan upaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja pelayanan publik yang berkualitas .

Modul ini disusun dan dipersiapkan sebagai bagian dari modul pelatihan revolusi mental yang diselenggarakan bagi pegawai ASN dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai Kemdikbud. Diharapkan dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja yang

beririsan dengan konsep gerakan revolusi mental, pegawai ASN dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan pelayanan publik secara lebih baik dan lebih berkualitas.

B. Deskripsi Singkat

Modul membangun budaya kerja pelayanan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan langkah-langkah membangun budaya kerja yang beririsan dengan konsep gerakan revolusi mental bagi pegawai ASN dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Modul ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama memuat tentang konsep budaya kerja yang meliputi makna, tujuan, manfaat, fungsi, prinsip, dan nilai-nilai budaya kerja, sedangkan bagian kedua memuat tentang pengembangan budaya kerja yang meliputi nilai-nilai revolusi mental, nilai-nilai dasar ASN, pengembangan budaya kerja, membangun integritas, membangun etos kerja dan membangun budaya gotong royong. Modul ini juga dilengkapi dengan tugas-tugas dan latihan untuk membantu peserta dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian, tujuan, Prinsip, Manfaat, fungsi, dan nilai-nilai budaya kerja.
2. Menyusun langkah-langkah membangun nilai-nilai revolusi mental (Integritas, etos kerja, dan gotong royong) yang beririsan dengan nilai-nilai dasar ASN dalam rangka membangun budaya kerja.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep Budaya Kerja
 - a. Mengapa budaya kerja diperlukan
 - b. Makna budaya
 - c. Makna kerja

- d. Makna budaya kerja
 - e. Prinsip budaya kerja
 - f. Aktualisasi budaya kerja
 - g. Manfaat budaya kerja
 - h. Nilai-nilai budaya kerja
 - i. Nilai dasar dan kode etik ASN
2. Membangun budaya kerja
- a. Nilai-nilai revolusi mental
 - b. Nilai-nilai dasar ASN
 - c. Pengembangan budaya kerja
 - d. Membangun budaya kerja berbasis nilai-nilai revolusi mental

BAB 02

KONSEP BUDAYA KERJA

A. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pelatihan peserta diharapkan dapat menjelaskan makna, tujuan, Prinsip, Manfaat, fungsi, dan nilai-nilai budaya kerja.

B. Uraian Materi

1. Mengapa Budaya Kerja Diperlukan?

Sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010 – 2025 Diperlukan sosok aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan tugas secara *profesional* yaitu adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN, mapu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara dengan dilandasi *kaidah, nilai dan norma* dalam rangka terciptanya *etika kerja* yang penuh tanggung jawab, sebagai suatu *budaya kerja aparatur*.

2. Makna Budaya

Budaya adalah merupakan pola nilai, sikap tingkah laku (termasuk bahasa), hasil karsa dan karya (termasuk segala instrumennya, sistem kerja, dan teknologi);

Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna & pandangan hidup, yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku;

Budaya merupakan hasil dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan serta proses seleksi (menerima atau menolak) norma-norma yang ada dalam cara dirinya berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya di tengah-tengah lingkungan tertentu;

Dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan (interdependensi), baik sosial maupun lingkungan non-sosial.

3. Makna Kerja

Kerja dan bekerja dapat dimaknai secara berbeda oleh setiap orang, termasuk oleh seorang aparatur sipil negara. Kerja dapat dimaknai sebagai:

- a. Hukuman
- b. Beban
- c. Kewajiban
- d. Sumber penghasilan
- e. Kesenangan
- f. Gengsi, prestise
- g. Aktualisasi diri
- h. Panggilan jiwa
- i. Pengabdian dengan tulus, tanpa pamrih
- j. Hidup
- k. Ibadah
- l. Hakekat kerja merupakan bentuk atau cara manusia untuk memanusiakan dirinya.
- m. Bekerja merupakan bentuk aktual dari nilai-nilai, keyakinan yg dianutnya & dapat menjadi motivasi utk melahirkan karya dan kinerja (*performance*) (toto asmara, 2001)

Jansen Sinamo mengemukakan 8 etos kerja profesional untuk memaknai kerja yaitu:

- a. Kerja adalah Rahmat; Ikhlas dan Bersyukur
- b. Kerja adalah Amanah; Benar dan Bertanggung Jawab
- c. Kerja adalah Panggilan; Tuntas dan Berintegritas
- d. Kerja adalah Aktualisasi; Antusias dan Bekerja Keras
- e. Kerja adalah Ibadah; Serius dan Berdedikasi
- f. Kerja adalah Seni; Kreatif dan Berinovasi
- g. Kerja adalah Kehormatan; Tekun dan Berkualitas

h. Kerja adalah Pelayanan; Paripurna dan Berkesantunan

4. Makna Budaya Kerja

Budaya kerja dapat dipahami dan dimaknai sebagai berikut:

- a. Budaya kerja adalah falsafah yg didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yg menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam suatu kelompok masyarakat/organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, & tindakan sebagai wujud dari kerja. Warna Budaya Kerja berupa produktivitas, yang tercermin dalam perilaku kerja (kerja keras, ulet, disiplin, tanggung jawab, dll)
- b. Budaya kerja merupakan pola tingkah laku dan nilai-nilai yang disepakati karyawan dalam bekerja.
- c. Budaya kerja berarti cara pandang atau cara seseorang memberikan makna terhadap “kerja”.
- d. Budaya kerja adalah salah satu komponen kualitas manusia yang sangat melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolok ukur dasar dalam pembangunan.
- e. Budaya kerja merupakan instrumen untuk merubah cara kerja lama menjadi cara kerja baru yang akan berorientasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat.
- f. Berdasarkan Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan budaya kerja, budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap kerja yaitu sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan Permenpan nomor 39 tahun 2012, pendekatan yang digunakan untuk merubah budaya kerja adalah dengan pendekatan melalui manajemen perubahan
- g. Budaya kerja juga dapat dipahami sebagai sebuah keterkaitan unsur-unsur penting dalam organisasi yang dijalankan oleh para pegawai Budaya kerja berkaitan erat dengan perilaku dalam menyelesaikan

pekerjaan. Perilaku ini merupakan cerminan dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu.

5. Budaya Kerja Menurut Pandangan Agama

a. Hindu

Hana pwa tumung dadi wang wimukha ring dharma sadhana (Bila ada yang beroleh kesempatan menjadi manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, rakus akan harta benda, memuaskan nafsu secara berlebih-lebihan, serta menyimpang dari hukum kebaikan dan kejujuran (dharma), mereka itu yang disebut kesasar hidupnya serta sangat berbahaya.)

b. Budha - Konghucu

Kuil tri darma bumi raya singkawang:

- 1) Samma Ajiva (mata pencaharian yang benar)
- 2) Samma Vayama (usaha yg benar)
- 3) Samma Sati (kesadaran yg benar)
- 4) Samma Samadhi (konsentrasi yg benar)
- 5) Samma Kamananta (perbuatan yg benar)
- 6) Samma Vaca (ucapan yg benar)
- 7) Samma Sankappa (pikiran yg benar)
- 8) Samma Ditthi (pandangan yg benar)

c. Kristen

- 1) Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia (*Kolose 3 : 23*)
- 2) Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunkan waktu yang ada (*Kolose 4: 5*)
- 3) Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang (*Kolose 4: 6*)

d. Islam

- 1) Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka (*Ar-Ra'd: 11*)
- 2) Dan tidak ada bagi manusia itu, melainkan apa yang telah ia usahakan (*An-Najm: 39*)
- 3) Seseorang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah beruntung, jika hari ini sama dengan kemarin maka ia orang yang merugi, dan jika hari ini lebih jelek dari kemarin maka ia dilaknat (*Hadits Nabi*)
- 4) Barang siapa yang hikmahnya / orientasinya pada perut, maka hasilnya sama dengan yang keluar dari perut (*Ali bin Abi Tholib*)

6. Tujuan Budaya Kerja

Budaya kerja aparatur bertujuan untuk:

- a. Mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur untuk meningkatkan kinerja (*orientasi Hasil/outcome*) melalui produktivitas dan kinerja yang tinggi
- b. Membangun SDM seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam hubungan sifat, peran dan komunikasi yang saling bergantung satu sama lain (Permenpan-rb Nomor 39 tahun 2012)

7. Prinsip Budaya Kerja

- a. Budaya Kerja diturunkan dari Budaya organisasi (Budaya organisasi adalah Sistem nilai bersama untuk mencapai tujuan dan cita-cita organisasi yang dikembangkan dari Norma, nilai, keyakinan, dan harapan bersama)
- b. Budaya Kerja merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai organisasi yang diekspresikan dalam perilaku kerja sehari-hari
- c. Budaya kerja merupakan sikap mental yang dikembangkan untuk selalu mencari perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan terhadap apa yang telah dicapai

- d. Budaya kerja dikembangkan antara lain dengan mempertimbangkan ajaran-ajaran agama, konstitusi/peraturan perundang-undangan, kondisi sosial dan budaya
- e. Perubahan budaya kerja harus berjalan secara terencana, terstruktur, komprehensif dan berkelanjutan
- f. Budaya kerja ditanamkan atau diubah melalui perubahan nilai-nilai organisasi

8. Prinsip Penerapan Budaya Kerja

- a. Inisiatif
- b. Kepercayaan
- c. Kesenangan
- d. Individualitas
- e. Kesetaraan
- f. Dialog
- g. Hubungan Kerja
- h. Pilihan Tempat Kerja

9. Fungsi Budaya Kerja

- a. Sebagai tapal batas/pembeda organisasi yang satu dgn organisasi yg lain
- b. Sebagai identitas bagi anggota organisasi
- c. Memudahkan timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan pribadi
- d. Memantapkan sistem kerja dan sistem sosial dalam organisasi
- e. Sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku pegawai

10. Aktualisasi budaya kerja:

- a. Pemahaman terhadap makna bekerja;
- b. Sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan;
- c. Sikap terhadap lingkungan pekerjaan;
- d. Sikap terhadap waktu;
- e. Sikap terhadap alat yang digunakan untuk bekerja;

- f. Etos kerja
- g. Perilaku ketika bekerja atau mengambil keputusan.

11. Manfaat Budaya Kerja

- a. Meningkatkan Kerjasama antar individu, kelompok, unit;
- b. Meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerjasama;
- c. Mengefektifkan intergritas, sinkronisasi, keselarasan, dan dinamika dalam organisasi;
- d. Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
- e. Menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
- f. Mengeliminasi hambatan psikologis dan kultural; dan
- g. Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan
- h. Mendorong Kreativitas Pegawai

12. Nilai-Nilai Budaya Kerja

Nilai-nilai budaya Berdasarkan Keputusan Menpan nomor 25/Kep/M.Pan/4/2002 adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen dan konsistensi;
 - Memegang teguh sepenuh hati dan berjanji melaksanakan tugas secara taat asas.
 - Memegang teguh amanat konstitusi
- b. Wewenang dan tanggung jawab;

Seorang aparat dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan posisi jabatannya. Jelas dan tegas, ada kepastian dan perlindungan hukum bagi aparatur dalam menjalankan tugas
- c. Kejujuran dan keikhlasan;

Kemampuan memotivasi orang lain untuk mencapai sasaran. Tingkah laku yang dijadikan kerangka acuan

Aparatur negara yang jujur dan bersih (dan ikhlas) menjadi kunci bagi tumbuhnya rasa hormat dan kepercayaan masyarakat.

- d. Profesionalisme dan integritas;
Integritas berarti orang yang tidak diragukan lagi, satu kata dan perbuatan. *Profesionalisme* berarti mutu & kemampuan kerja yang tinggi.
Memiliki karakter / integritas serta mutu keahlian yang tinggi di bidang pekerjaannya.
- e. Kreativitas dan kepekaan;
Kreativitas berarti punya gagasan baru yang lebih baik. *Kepekaan* berarti peka terhadap peluang dan perkembangan lingkungan organisasi.
Lingkungan kerja mendorong kreativitas dan peka terhadap Keluhan masyarakat.
- f. Kepemimpinan dan keteladanan;
 - Kemampuan memotivasi orang lain untuk mencapai sasaran dan tingkah laku dijadikan sebagai kerangka acuan
 - Pemimpin mengenal visi dan misi organisasi dengan baik, dan dapat menjadi dan memberi contoh.
- g. Kebersamaan dan dinamika kelompok;
Kepentingan pribadi diselaraskan dengan kepentingan kelompok. Bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, Setiap pegawai menyadari bahwa ia merupakan mata rantai dari teman sekerja yang lain.
- h. Ketepatan dan kecepatan;
Pelayanan diberikan tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat anggaran, tepat prosedur, dan tepat waktu.
Mutu, jumlah, dan waktu pelayanan hendaknya memberikan kepuasan pada masyarakat.
- i. Kecerdasan emosi & rasionalitas;
Keputusan berdasarkan fakta dan alur logika dan ilmu yang benar, bukan emosi atau keinginan semata.
Keputusan didasarkan fakta dan alur logika dan ilmu yang lurus, bukan atas dasar suka dan tidak suka, atau emosi

- j. Ketegasan dan keteguhan;
- *Keteguhan* berarti kuat, tidak mudah berubah dalam memegang prinsip. Dan tidak ragu-ragu.
 - Teguh dalam memegang prinsip, tetapi tetap luwes; tegas dalam mengoreksi kesalahan
- k. Disiplin & keteraturan kerja;
- Disiplin berarti taat aturan, Teratur, sistematis dalam langkah (rencana, pelaksanaan, penilaian, perbaikan rencana).
 - Menjalankan tugas dengan disiplin dan teratur sesuai aturan yang berlaku
- l. Keberanian dan kearifan;
- Berani menanggung resiko dalam pembuatan keputusan yang tepat waktu. Keputusan didasarkan pada nilai-nilai.
 - Berani menanggung resiko kegagalan, dengan memberikan wewenang dalam mengambil resiko.
- m. Dedikasi dan loyalitas;
- Sifat rela berkorban demi pengabdian kepada instansi, bangsa dan negara. Dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap tugas, bukan pada atasan demi kepentingan pribadi.
- n. Semangat dan motivasi kerja;
- Daya juang yang mendorong perilaku sampai pada tingkat tertinggi.
 - Aparat bersemangat tinggi utk memulihkan kepercayaan dan diarahkan pada tujuan individu dan organisasi.
- o. Ketekunan dan kesabaran;
- Ketekunan berarti teliti, rajin, berkelanjutan. Kesabaran berarti tidak emosional, tidak putus asa dalam mencapai sasaran
 - Aparat memiliki sifat pejuang, memiliki semangat pelayanan prima, tidak mengeluh terus.
- p. Keadilan dan keterbukaan;
- Memperlakukan orang lain sesuai fungsi, hak dan kewajiban masyarakat, tidak melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi
Aparat memiliki sifat pejuang, memiliki semangat pelayanan prima, tidak mengeluh terus.

- q. Penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi.
- Pelaksanaan pekerjaan dilakukan atas dasar ilmu yang baku (ilmu administrasi, hukum, dll). Mengerjakannya dengan alat yang tepat guna (komputer, internet, dll).
 - Mengikuti era globalisasi informasi, perlu penguasaan IPTEK oleh seluruh aparatur

13. Nilai Dasar dan Kode Etik ASN

Sebagai landasan dalam melaksanakan budaya kerja aparatur sipil negara telah diterbitkan dan diberlakukan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN menurut UU nomor 5 tahun 2014 Pasal 2 adalah berdasarkan pada asas-asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Profesionalitas
- c. Proporsionalitas
- d. Keterpaduan
- e. Delegasi
- f. Netralitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektif dan efisiensi
- i. Keterbukaan
- j. Nondiskriminatif
- k. Persatuan dan kesatuan
- l. Keadilan dan kesetaraan
- m. Kesejahteraan

Selanjutnya pada pasal 4 diatur tentang nilai dasar yang harus menjadi acuan dan pedoman sikap serta perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat ASN yang meliputi:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila
- b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier

Sejalan dengan itu pada pasal 5 Undang-Undang ASN ditetapkan kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan

- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
- g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

C. Latihan

1. Kelas dibagi dalam 5 kelompok
2. Setiap kelompok mendiskusikan strategi implementasi nilai-nilai budaya kerja berdasarkan keputusan menpan nomor 25/Kep/M.Pan/4/2002
3. Setiap kelompok memilih 3 atau 4 nilai budaya kerja
4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok

D. Rangkuman

1. Diperlukan sosok aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan tugas secara *profesional* yaitu adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas KKN, mapu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara dengan dilandasi *kaidah, nilai dan norma* dalam rangka terciptanya *etika kerja* yang penuh tanggung jawab, sebagai suatu budaya *kerja aparatur*.
2. budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap kerja yaitu sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini

kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

3. Budaya kerja aparatur bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur untuk meningkatkan kinerja (*orientasi Hasil/outcome*) melalui produktivitas dan kinerja yang tinggi serta membangun SDM seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam hubungan sifat, peran dan komunikasi yang saling bergantung satu sama lain.
4. Budaya Kerja merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai organisasi yang diekspresikan dalam perilaku kerja sehari-hari, dan merupakan sikap mental yang dikembangkan untuk selalu mencari perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan terhadap apa yang telah dicapai serta dikembangkan antara lain dengan mempertimbangkan ajaran-ajaran agama, konstitusi/peraturan perundang-undangan, kondisi sosial dan budaya.
5. Nilai-nilai dasar budaya kerja yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas adalah : komitmen dan konsistensi, wewenang & tanggung jawab, kejujuran dan keikhlasan, profesionalisme dan integritas, kreativitas dan kepekaan, kepemimpinan dan keteladan, kebersamaan & dinamika kelompok, ketepatan dan kecepatan, kecerdasan emosi & rasionalitas, ketegasan dan keteguhan, disiplin & keteraturan kerja, keberanian dan kearifan, dedikasi dan loyalitas, semangat dan motivasi kerja, ketekunan dan kesabaran, keadilan dan keterbukaan, penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi.

EVALUASI

1. Pembuatan keputusan berdasarkan fakta dan alur logika dan ilmu yang benar dan lurus, serta bukan atas dasar suka dan tidak suka, atau emosi adalah merupakan nilai-nilai dasar budaya kerja dari.....
2. Jelaskan pengertian budaya kerja menurut Peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 39 tahun 2012.

3. Jelaskan budaya kerja aparatur berdasarkan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010 – 2025.
4. Salah satu prinsip budaya kerja adalah bahwa Budaya kerja merupakan sikap mental yang dikembangkan untuk selalu mencari perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan terhadap apa yang telah dicapai. Jelaskan makna prinsip tersebut.

UMPAN BALIK

1. Menurut pengamatan saudara sejauhmana aktualisasi nilai-nilai budaya kerja di unit kerja saudara pada saat ini berdasarkan Keputusan Menpan nomor 25/Kep/M.Pan/4/2002?
2. Budaya kerja berarti cara pandang atau cara seseorang memberikan makna terhadap “kerja”. Berdasarkan hal ini bagaimana saudara memberi makna terhadap pekerjaan saudara sebagai aparatur sipil negara (sesuai dengan jabatan/tugas saudara saat ini)? Jelaskan secara rinci.
3. Salah satu kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 adalah “Pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas”. Jelaskan bagaimana saudara mengaktualisasi kode etik dan kode perilaku ini di unit kerja saudara

BAB 03 | PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA ASN

A. Indikator Keberhasilan

1. Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan memahami dan mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja yang bersumber dari nilai-nilai dasar ASN dan nilai-nilai revolusi mental
2. Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu membangun dan menyusun langkah-langkah pengembangan dan penerapan nilai-nilai revolusi mental (Integritas, etos kerja, dan gotong royong) dalam rangka membangun budaya kerja di lembaga pemerintahan.

B. Uraian Materi

1. Nilai-Nilai Revolusi Mental

Revolusi Mental merupakan sebuah gerakan membangun karakter bangsa yang mengubah cara pikir menjadi lebih baik, mandiri, berkarakter dan nasionalis. Dalam gagasannya, Presiden Joko Widodo menegaskan Revolusi Mental sebagai gerakan yang menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building*. Gerakan ini disebut lebih manusiawi, sesuai dengan budaya nusantara, yaitu bersahaja dan berkesinambungan. Hal ini untuk memenuhi amanah konstitusi agar setiap rakyat Indonesia dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Ada tiga nilai dalam gerakan Revolusi Mental, yaitu:

- a) Integritas (jujur, dipercaya, berkarakter dan bertanggungjawab)
- b) Kerja keras (etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif)
- c) Gotong royong (kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi pada kemaslahatan)

Strategi internalisasi ketiga nilai ini diterapkan melalui jalur birokrasi, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, sektor swasta, hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Sektor pendidikan misalnya, bagaimana pemerintah akan terus memperkuat kurikulum untuk membangun integritas, membentuk etos kerja, dan semangat gotong royong. Pemerintah juga mencanangkan penumbuhan budi pekerti luhur melalui serangkaian kegiatan harian yang secara periodik wajib dilakukan oleh seluruh siswa dan warga sekolah. Beberapa kegiatan yang akan dibudayakan dalam keseharian seluruh warga sekolah adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap akan memulai pembelajaran, membaca doa secara bersama-sama setiap akan memulai dan mengakhiri pembelajaran, dan dalam periode tertentu rutin melibatkan siswa dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah nyata di lingkungan tersebut. Program ini dilakukan sebagai upaya membudayakan nilai-nilai dan karakter positif di dalam diri, karena perubahan masyarakat memang dimulai dari diri sendiri. Revolusi Mental adalah tanggung jawab masing-masing namun melihatnya sebagai bangsa.

Pada lingkungan birokrasi, aktualisasi nilai-nilai revolusi mental harus menjadi budaya kerja dalam melakukan pelayanan publik sehingga perlu dilakukan proses internalisasi secara terus-menerus kepada setiap pegawai ASN.

2. Nilai-nilai dasar ASN Sebagai Landasan Membangun Budaya Kerja

Nilai-nilai Aneka (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) adalah merupakan landasan dan pedoman bagi ASN untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga nilai ini jugalah yang harus diadopsi dan diaktualisasi sebagai budaya kerja pegawai ASN.

Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens,

2007), yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horisontal (pertanggungjawaban pada masyarakat luas). Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui Perencanaan Strategis, Kontrak Kinerja, dan Laporan Kinerja.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kepemimpinan: Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya.
- 2) Transparansi: Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi.
- 3) Integritas: adalah adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- 4) Tanggung Jawab: adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
- 5) Keadilan: adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal baik terhadap orang maupun barang.
- 6) Kepercayaan: Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas.

- 7) Keseimbangan: Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas
- 8) Kejelasan: Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.
- 9) Konsistensi: adalah sebuah usaha untuk terus melakukan sesuatu sampai tercapainya tujuan akhir.

b. Nasionalisme

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN., terutama kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya . Dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Pegawai ASN harus memahami bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Nasionalisme berarti pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan sesuai dengan sila yang terdapat dalam Pancasila, yaitu:

1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan YME menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan masyarakat dan berpolitik. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka (inklusif), membebaskan dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan.

Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan

etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.

2) Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua memiliki konsekuensi ke dalam dan ke luar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Semangat kebangsaan adalah mengakui manusia dalam keragaman dan terbagi dalam golongan-golongan. Keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena memiliki satu nyawa, satu asal akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya, yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata.

Selain kehendak hidup bersama, keberasaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah, Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia.

Tujuan nasionalisme yang mau didasari dari semangat gotong royong yaitu ke dalam dan ke luar. Ke dalam berarti kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegasikan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Ke luar berarti memuliakan

kemanusiaan universal, dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian dan keadilan antar umat manusia.

4) Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi permusyawaratan mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama, badan permusyawaratan/perwakilan bisa menjadi ajang memperjuangkan aspirasi beragam golongan yang ada di masyarakat. Fungsi kedua, semangat permusyawaratan bisa menguatkan negara persatuan, bukan negara untuk satu golongan atau perorangan. Permusyawaratan dengan landasan kekeluargaan dan hikmat kebijaksanaan diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan bagi semua pihak.

Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ada tiga prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis, yaitu : (1) kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah; (2) kekuasaan itu harus dibatasi; dan (3) pemerintah harus berdaulat, artinya harus cukup kuat untuk dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Secara garis besar, terdapat dua model demokrasi, yaitu : majoritarian democracy (demokrasi yang lebih mengutamakan suara mayoritas) dan consensus democracy (demokrasi yang mengutamakan konsensus atau musyawarah). Oleh karena itu, pilihan demokrasi konsensus berupa demokrasi permusyawaratan merupakan pilihan yang bisa membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

5) Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa Negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperative etis dari amanat Pancasila dan UUD 1945.

Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, antara lain :
a) perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan; b) pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; c) proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan; dan d) dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

c. Etika Publik

Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut (Catalano,1991).

Konsep etika sering disamakan dengan moral. Padahal ada perbedaan antara keduanya. Etika lebih dipahami sebagai refleksi yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Etika juga dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur.

Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis.

Bagi aparatur sipil negara budaya etika yang harus dipahami, diinternalisasi dan diaktualisasi adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sebagaimana sudah diuraikan pada BAB II di atas.

d. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu kinerja pegawai.

Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Komitmen mutu merupakan tindakan untuk menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ada empat indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu yang harus diperhatikan:

1) Efektif

Efektif adalah berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektifitas organisasi tidak hanya diukur dari performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan.

2) Efisien

Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan keborosan. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realiasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang ke luar alur.

3) Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin.

4) Orientasi Mutu

Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. Mutu mencerminkan nilai keunggulan

produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi.

Ada lima dimensi karakteristik yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayan (Berry dan Pasuraman dalam Zulian Zamit, 2010:11), yaitu:

- a) *Tangibles* (bukti langsung), yaitu: meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi;
 - b) *Reliability* (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan;
 - c) *Responsiveness* (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan dengan tanggap;
 - d) *Assurance* (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya;
 - e) *Empaty*, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.
- e. Anti Korupsi
- Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang artinya kerusakan, kebobrokan dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena dampaknya yang luar biasa, menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang.

Ada 9 (sembilan) indikator dari nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus diperhatikan, yaitu:

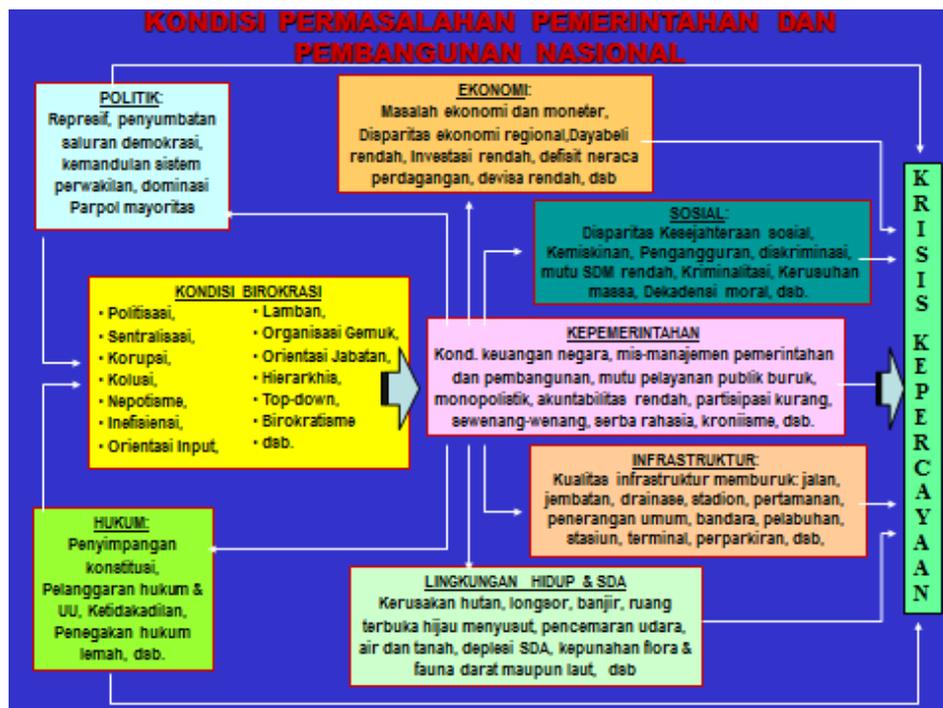
- 1) Jujur, Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang.
- 2) Peduli, Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.
- 3) Mandiri, Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat.
- 4) Disiplin, Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah.

- 5) Tanggung Jawab, Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.
- 6) Kerja Keras, Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat.
- 7) Sederhana, Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar harta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya.
- 8) Berani, Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi dan tidak memiliki teman kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.
- 9) Adil, Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah

upayakan. Bila ia seorang pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya.

3. Pengembangan Budaya Kerja

Pengembangan budaya kerja aparatur merupakan upaya dan langkah terencana secara sistematis untuk menerapkan nilai-nilai dan norma etika budaya kerja aparatur Negara sebagaimana telah diuraikan di atas secara konsisten dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan permasalahan pemerintahan dan pembangunan nasional saat ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar. Kondisi Permasalahan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan suatu upaya perubahan/pengembangan budaya kerja yang mendasar di lingkungan birokrasi pemerintahan yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Berdasarkan grand

design reformasi birokrasi terdapat 8 area perubahan reformasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

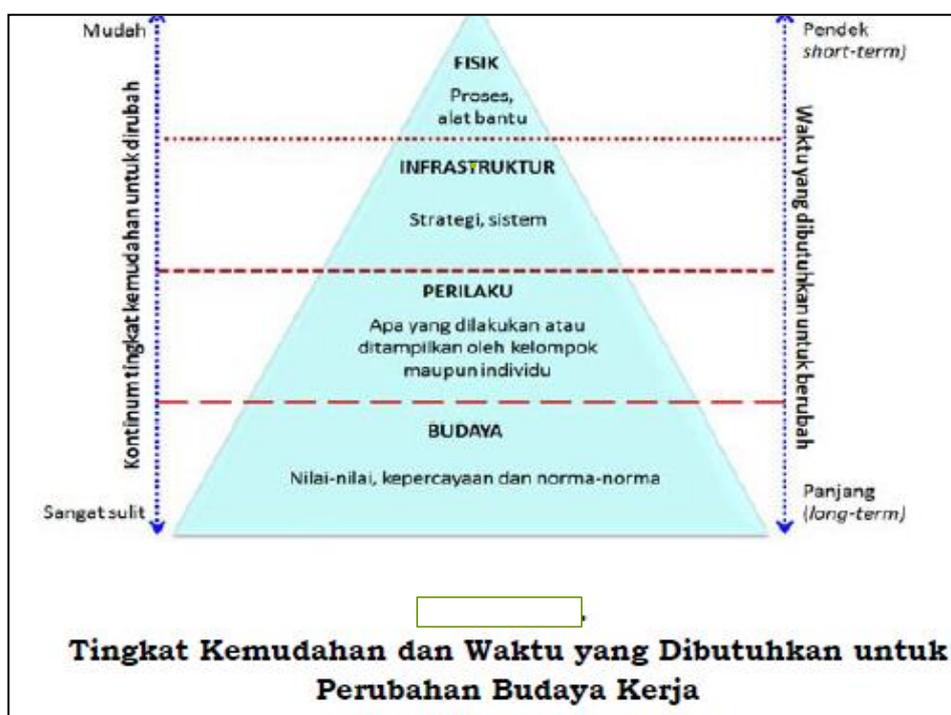


Gambar. Keterkaitan Antar Area Perubahan

Dari gambar di atas dapat diperhatikan bahwa inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental/perilaku aparatur, hal ini juga sejalan dan beririsan dengan konsep revolusi mental sebagaimana diuraikan di atas.

4. Kerangka waktu dan Arah Pengembangan Budaya Kerja

Kerangka waktu pengembangan budaya kerja dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar. Kerangka Waktu dalam Pengembangan Budaya Kerja

Pengembangan budaya kerja dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur pemerintah yang bersumber dari nilai-nilai : Pancasila, agama, tradisi dan nilai-nilai kerja produktif modern sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Memperbaiki persepsi, pola pikir dan perilaku aparatur pemerintah yang menyimpang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sekaligus untuk mempercepat pemberantasan KKN;

- c. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui kelompok-kelompok kerja dan forum-forum profesional;
- d. Membangun kepekaan terhadap lingkungan, kreatif dan dinamis untuk memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan;
- e. Memperbaiki citra aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah;
- f. Meningkatkan kerjasama, mengefektifkan koordinasi, memperlancar komunikasi dan hubungan kerja, menumbuhkembangkan kepemimpinan yang partisipatif, mengeliminasi hambatan-hambatan psikologis dan kultural, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan mendorong kreativitas pegawai.
- g. Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perubahan organisasi, maka perubahan budaya kerja harus dilakukan secara Terencana, terstruktur, komprehensif
- h. Untuk mengembangkan budaya kerja, hal yang harus dilakukan adalah: Perumusan nilai-nilai, Implementasi nilai-nilai, Monitoring dan Evaluasi.

5. Membangun Budaya Kerja Berbasis Nilai-nilai Revolusi Mental

a. Membangun Integritas

Untuk membangun integritas dalam kehidupan kita sehari-hari terutama dilingkungan tempat kerja kita harus punya komitmen yang kuat dengan diri sendiri sehingga dapat mencapai sesuatu yang akan dicapai. Untuk membangun integritas dan karakter yang kokoh, diperlukan beberapa kebiasaan yang harus dilakukan secara sadar dan konsisten yaitu:

- 1) Berpikir positif
- 2) Selalu menepati janji
- 3) Memegang teguh komitmen dan bertanggungjawab
- 4) Satu kata, satu perbuatan
- 5) Menghargai waktu
- 6) Menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini
- 7) Lakukan sesuatu secara benar walau sulit
- 8) Bersikap jujur dan sopan terhadap diri sendiri dan orang lain

9) Berusaha memperbaiki kesalahan

Dengan menjaga integritas diri, maka kita akan dapat memberikan dampak bagi orang lain. Memperbaiki dari hal yang kecil, yaitu diri sendiri maka dapat memberikan teladan bagi rekan kerja dan lingkungan sekitar kita. Dimulai dari lingkungan yang kecil, yaitu keluarga akan dapat memberikan teladan bagi lingkungan yang lebih besar, yakni masyarakat. Lingkungan masyarakat dapat memberikan teladan bagi lingkungan aktivitas sehari-hari kita seperti tempat kita kerja. Jika sistem perbaikan terus berputar dan bergerak seperti itu untuk saling memberikan teladan sampai kepada tataran yang terbesar dalam organisasi kita terutama organisasi pemerintahan. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka pelayanan birokrasi akan semakin efektif dan efisien. Mari kita bersama-sama saling menjaga integritas diri agar saling memberikan teladan yang baik kepada lingkungan sekitar kita, lingkungan pekerjaan kita, dan Lingkungan organisasi kita menuju Indonesia sejahtera.

b. Membangun etos kerja

Menurut Usman Pelly (1992:12), etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Dapat dilihat dari pernyataan di muka bahwa etos kerja mempunyai dasar dari nilai budaya, yang mana dari nilai budaya itulah yang membentuk etos kerja masing-masing pribadi (Usman Pelly, 1992:12).

Etos kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang diwujudkannyatakan melalui perilaku kerja mereka secara khas (Sinamo, 2003,2).

Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna pada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih

amal yang optimal sehingga pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan antara manusia dengan makhluk lainnya dapat terjalin dengan baik (Toto Tasmara, 2002).

Etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting seperti:

- 1) Orientasi ke masa depan, yaitu segala sesuatu direncanakan dengan baik, baik waktu, kondisi untuk ke depan agar lebih baik dari kemarin.
- 2) Menghargai waktu dengan adanya disiplin waktu merupakan hal yang sangat penting guna efisien dan efektivitas bekerja.
- 3) Tanggung jawab, yaitu memberikan asumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan ketekunan dan kesungguhan.
- 4) Hemat dan sederhana, yaitu sesuatu yang berbeda dengan hidup boros, sehingga bagaimana pengeluaran itu bermanfaat untuk kedepan.
- 5) Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri agar pekerjaan yang dilakukan tidak mudah patah semangat dan menambah kreativitas diri.
- 6) Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu.
- 7) Menurut A. Tabrani Rusyan, (1989) fungsi etos kerja adalah:
 - pendorong timbulnya perbuatan
 - penggairah dalam aktivitas
 - penggerak, seperti; mesin bagi mobil,

Untuk membangun dan menumbuhkan etos kerja dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menumbuhkan sikap optimis:
 - Mengembangkan semangat dalam diri
 - Peliharalah sikap optimis yang telah dipunyai
 - Motivasi diri untuk bekerja lebih maju

- 2) Jadilah diri anda sendiri:
 - Lepaskan impian
 - Raihlah cita-cita yang anda harapkan
- 3) Keberanian untuk memulai:
 - Jangan buang waktu dengan bermimpi
 - Jangan takut untuk gagal
 - Merubah kegagalan menjadi sukses
- 4) Kerja dan waktu:
 - Menghargai waktu (tidak akan pernah ada ulangan waktu)
 - cepat merasa puas
- 5) Kosentrasikan diri pada pekerjaan:
 - Latihan berkonsentrasi
 - Perlunya beristirahat
- 6) Menyadari bahwa bekerja adalah sebuah panggilan Tuhan
(Khasanah, 2004)

c. Membangun Budaya Gotong Royong

Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong berasal dari kata gotong = bekerja, royong = bersama Bersama-sama dengan musyawarah, gotong royong menjadi dasar Filsafat Indonesia

Gotong royong adalah salah satu budaya bangsa yang membuat Indonesia, dipuji oleh bangsa lain karena budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia. Ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat Indonesia bisa bersatu dari Sabang hingga Merauke, walaupun berbeda agama, suku dan warna kulit.

Ciri khas bangsa Indonesia salah satunya adalah gotong royong, kita mengetahui bahwa modernisasi dan globalisasi melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks, hal ini seharusnya jangan sampai membuat bangsa Indonesia kehilangan kepribadiannya sebagai

bangsa yang kaya akan unsur budaya. Akan tetapi dengan semakin deras arus globalisasi mau tidak mau kepribadian tersebut akan terpengaruh oleh kebudayaan asing yang lebih mementingkan individualisme. Sesungguhnya budaya gotong-royong merupakan kekuatan besar budaya masyarakat yang perlu dikembangkan terus di negeri ini”.

Membangun budaya gotong royong dilingkungan aparatur sipil negara dapat dilakukan dengan senantiasa mengedepankan kerjasama tim dalam melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Membangun budaya gotong royong melalui kerjasama tim dapat dilakukan dengan cara:

1) Terbuka

Sebuah tim yang solid harus saling terbuka satu sama lain sehingga antar sesama anggota bisa saling mengkritik (kritik membangun tentunya) dan mengevaluasi hasil kerja tim. Bersikap terbuka antar sesama anggota tim juga dapat meningkatkan kreatifitas dan produktifitas kerja asalkan semuanya terarah dan terkontrol dengan baik.

2) Toleransi

Toleransi antar sesama anggota harus dimiliki oleh setiap tim yang solid sebab tanpa toleransi, sekuat apapun tim yang Anda bangun pasti tidak akan bertahan lama.

3) Saling menghormati

Seperti sikap toleransi, sikap saling menghormati juga sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah kerjasama tim yang kokoh, tidak ada tim yang dapat bertahan jika sesama anggotanya tidak saling menghormati. Saling menghormati juga dapat dilihat pada saat mengeluarkan pendapat atau ide, yaitu pada saat ide atau pendapat salah satu anggota tim di kritik (dapat dilihat dari cara penyampaian kritik). Jika Anda menemukan bahwa tim Anda

kurang memiliki sikap saling menghormati, coba kumpulkan setiap anggota tim Anda dan diskusikan hal ini.

4) Mengutamakan kepentingan tim

Setiap hal yang dilakukan oleh anggota tim harus berdasarkan atas kepentingan tim, tidak boleh ada unsur pribadi dalam setiap melaksanakan pekerjaan. Memastikan bahwa setiap anggota tim yang terlibat dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan kesepakatan tim dan tugas tersebut diselesaikan tepat pada waktunya.

5) Mengadakan kegiatan bersama

Sesekali adakan kegiatan/acara berkumpul bersama untuk meningkatkan kekompakan tim, sehingga hubungan antar sesama anggota menjadi semakin kuat. Setiap acara yang dibuat harus melibatkan setiap anggota tim, tujuannya adalah menjalin hubungan interpersonal dan memperkuat kerjasama tim.

C. Latihan

1. Kelas dibagi dalam 3 kelompok
2. Setiap kelompok mengidentifikasi situasi dan kondisi budaya kerja pegawai ASN saat ini ditinjau dari nilai-nilai revolusi mental dan diskusikan dan rumuskan strategi memperbaiki/meningkatkan situasi dan kondisi tersebut.
3. Setiap kelompok memilih salah satu nilai pokok (Integritas, Etos kerja, Gotong royong)
4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok

D. Rangkuman

1. Revolusi Mental merupakan sebuah gerakan membangun karakter bangsa yang mengubah cara pikir menjadi lebih baik, mandiri, berkarakter dan nasionalis melalui internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Integritas (jujur, dipercaya, berkarakter dan bertanggungjawab), kerja keras (etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif), Gotong royong (kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi pada kemaslahatan), serta diharapkan aktualisasi nilai-nilai ini akan menjadi budaya kerja aparatur. Disamping itu

Nilai-nilai Aneka (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) adalah merupakan landasan dan pedoman bagi ASN untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga nilai ini jugalah yang harus diadopsi dan diaktualisasi sebagai budaya kerja pegawai ASN.

2. Upaya perubahan/pengembangan budaya kerja yang mendasar di lingkungan birokrasi pemerintahan dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang dilakukan pada 8 area perubahan (organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mental aparatur).
3. Pengembangan budaya kerja dapat dilakukan dengan Menumbuhkan-kembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur pemerintah yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, agama, tradisi dan nilai-nilai kerja produktif modern sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Untuk membangun integritas dan karakter yang kokoh, diperlukan beberapa kebiasaan yang harus dilakukan secara sadar dan konsisten yaitu: Berpikir positif, Selalu menepati janji, Memegang teguh komitmen dan bertanggungjawab, Satu kata, satu perbuatan, Menghargai waktu, Menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini, Lakukan sesuatu secara benar walau sulit, Bersikap jujur dan sopan terhadap diri sendiri dan orang lain, Berusaha memperbaiki kesalahan.
5. Untuk membangun dan menumbuhkan etos kerja dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan sikap optimis, menjadi diri anda sendiri, keberanian untuk memulai, menghargai waktu, Kosentrasikan diri pada pekerjaan, dan menyadari bahwa bekerja adalah sebuah panggilan Tuhan.
6. Membangun budaya gotong royong dilingkungan aparatur sipil negara dapat dilakukan dengan senantiasa mengedepankan kerjasama tim dalam melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

EVALUASI

1. Jelaskan makna revolusi mental
2. Perubahan/pengembangan budaya kerja yang mendasar di lingkungan birokrasi pemerintahan dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam.....
3. Jelaskan makna integritas dan bagaimana cara anda meningkatkan etos kerja
4. Jelaskan bagaimana cara membangun/meningkatkan etos kerja
5. Jelaskan pemahaman anda tentang akuntabilitas dan bagaimana cara anda mengaktualisasikannya.

UMPAN BALIK

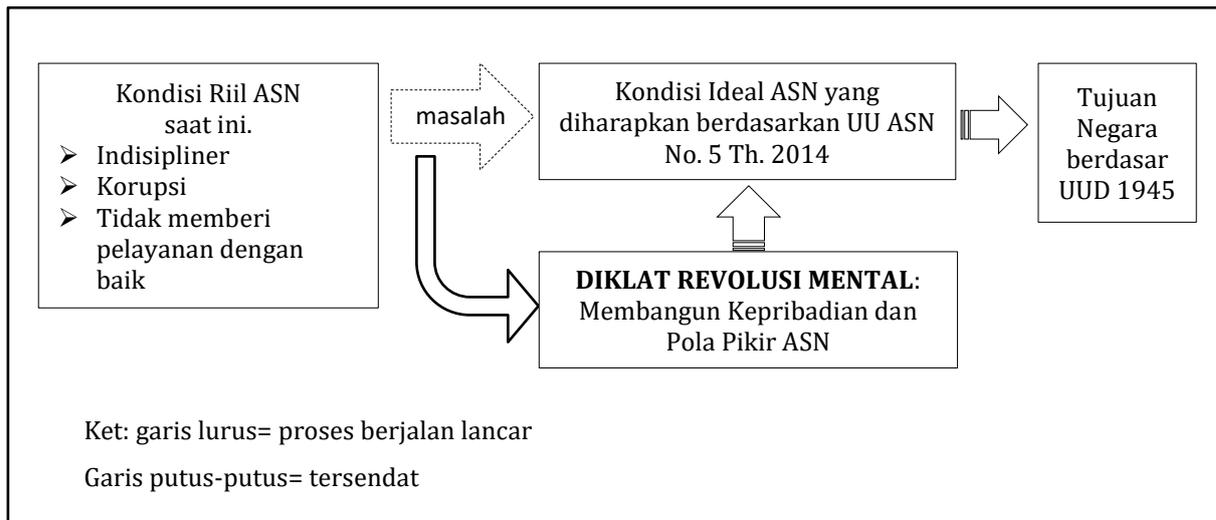
1. Salah satu langkah pengembangan budaya kerja adalah “memperbaiki citra aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah” Jelaskan secara rinci dan logis strategi yang akan saudara lakukan untuk mengimplementasikannya.
2. Susunlah rencana aksi yang akan saudara lakukan untuk membangun dan mengembangkan budaya gotong royong di lembaga/unit kerja saudara.

MODUL 04

PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

BAB 01 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Gambar 1. Peta Latar Belakang Perlunya Pengembangan Kepribadian dan Pola Pikir ASN

Untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 menegaskan bahwa setiap ASN memiliki nilai dasar profesi, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalisme jabatan. menegaskan bahwa setiap ASN Pegawai ASN

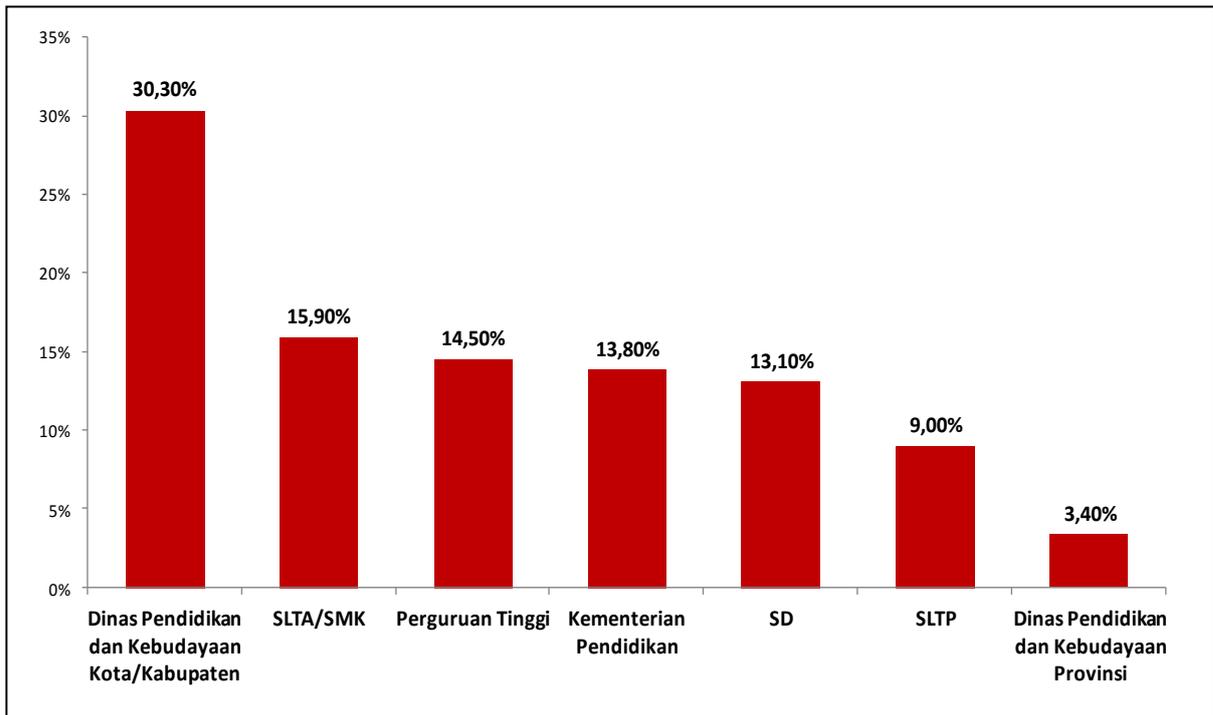
berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa.

Tugas Pegawai ASN berdasar UU ASN No 5 tahun 2014 adalah:

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

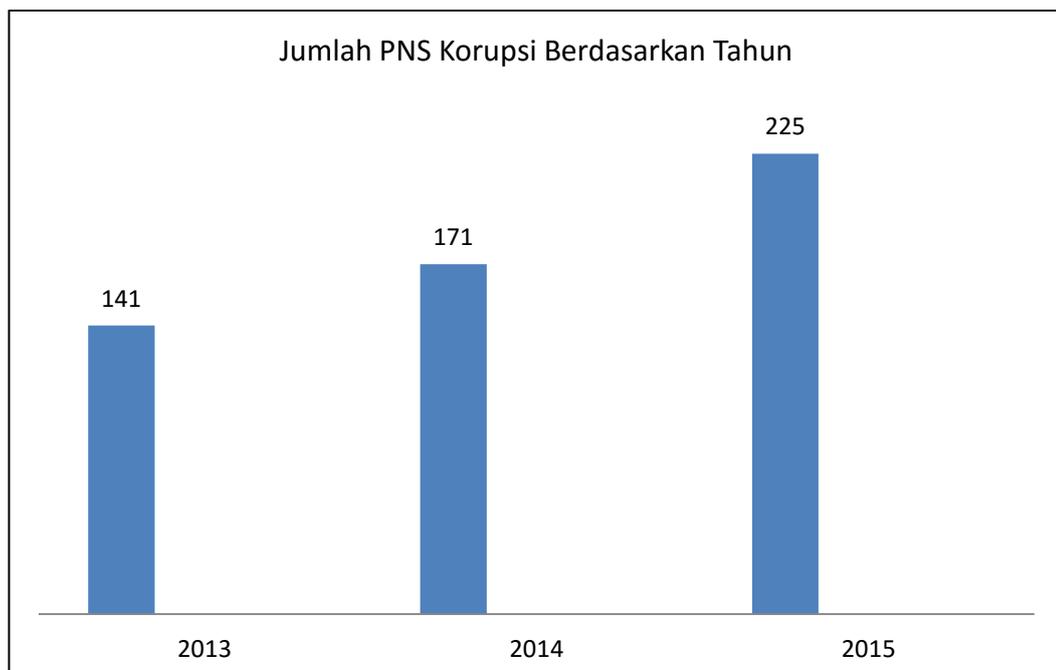
Visi Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki nilai dasar profesi yang baik seperti yang diharapkan dalam UU ASN No.5 tahun 2015.

Namun untuk mencapai visi tersebut, masih ada berbagai permasalahan ASN baik dari segi penyimpangan nilai dan kode etik, maupun permasalahan dalam memberikan pelayanan. Berikut ini data di bidang pelayanan publik, akan nampak bagaimana pemberian pelayanan publik yang masih rendah yang diberikan oleh para aparatur sipil negara. Dari grafik pelayanan publik di bidang pendidikan yang bersumber dari laporan khusus bidang Ombusmen RI 2012, diperoleh data pengaduan keluhan masyarakat di bidang pendidikan khususnya untuk Dinas Pendidikan Kab/Kota sebesar 30,30%, perguruan tinggi sebesar 14,5%, Kementerian Pendidikan sebesar 13,8%. Selengkapnya pada grafik berikut.



Gambar 2. Grafik Pengaduan pelayanan berdasarkan instansi/institusi pendidikan yang dilaporkan (Lap.Sus. bid.pendidikan Ombudsmen RI 2012)

Selain data pelayanan publik di atas, berikut ini data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) jumlah PNS yang terlibat korupsi selama 2013-2015.



Gambar 3. Data ICW 2016

Dari data ICW 2016 pada gambar 2 tersebut nampak bahwa jumlah PNS tahun 2013 yang terlibat kasus korupsi sebanyak 141 orang, tahun 2014 sebanyak 171 orang, dan lebih meningkat lagi pada tahun 2015 sebanyak 225 orang.

Sample permasalahan tersebut diatas sudah cukup menjadi acuan bahwa karakter PNS berdasarkan nilai dasar profesi yang tertuang dalam UU ASN No.5 tahun 2014 perlu lebih diperkuat, ditingkatkan, dan diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Jika ASN sudah memiliki karakter berdasarkan nilai dasar profesinya, maka akan meminimalisir permasalahan tersebut, bahkan diharapkan tidak ada.

Untuk itu program pemerintah terkait Revolusi Mental khususnya di kalangan ASN sangat diperlukan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai garda terdepan dari Kemendikbud menginisiasi dan melaksanakan diklat Revolusi Mental bagi pegawai ASN. Diklat ini bertujuan untuk mencetak ASN profesional dan memiliki karakter berdasarkan nilai dasar profesi PNS untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Tentu saja, untuk memulai itu semua, salah satu poin penting dan utama adalah harus dimulai dengan merubah pola pikir, dari pola pikir lama ke pola pikir ASN.

B. Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini menguraikan tentang konsep dasar kepribadian, faktor yang mempengaruhi kepribadian, manfaat pengembangan kepribadian, hambatan pengembangan kepribadian; Konsep pola pikir ASN, perubahan pola pikir ASN; dan menguraikan teknik mengembangkan kepribadian dan pola pikir.

Beberapa penjelasan disajikan dalam bentuk peta untuk lebih mempermudah alur konsepnya.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memahami pengembangan kepribadian dan pola pikir ASN dengan optimal.

2. Indikator Hasil Belajar

1. Peserta dapat menjelaskan konsep dasar kepribadian
2. Peserta dapat menjelaskan konsep pola pikir ASN
3. Peserta dapat mempraktikkan teknik mengembangkan kepribadian dan pola pikir.

D. Materi Pokok

1. Konsep Dasar Kepribadian
2. Konsep Pola Pikir ASN
3. Teknik Mengembangkan Kepribadian

E. Pengalaman Belajar/ Metode yang digunakan

1. Membaca modul yang berisi materi mengembangkan kepribadian dan pola pikir ASN
2. Menonton film tentang perilaku PNS yang tidak sesuai nilai, dan mendiskusikan film tersebut
3. Menonton film tentang kondisi Indonesia, dan mendiskusikan film tersebut dikaitkan dengan perilaku PNS untuk mencapai tujuan nasional
4. Menjelaskan tentang konsep kepribadian dan konsep pola pikir PNS
5. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepribadian, manfaat pengembangan kepribadian dan pola pikir untuk PNS, dan hambatan dalam pengembangan kepribadian
6. Mendiskusikan tentang pengembangan kepribadian dan pola pikir bagi PNS
7. Mensimulasikan teknik mengembangkan kepribadian dan pola pikir
8. Bermain game untuk mengidentifikasi diri
9. Menuliskan rencana pengembangan kepribadian dan pola pikir PNS

F. Media Belajar

1. Bahan ajar
2. Film
3. Permainan ular tangga
4. Lilin dan korek api

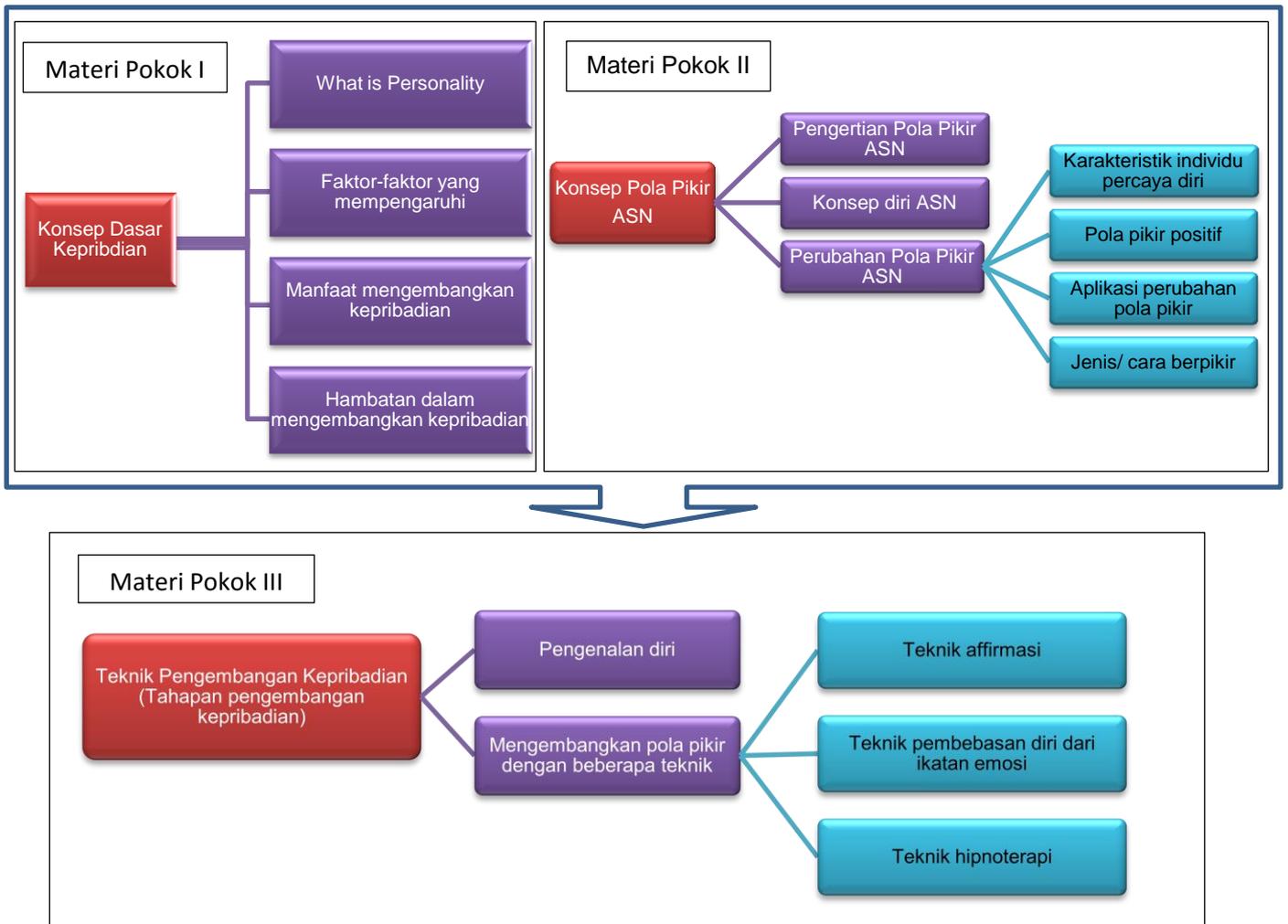
5. ATK
6. Flipchart
7. Komputer & LCD
8. Sound system
9. White board dan Spidol

G. Waktu

Alokasi waktu materi ini 9 Jam Pelajaran (JP) @ 45 menit

H. Peta Pembelajaran Mata Diklat Mengembangkan Kepribadian Dan Pola Pikir ASN

Berikut ini disajikan peta pembelajaran mata diklat Mengembangkan Kepribadian dan Pola Pikir ASN.



BAB 02 KONSEP DASAR KEPRIBADIAN

A. Indikator Hasil Belajar

- a. Peserta dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku baik maupun perilaku-perilaku tidak baik yang membentuk kepribadian.
- b. Peserta dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan kepribadian.

B. Uraian Materi

1. *What is personality*

Isilah dalam kotak berikut ini, siapa saja tokoh idola atau favorit Anda, minimal 3 orang.

1.
2.
3.
4.
5.

Pertanyaannya adalah, mengapa Anda mengidolakan tokoh tersebut?

Faktor apa saja yang membuat Anda mengidolakan mereka?

Nah, kemudian silahkan cermati tokoh berikut ini:

Susilo Bambang Yudhoyono

Tri Rismaharini

Habibie

Ridwan Kamil

Megawati Sukarno Putri

Arya Bima

Jokowi

Ahok

Jusuf Kalla

Dari para tokoh tersebut dan yang Anda idolakan di atas, faktor apakah yang membuat mereka menjadi idola atau favorit?

Ya, jawabannya adalah **kepribadian** para tokoh tersebut, atau **personalitinya** yang membuat mereka menjadi idola.

Manakah di antara para tokoh tersebut yang memiliki kepribadian yang menarik, smart, dan tauladan? Tentunya jawaban di antara Anda berbeda-beda, tergantung sudut pandang masing-masing. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda dan kepribadian tersebut dapat berubah seiring dengan waktu dan dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan positif secara optimal maupun sebaliknya.

“Jadi, apakah sebenarnya kepribadian itu?”

Silahkan tuliskan pada kotak ini, apa yang Anda ketahui mengenai kepribadian/ *personaliti*!

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dalam bahasa latin, asal kata *personaliti* berasal dari *persona* (topeng), sedangkan dalam ilmu psikologi menurut Gordon W. Allport adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem *psiko-fisik individu* yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Interaksi *psiko-fisik* mengarahkan tingkah laku manusia.

Berikut ini beberapa pengertian kepribadian menurut para tokoh.

1. Koentjaraningrat

Menurut Koentjaraningrat Kepribadian adalah beberapa ciri watak yang diperlihatkan seseorang secara lahir, konsisten, dan konsekuen. Setiap manusia melakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi berlangsung selama manusia masih hidup didunia ini. Kepribadian seseorang

individu dapat terbentuk dalam bertingkah laku, sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain.

2. George Herbert Mead

Menurut George Herbert Mead kepribadian adalah tingkah laku manusia berkembang melalui perkembangan diri. Perkembangan kepribadian dalam diri seseorang berlangsung seumur hidup. Menurutnya, manusia akan berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat.

3. Theodore M. Newcomb

Menurut ahli sosiologi Theodore M. Newcomb kepribadian yaitu suatu kelompok sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari perilakunya. Hal tersebut berarti bahwa kepribadian itu dimaksudkan untuk menunjukkan kelompok dari tingkah-tingkah seorang individu untuk dapat berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan secara khusus jika ia berhubungan dengan orang lain atau juga pada saat ia menghadapi suatu masalah / keadaan.

4. M.A.W. Brower

Kepribadian adalah corak tingkah laku sosial seorang individu yaitu meliputi keinginan, opini, dorongan, dan kekuatan, serta perilaku-prilaku seseorang.

Berdasarkan pengertian yang Anda tuliskan dan pengertian para tokoh tersebut di atas, jika dikaitkan dengan corak/ perilaku/ kebiasaan/ sikap/ watak yang membentuk kepribadian para aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas keseharian, sekarang Anda dapat mengamati perilaku dan kepribadian aparatus di kantor Anda dan menyebutkan contoh perilaku ASN yang menurut Anda baik dan seharusnya dilakukan, serta contoh perilaku yang tidak baik yang menurut Anda seharusnya ditinggalkan?.

Anda dapat tuliskan pada tabel berikut ini.

Perilaku yang membentuk kepribadian ASN yang baik	Perilaku yang membentuk kepribadian ASN yang tidak baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian



Karakter pada individu (fenotipe) dipengaruhi oleh faktor genetik atau genotipe dan faktor lingkungan (Pallawarukka, 1999 dalam Ferdy, 2010).

Fenotip = Genetik (20%) + Lingkungan (100 %)

Dari prosentase di atas nampak bahwa faktor lingkungan berpengaruh sebesar 80% dalam mempengaruhi fenotip seseorang, dan faktor genetik atau keturunan atau bawaan, berpengaruh sebesar 20%. Namun meski hanya 20%, faktor genetik ini tidak bisa diabaikan. Karena jika mengerti cara mengoptimalkannya, dampak positifnya akan luar biasa pada diri seseorang tersebut.

Berdasarkan penelitian akhir 2007 yang dilakukan oleh Kazuo Murakami, Ph.D dari Jepang dalam bukunya *The Divine message of the DNA*, menyimpulkan bahwa kepribadian sepenuhnya dikendalikan oleh gen yang ada dalam sel tubuh manusia. Gen tersebut dapat bersifat *dorman* (tidur) atau tidak aktif dan yang bersifat aktif. Bila gen tersebut sering dinyalakan dengan cara *positif thinking* maka kepribadian dan nasib seseorang tersebut akan lebih baik.

3. Manfaat mengembangkan kepribadian

Manfaat mengembangkan kepribadian adalah mengembangkan fenotip yang berasal dari genetik maupun lingkungan secara tepat, dengan harapan dapat mengembangkan kepribadian yang positif, meminimalisasi kepribadian yang negatif sehingga dapat membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Dengan demikian maka dapat berperilaku sesuai dengan tugas dan peran yang dimainkannya, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan yang bertakwa.

4. Hambatan dalam mengembangkan kepribadian

Mengapa ada seseorang aparatur yang hidupnya terlihat bahagia, sukses, dan sejahtera. Tapi mengapa ada juga yang aparatur hidupnya begitu-begitu saja, terasa sempit, kurang bahagia dan sejahtera. (ini sama sekali bukan tentang sejahtera melimpah harta karena korupsi, *Big No No*, jangan berpikiran negatif).

Kalau dilihat, hal tersebut dapat terjadi salah satunya dikarenakan ada hambatan pada diri orang yang hidupnya begitu-begitu saja dibanding dengan orang yang sukses dan sejahtera. Ada hambatan yang muncul secara internal maupun eksternal. Hambatan internal muncul dari dalam diri seseorang itu sendiri. Hambatan eksternal muncul dari lingkungan.

Coba Anda identifikasi, apa saja hambatan internal dan eksternal dalam pengembangan diri seseorang ASN.

Hambatan Internal	Hambatan Eksternal

C. Latihan

Berikut ini beberapa latihan yang Anda dapat lakukan sebelum berlanjut pada bab berikutnya:

1. Renungkan, kepribadian seperti apa yang bisa diteladani dalam diri Anda oleh orang lain. Tuliskan, hal apakah yang menjadi tauladan pada diri Anda.
2. Identifikasi perilaku positif dan negatif yang ada pada diri Anda yang membentuk kepribadian Anda selama ini. Tuliskan semampu Anda

D. Rangkuman

1. Kepribadian adalah corak, perilaku, sikap, kebiasaan pada diri seseorang yang menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungannya.
2. Kepribadian seseorang, fenotipnya dipengaruhi oleh 20% berasal dari genetiknya + 80% berasal dari pengaruh lingkungannya.
3. Hambatan dalam pengembangan diri seseorang muncul karena ada hambatan dari dalam diri atau internal, dan hambatan dari lingkungan atau eksternal.

E. Evaluasi

1. Pola pikir seperti apakah yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepribadian ASN yang profesional
2. Identifikasi kepribadian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang ASN.
3. Simulasikan kepribadian yang positif, kepribadian yang negatif, pola pikir positif, dan pola pikir negatif
4. Apa sajakah yang dapat menghambat pengembangan kepribadian seseorang..

BAB 03	KONSEP POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA
-------------------	--

A. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat memahami teknik mengubah pola pikir yang dibutuhkan oleh ASN sebagai pelayan masyarakat yang berkepribadian.

B. Uraian Materi

*Jika menginginkan perubahan kecil, garaplah perilaku anda. Jika menghendaki perubahan besar dan mendasar, garaplah Mindset Anda
(Carol S. Dweck, PH.D, 2007).*

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas Pegawai ASN adalah:

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ASN sebagaimana Undang-undang tersebut agar tercapai tujuan nasional, maka dibutuhkan ASN yang memiliki pola pikir yang baik.

1. Pengertian Pola Pikir

Pola pikir terbentuk dari kepercayaan (*belief*) atau sekumpulan kepercayaan (*set of belief*) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku (*behavior*), dan sikap (*attitude*) seseorang yang akhirnya menentukan keberhasilan (nasib) hidup seseorang.

Pola pikir merupakan paradigma seseorang yang selalu digunakan untuk memandang sesuatu, baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Pikiran ini akan selalu memengaruhi dan menentukan orang tersebut dalam bersikap dan bertindak. Seseorang yang telah memilih pola pikir yang salah, tindakan yang akan dilakukan kemungkinan besar akan salah. Bahkan untuk jangka panjang jika pilihan pola pikir salah maka pada gilirannya hasil akhir yang akan diperoleh sudah dapat dipastikan salah. Sebagai contoh, orang yang memandang masa depannya dengan pikiran yang selalu negatif, maka ketika ia menghadapi masalah atau keadaan dengan orang lain atau objek tertentu sudah dapat dipastikan sikapnya negatif dan reaksi perilakunya juga negatif (*curiga*, *berprasangka*, dan sebagainya). Pada gilirannya hubungan dengan orang lain juga menjadi negatif dan hasil akhirnya juga pasti negatif.

Tersusunnya pola pikir dalam kehidupan seseorang dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan adalah pemahaman atau pandangan seseorang terhadap benar dan salah, sedangkan nilai-nilai adalah pengertian terhadap baik dan buruk. Pola pikir merupakan kerangka interaksi mental dalam menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi terkait dengan keyakinan dan nilai-nilai, sehingga terbentuk sikap dan perilaku.

Struktur kejiwaan seseorang terdiri atas tiga lapisan, yaitu lapisan alam kesadaran, lapisan alam pikiran kritis, lapisan alam bawah sadar (lihat gambar 1). Pola pikir ini berada pada alam kesadaran dan banyak berperan pada lapisan pikiran kritis seseorang. Pikiran kritis inilah yang selalu akan menerima atau menolak sebagai tanggapan atau reaksi seseorang terhadap lingkungannya.

Pola pikir adalah pola-pola dominan yang menjadi acuan utama seseorang untuk bertindak (workshop pengembangan jati diri dan pola pikir bagi para pejabat struktural dan fungsional 2003)

Pola pikir adalah pola yang menetap dalam pikiran bawah sadar seseorang (mind setting, Ipcd, 2005).

Jadi Pola Pikir adalah cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide/pendapat/rencana/cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi pula oleh perasaan/pandangannya ataupun sikap prilakunya (attitude) tentang sesuatu itu secara umum. Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang itu dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya.

Ada 2 (dua) hal yang mempengaruhi pola pikir seseorang yaitu yang bersumber dari keturunan secara genetika, dan bersumber dari proses sosial.

2. Konsep Diri Aparatur Sipil Negara

Konsep diri ASN tercermin dalam bentuk acuan norma dan aturan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga dapat menjalankan tugasnya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep diri seorang aparatur terbentuk dari bagaimana dia membangun pola pikirnya. Adapun konsep diri PNS antara lain (1) bekerja sebagai ibadah, (2) menghindari sikap tidak terpuji, (3) Bekerja secara profesional, (4) berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus, (5) Pelayan dan pengayom masyarakat, (6) Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku (7) tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis.

Keberhasilan pola pikir ASN yang diharapkan adalah terdiri atas bentuk perilaku, etika, dan tanggung jawab sebagai ASN yang menjadi impian masyarakat yang antara lain terdiri dari 5 (lima) pilar pola pikir berikut.

- a. Kompetensi. Setiap ASN haruslah kompeten dalam melaksanakan pekerjaan. Tanpa kompetensi tertentu, maka ASN akan melaksanakan pekerjaannya dengan cara yang tidak profesional.
- b. Karakteristik diri. ASN harus harus mempunyai ciri sebagai kebiasaan kerja yang mampu menunjukkan dirinya sebagai ASN atas dasar kompetensi yang dimiliki. Mempunyai tanggung jawab kerja sebagai aktualisasi atas kompetensinya.
- c. Pembelajar sepanjang hayat. ASN perlu selalu belajar untuk meningkatkan kompetensinya dan menularkan hal ini kepada lingkungannya. Hal ini merupakan proses pembudayaan dan peningkatan terus-menerus.
- d. Memiliki visi ke depan. ASN harus memiliki impian jauh ke depan untuk mencapai yang lebih baik sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Pandangan ke depan ini selalu dibagikan kepada rekan kerja guna menjalin hubungan kerja sama dan dukungan.
- e. Berpikir sistem. Kebiasaan berpikir bahwa maju menuju impian tersebut menjadi pola pikirnya dan secara operasional menjadi tindakan yang sistemik dari hasil pembiasaan diri yang teratur untuk maju dan sukses sebagai ASN.

3. Perubahan Pola Pikir ASN

Mengapa diperlukan perubahan terhadap Pola Pikir? Perubahan Pola Pikir diperlukan karena, dengan adanya perubahan pola pikir diharapkan PNS mampu mengembangkan pola pikir yang positif dan meminimalisasi pola pikir dirinya yang negatif. Ini berarti akan mensukseskan tugas dan peranan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan pelayan masyarakat.

Pernahkah anda mengalami krisis kepercayaan diri atau dalam bahasa sehari-hari "TIDAK PEDE" dalam menghadapi suatu situasi atau persoalan? Saya yakin anda pernah, hampir setiap orang pernah mengalami krisis

kepercayaan diri dalam rentang kehidupannya, sejak masih kanak-kanak hingga dewasa bahkan sampai usia lanjut.

Hilangnya rasa pede tentu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu, terlebih ketika dihadapkan pada tantangan ataupun situasi baru. Ada yang berkata: "Kok saya tidak seperti dia,...yang selalu percaya diri...rasanya selalu saja ada yang kurang dari diri saya...saya malu menjadi diri saya!" Berikut hal yang dapat kamu pikirkan tentang perbedaan orang yang percaya diri dan tidak percaya diri, tapi ingat jangan sampai memiliki rasa percaya diri yang berlebihan (narsisme).

a. Karakteristik Individu Percaya Diri

Beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional, diantaranya adalah:

- 1) Percaya akan kompetensi/kemampuan diri, hingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, ataupun rasa hormat orang lain
- 2) Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima oleh orang lain atau kelompok
- 3) Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain
- 4) Berani menjadi diri sendiri
- 5) Punya pengendalian diri yang baik (tidak *moody* dan emosinya stabil)
- 6) Memiliki internal *locus of control* (memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha diri sendiri dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak tergantung/mengharapkan bantuan orang lain)
- 7) Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi di luar dirinya
- 8) Memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan situasi yang terjadi.

b. Pola Pikir Positif

Diantara ciri-ciri yang berpikir positif antara lain:

- 1) Melihat masalah sebagai tantangan
- 2) Menikmati hidupnya
- 3) Pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide
- 4) Menghilangkan pikiran negatif segera setelah pikiran itu terlintas dalam benak
- 5) Mensyukuri yang di miliki
- 6) Tidak mendengarkan gossip yang tak menentu
- 7) Tidak membuat-buat ALASAN tapi langsung melakukan TINDAKAN
- 8) Menggunakan bahasa yang positif
- 9) Menggunakan bahasa tubuh yang positif
- 10) Peduli pada citra diri.

c. Aplikasi Perubahan Pola Pikir

Kepercayaan masyarakat terhadap PNS yang menurun akibat korupsi, malas, tidak produktif, kurang memberikan pelayanan, etos kerja rendah dan lain-lain membutuhkan reformasi/perubahan Pola Pikir yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara adalah berlatih kreatif dengan permainan mental. Otak Anda seperti bagian tubuh anda lainnya, berfungsi lebih baik dan lancar bila selalu dijaga dalam keadaan prima.

- 1) Pikirkanlah penggunaan kembali barang-barang lama yang sudah tidak dipakai;
- 2) Lihatlah kejadian sehari-hari dan susunan uraian kisah tentang peristiwa-peristiwa yang memunculkannya;
- 3) Isilah teka-teki silang dan permainan-permainan kata lainnya;
- 4) Temukan peribahasa-peribahasa yang dapat anda gunakan untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang;
- 5) Pikirkanlah berbagai macam cara untuk mengatakan hal yang sama;
- 6) Tontonlah acara TV dan matikan suaranya, dan cobalah memperkirakan dan membayangkan apa yang dikatakan orang dalam acara itu.

- 7) Bebaskan pikiran anda dari asumsi. Asumsi dapat menyembunyikan solusi. Misalnya, PNS yang kaya diasumsikan korupsi. Orang yang rajin hanya akan disuruh-suruh pimpinan dan lain sebagainya;
- 8) Ubahlah posisi anda sesering mungkin. Jika anda duduk dibelakang meja, pergilah keluar dan berbaringlah diatas rumput. Atau, jika anda berada dalam ruang konferensi di kantor, bertukar tempatlah dengan orang lain atau berdirilah. Mengubah posisi anda berarti mengubah pandangan anda terhadap berbagai hal, dan perubahan posisi mungkin akan menghasilkan perubahan sikap mental.

Banyak orang-orang yang berpikiran kreatif, nampaknya selalu menyimpang dari jalur yang biasanya. Sejalan dengan hal itu ia dihadapkan pada berbagai resiko. Akan tetapi setelah pola berpikirnya menghasilkan buah pikiran baru yang lebih baik, barulah ia mendapat pengakuan “kreatif”.

Quotes dari *Dorothy Law Nolte* dalam tips mendidik anak ini dapat diaplikasikan bagi Anda untuk mengubah pola pikir menjadi lebih baik.

UBAHLAH PIKIRAN ANDA

- **Bila Anda mengubah pikiran Anda**, Anda mengubah keyakinan diri Anda
- Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda, Anda mengubah harapan-harapan Anda
- Bila Anda mengubah harapan-harapan Anda, Anda Mengubah sikap Anda
- Bila Anda mengubah Sikap Anda, Anda akan mengubah Tingkah Laku Anda
- Bila Anda mengubah Tingkah Laku Anda, Anda Mengubah Kinerja Anda
- Bila Anda mengubah Kinerja Anda, Anda telah mengubah Nasib Anda
- Bila Anda mengubah Nasib Anda, **Anda telah mengubah Hidup Anda.**

d. Jenis/ cara Berpikir

Setiap orang berbeda cara berpikirnya, dari cara berpikir seseorang kita bisa menilai kepribadiannya, bahkan terkadang ada beberapa orang yang bisa meramalkan masa depan seseorang hanya dengan mempelajari cara atau pola berpikirnya, berikut ini akan diuraikan beberapa jenis cara berpikir seseorang.

1) Pemikir simple.

Mereka punya rumus terkenal:

Problem x 0 = No Problem

Biasanya orang dengan model berpikir seperti ini setiap saat selalu kelihatan ceria tanpa beban meskipun ada masalah, karena semua permasalahan hidup dia buat sesimple mungkin tanpa mau ambil pusing. Seperti misalnya jika dia kehabisan duit, dia akan berprinsip “Ah...gak punya duit juga masih bisa hidup kok, santai aja....”Tapi tak jarang orang dengan prinsip seperti ini karirnya juga disitu situ saja, alias tidak berkembang, tapi untungnya biasanya mereka hidup awet muda dan umurnya juga panjang.

2) Pemikir akurat/teliti.

Berlawanan dengan pemikir simple tadi, orang dengan kategori seperti ini biasanya selalu kelihatan gelisah, stress dan selalu penuh dengan perhitungan. Jika ada permasalahan akan dikalikan dengan nilai X, besarnya nilai X selalu berubah ubah. Anda tidak akan bisa menang berdebat dengan orang seperti ini, karena satu pertanyaan simple dia bisa jabarkan menjadi berlembar-lembar jawaban yang sangat detail dan akurat. Tak jarang orang seperti ini penuh dengan tekanan dalam berpikir dan juga biasanya cepat mati.

3) Pemikir Optimis.

Selalu optimis dengan apa yang dia lakukan atau yang direncanakan. Tidak pernah putus asa meskipun mengalami kegagalan, dari mulutnya hampir tidak pernah kata kata mengeluh tentang kehidupannya, keuangannya, asmaranya, ataupun masa depannya. Yang ada di pikirannya hanya satu “Saya pasti bisa”. Dari sekian banyak orang sukses, kebanyakan dari mereka adalah pemikir positif.

C. RANGKUMAN

1. Pola pikir adalah pola-pola dominan yang menjadi acuan utama seseorang untuk bertindak dan menetap dalam pikiran bawah sadar seseorang. Pikiran bawah sadar adalah gudang dimana seluruh informasi/ pengalaman tersimpan.
2. Konsep diri seorang aparatur terbentuk dari bagaimana dia membangun pola pikirnya. Adapun konsep diri PNS antara lain (1) bekerja sebagai Ibadah, (2) menghindari sikap tidak terpuji, (3) Bekerja secara profesional, (4) berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus, (5) Pelayan dan pengayom masyarakat, (6) Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku (7) tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis
3. Seseorang akan dapat mengubah dunia, jika ia mampu mengubah dirinya sendiri. Setiap perubahan selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri, dan yang pertama kali harus diubah adalah pola berpikir kita. Perubahan pola pikir akan berwujud dalam perubahan sikap perilaku sebagai suatu hukum sebab-akibat.

D. Evaluasi

1. Mengapa Pola Pikir ASN perlu dibangun?
2. Apa akibatnya jika seorang ASN tidak membangun pola pikirnya sebagaimana seharusnya seorang ASN berdasarkan UU ASN No. 5 Th. 2014?

BAB 04 | **TEKNIK PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN**

A. Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat menerapkan teknik-teknik pengembangan diri ini secara aplikatif.

B. Uraian Materi

Pengembangan kepribadian adalah suatu usaha atau proses yang terus menerus ke arah penguasaan pribadi (*personal mastery*), sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan pribadi demi kemauan belajar, yang akhirnya membentuk pribadi yang mantap dan sukses. Berikut ini disajikan beberapa tips tahapan pengembangan kepribadian.

1. Pengenalan diri.

“Siapa yang tidak mengenal dirinya, maka tidak mengenal Tuhannya”

Dengan mengenali diri, akan mengenali potensi yang ada dalam diri seseorang, akan mengenali kelemahan/ kekurangan, akan mengenali kelebihan. Hal tersebut menjadi modal dasar seseorang untuk dapat menentukan strategi pengembangan dirinya.

2. Mengembangkan pola pikir

Mengembangkan pola pikir ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kepribadian seseorang. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk mengubah pola pikir, khususnya aparat pemerintah agar dapat bekerja menjadi lebih efektif dan efisien baik untuk organisasi maupun diri sendiri.

a. **Teknik Pertanyaan Kritis.** Teknik ini adalah mengubah keyakinan yang berasal dari mitos dan telah dinilai melalui teknik tertentu ternyata merupakan keyakinan yang menghambat tercapainya cita-cita atau harapan yang harus dicapai. Setelah menemukan keyakinan tersebut Anda harus menguji kebenaran mitos tersebut melalui pertanyaan kritis sehingga akan menemukan keyakinan tersebut menjadi sebaliknya. Sebagai misal mencari uang telah dimitoskan susah. Pada gilirannya

perilaku yang terus dilakukan akan senantiasa menemukan jalan mencari uang itu menjadi mudah.

- b. **Teknik Afirmasi.** Teknik ini adalah pemrograman ulang ingatan bawah sadar yang menjadi sugesti sehingga kita punya semangat untuk berbuat. Keduanya menggunakan cara yang sama tetapi medianya berbeda. Afirmasi menggunakan media sugesti dengan kata-kata. Sedang Visualisasi teknik sugesti dengan menggunakan media gambar atau bayangan. Dasar pemikirannya adalah pada pikiran bawah sadar lebih banyak menggunakan media gambar dari pada kata-kata. Oleh karena itu, kedua cara tersebut harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ingat pada kisah-kisah berpikir positif dan proaktif di atas. Dari hasil analisis lapisan pikiran ini akan ditemukan skenario hidup sebagai kumpulan dari keyakinan-keyakinan dan dibentuklah kemudian skenario hidup yang baru.
- c. **Teknik Pembebasan Diri Dari Ikatan Emosi.** Teknik ini adalah pengubahan pola pikir dengan cara mengalihkan sumber-sumber emosi penolakan yang dirasakan menghambat pencapaian tujuan hidupnya. Pengalihan atau penetralan sumber emosi penolakan dilakukan dengan dibarengi dengan ketukan akupunktur dengan jari. Dalam penetralan emosi penolakan juga digunakan kata-kata afirmasi. Ada lima langkah yang harus diikuti dalam teknik ini yang berguna untuk menghancurkan mental blok, yaitu mengukur kualitas dan besaran masalah, melakukan penyiapan emosi yang disebut set up, melakukan urutan pengetukan, menutup dengan 9 prosedur gammut (meyakinkan diri), terakhir mengulangi urutan pengetukan dan mengukur perubahan.
- d. **Teknik Hipnoterapi.** Teknik ini banyak namanya, ada yang terapi Gestalt ada pula yang menyebut dengan "transactional analysis". Pada dasarnya merupakan "The Art Of Subconciuosness Restructuring" atau "The Art Of Subconciuosness Communication". Teknik ini dapat dilakukan dengan bimbingan ahli, tetapi dapat dilakukan sendiri yang disebut dengan parts therap. Langkahnya hampir sama dengan teknik lainnya selalu mencari akar permasalahan yang disebut dengan "affect bridge"

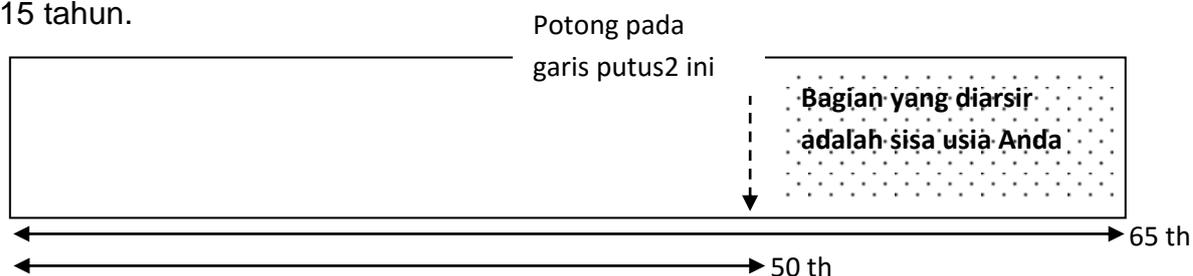
- e. **Teknik Program "Neuro-Linguistic"**. Teknik menggunakan tiga berpikir yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Visual adalah membuat gambar atau bayangan dalam pikiran kita, auditorial adalah melakukan percakapan dengan diri sendiri, dan kinestetik adalah melibatkan perasaan dan emosi dalam melakukan tindakan. Cara ini sebenarnya adalah suatu cara untuk menghilangkan virus pikiran yang selalu menyabotase pikiran kita dalam mencapai tujuan. Hampir semua virus yang menyabotase pikiran kita adalah pikiran setanah, sehingga orang akan cenderung berbuat setanah. Intinya teknik ini adalah membuat koherenitas gerak pikiran kita dalam mencapai tujuan. Cara yang harus dilakukan adalah menemukan ketidak koherenitas pikiran, mencari modalitas, dan menemukan trigger. Selanjutnya adalah menciptakan power trigger, collapsing anchor, dan setting reverse trigger.
- f. **Teknik refleksi dalam situasi konflik**. Salah satu teknik yang bisa juga digunakan untuk merubah pola pikir yang sudah diyakini adalah dengan melakukan refleksi sambil menguji pola pikir yang ada dengan beragam peristiwa terutama peristiwa yang menentang pola pikirnya. Ketika pola pikirnya tidak dapat digunakan untuk memvalidasi peristiwa nyata, pada keadaan ini ada peluang individu untuk memperbaiki atau bahkan merubah pola pikir lama menjadi pola pikir baru yang lebih fungsional dengan beberapa peristiwa yang ada.

C. Latihan

Ambil selembar kertas kosong, bayangkan kertas kosong itu adalah usia rata-rata orang Indonesia. Kemudian kurangilah dengan usia Anda sekarang dengan mempertimbangkan rasio panjang kertas dengan usia Anda sekarang. Nah, sisa kertas tersebut adalah usia Anda yang tersisa saat ini dianalogikan dengan usia rata-rata orang Indonesia.

Kemudian renungkan, pada sisa usia Anda tersebut, apa saja hal yang dapat Anda berikan pada kebermanfaatannya diri Anda, keluarga Anda, organisasi Anda, bangsa dan negara Anda, dan pada agama Anda.

Ilustrasi kertas. Misal dibawah ini kertas kosong dengan asumsi usia rata-rata orang Indonesia adalah 65. Usia Anda saat ini 50 tahun, artinya sisa usia Anda 15 tahun.



EVALUASI

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pola pikir ASN!
2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kepribadian
3. Menurut Anda, apa yang bisa menghambat pengembangan diri seorang PNS?
4. Ceritakan salah satu teknik yang Anda kuasai untuk mengembangkan kepribadian!
5. Tuliskan, satu rencana Anda untuk pengembangan kepribadian dan pola pikir Anda!

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

“Al-Ilmu bi la ‘amalin, kas sajari bi la tsamarin” (pepatah arab)

“Ilmu tanpa diamalkan, bagaikan pohon tak berbuah”

Begitu juga dengan materi mengembangkan kepribadian dan pola pikir ASN ini. Tanpa Anda mengamalkan, maka tidak akan bermakna bagi kehidupan Anda khususnya, maupun bagi organisasi secara umum. Untuk itu, mengaplikasikan apa yang sudah Anda dapatkan sangatlah penting bagi kebermanfaatan negeri Indonesia ini.

Teori-teori lain tentang materi pengembangan diri tentu saja masih banyak selain dari materi ini, dan silahkan disinergikan serta diaktualisasikan, khususnya bagi Anda sendiri dan bagi organisasi Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Hawkins, R. David. (1995), *Power vs Force The Hidden Determinants of Human Behavior*, Australia: Hay House Australia Pty Ltd.
- RH, Arif. (2014), *The Power of Mind*, ---
- , (2014), *Modul Diklat Pim III: Pengembangan Potensi Diri*, Jakarta: Pusbangtendik
- , (2014), *Modul Diklat Pim IV: Pengenalan Potensi Diri*, Jakarta: Pusbangtendik
- , (2016), *Bahan Ajar Diklat Revolusi Mental*, Jakarta: LAN
- , (2015), *Bahan Ajar Pola Pikir*, Jakarta: LAN

MODUL 05

MEMBUAT RENCANA AKTUALISASI NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL

BAB 01

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui berbagai kegiatan belajar yang Saudara telah lalui pada mata-mata Diklat Konsep dan Kebijakan Revolusi Mental, Revolusi Mental berbasis Pancasila, Membangun karakter dalam inovasi pelayanan publik, Membangun Budaya Kerja pelayanan pegawai ASN dan Membangun Kepribadian dan Pola pikir ASN, Saudara tentunya sudah memahami bahwa Saudara dituntut untuk memiliki Nilai-nilai Revolusi Mental sebagai seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi Saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Saat membaca modul ini, Saudara seharusnya telah memahami esensi nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing materi tersebut. Jika Saudara masih kurang yakin atau kurang percaya diri dengan pemahaman Saudara, sebaiknya luangkan waktu untuk membaca ulang kembali esensi masing-masing modul pada mata-mata Diklat di atas.

Pada modul ini, Saudara dituntut untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam mata-mata Diklat tersebut yang selanjutnya dikenal sebagai nilai-nilai Revolusi Mental. Untuk memudahkan proses aktualisasi nantinya, Saudara terlebih dahulu perlu memahami esensi 'aktualisasi' ini. Kata "aktualisasi" itu sendiri berasal dari kata dasar "actual" yang berarti nyata/benar-benar terjadi/sesungguhnya ada. Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan nilai-nilai Revolusi Mental tersebut menjadi nyata/terjadi/sesungguhnya ada.

Untuk maksud inilah modul aktualisasi ini dibuat. Intinya, modul aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: apa yang harus diaktualkan, dan bagaimana cara mengaktualisasikannya?

B. Deskripsi Singkat

Mata diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam hal menentukan nilai-nilai Revolusi Mental yang terkandung dalam mata diklat yang telah diterima. Kemudian menyesuaikan nilai-nilai tersebut ke dalam penetapan sasaran atau target yang akan dicapai oleh seseorang (personal goal setting) yang berorientasi hasil serta berkaitan dengan aplikasi Revolusi Mental dalam pekerjaan sehari-hari.

Apa yang dapat dilakukan oleh peserta diklat untuk memperlihatkan bahwa nilai-nilai Revolusi Mental sudah terinternalisasi dalam diri mereka, dituangkan dalam Rencana Aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental. Rencana tersebut disusun sebagai rencana aksi yang akan dilakukan di tempat tugasnya selama 30 hari kerja.

Setelah itu peserta diklat mengirimkan laporan pelaksanaan dan hasil-hasil aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental kepada penyelenggara.

Metode yang dipergunakan adalah ceramah interaktif, diskusi eksploratif dan membuat rencana aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental dalam bentuk format.

C. Tujuan Pembelajaran

Kompetensi yang diharapkan setelah pembelajaran modul ini adalah peserta diklat mampu menyusun rencana aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut di tempat tugasnya.

Indikator keberhasilan yang akan ditunjukkan oleh peserta diklat dalam rangka mencapai kompetensi di atas adalah dapat memilih indikator nilai-nilai Revolusi Mental yang akan diaktualisasikan, menyusun rencana aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental tersebut di tempat tugasnya dan menyusun Laporan Hasil Aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental.

D. Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok.

1. Nilai-nilai Revolusi Mental.
 - Mengidentifikasi kandungan nilai-nilai Revolusi Mental dalam materi diklat.
 - Membuat sasaran/target personal (*personal goal setting*) yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Revolusi Mental.
2. Menyusun rencana aktualisasi :
 - Format Rencana Aktualisasi.
3. Menyusun Laporan Aktualisasi.

BAB 02	NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL
-------------------	--

A. Indikator Keberhasilan :

Setelah menyelesaikan modul ini peserta diklat diharapkan dapat :

1. Mengidentifikasi kandungan nilai-nilai Revolusi Mental dalam materi diklat.
2. Membuat sasaran/target personal (personal goal setting) yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Revolusi Mental.

B. Uraian Materi

Secara spesifik Revolusi Mental bagi ASN bermuara pada tiga nilai esensial Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos kerja, dan Gotong royong. Ketiga nilai tersebut merupakan nilai-nilai strategis Revolusi Mental berdasarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015, digambarkan sebagai berikut .

	Sub Nilai	Contoh Perilaku
 INTEGRITAS	Kewargaan	Bersih, Antri, Hak disable, Hak pejalan kaki, Aman berkendara
	Dapat Dipercaya	Anti memberi dan menerima Suap
 ETOS KERJA	Profesional	Cepat tanggap, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan
	Mandiri	Cinta produk Indonesia
	Kreatif	Melakukan inovasi, Anti mencontek, life-long learning
 GOTONG ROYONG	Saling Menghargai	Sopan santun, Menerima perbedaan, Anti kekerasan, Anti Diskriminasi, kasih sayang.
	Gotong Royong	Tolong menolong, kerja sama, kerelawanan

C. Latihan

Latihan 1

Setelah Saudara mempelajari materi diklat Revolusi Mental, jika dikaitkan dengan nilai-nilai strategis Revolusi Mental di atas, menurut Saudara nilai-nilai apa saja yang terkandung pada masing-masing materi tersebut? Isikan pendapat Saudara pada tabel di bawah ini :

NO	Materi Diklat	Nilai Strategis Revolusi Mental	Sub Nilai	Contoh perilaku
1	Revolusi Mental berbasis Pancasila			
2	Membangun karakter dalam inovasi pelayanan publik			
3	Membangun budaya kerja pelayanan pegawai ASN			
4	Membangun kepribadian dan pola pikir ASN			

Anda dapat mengidentifikasi nilai-nilai Revolusi Mental dari materi diklat yang telah disampaikan. Diharapkan dengan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam diri saudara, dapat menjadi jiwa yang menggerakkan Aktivitas Saudara menuju harapan kehidupan yang lebih baik.

Bila Saudara memiliki harapan tentang apa yang ingin Saudara wujudkan, Saudara memiliki beberapa pilihan baik secara sadar maupun tidak agar bisa mengendalikan aspek-aspek yang terkait dengan harapan tersebut. Untuk dapat mengendalikan aspek-aspek tersebut Saudara memerlukan rencana/target/goal sebagai arah, motivasi dan pengawasan terhadap prosesnya.

Pertanyaannya adalah :

Apakah yang Saudara inginkan sekarang untuk dapat segera diwujudkan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut simak contoh di bawah ini:

Tahun 2016 ini saya ingin ke Eropa bersama keluarga, dengan biaya dari tabungan sendiri. Bagaimana mewujudkannya...???

Menurut teori perencanaan *personal goal setting* diuraikan sebagai berikut.

- 1) Buat tujuan yang spesifik :
 - Target yang terukur.
 - Menjawab 5 W (*who, what, where, when, which*).
- 2) Miliki kriteria untuk mengukur progres.
 - Menjawab *how* (sejauh mana?)
 - Membuat *daily reminder* (catatan harian/jurnal).
- 3) Tinjauan dukungan :
 - Kemampuan tim.
 - Sarana/prasarana, Fasilitas.
 - Komitmen.
- 4) Tinjauan kendala/hambatan.
- 5) Tetapkan target waktu.

Untuk contoh di atas, *personal goal setting*-nya adalah sebagai berikut.

No	Tujuan	Kriteria/Indikator keberhasilan	Dukungan	Kendala	Waktu	Perilaku nilai RM
1	Saya dan keluarga dapat menikmati situasi dan pengalaman yang menyenangkan di Eropa dengan biaya sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Tiket pp. • Jaminan travel. • Paspor. • Tersedia dana selama di Eropa 	Informasi tempat tujuan. Keamanan.	Cuaca. Kesehatan. Bahasa.	20 Desember 2016 s.d. 3 januari 2017	Kewargaan (bersih, antri), dapat dipercaya (anti suap), tepat waktu, saling menghargai,

Dengan bantuan personal goal setting, Saudara dapat menetapkan apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keinginan Saudara.

Kita memiliki kemampuan untuk membuat hidup menjadi seperti apa yang diinginkan. Tetapi konsekuensi dari itu adalah kita harus bersedia untuk memberikan semua yang diperlukan untuk melakukannya

Latihan 2

Buatlah satu keinginan Saudara yang dapat diwujudkan dengan perencanaan personal goal setting dan dirasakan mengandung nilai-nilai Revolusi Mental. Uraikan keinginan tersebut dalam tabel di bawah ini. (boleh berdiskusi)

No	Tujuan	Kriteria/Indikator keberhasilan	Dukungan	Kendala	Waktu	Perilaku nilai RM

D. RANGKUMAN.

1. Nilai esensial Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos kerja, dan Gotong royong. Ketiga nilai tersebut merupakan nilai-nilai strategis Revolusi Mental berdasarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2015.
2. Uraian Nilai-nilai Revolusi Mental adalah :

No	Nilai Revolusi Mental	Sub Nilai	Contoh Perilaku
1	Integritas	Kewargaan	Bersih, Antri, Hak disable, Hak pejalan kaki, Aman berkendara
		Dapat Dipercaya	Anti memberi dan menerima Suap
2	Etos kerja	Profesional	Cepat tanggap, tepat waktu, tidak menunda pekerjaan
		Mandiri	Cinta produk Indonesia
		Kreatif	Melakukan inovasi, Anti mencontek, life-long learning
3	Gotong-royong	Saling Menghargai	Sopan santun, Menerima perbedaan, Anti kekerasan, Anti Diskriminasi, kasih sayang.
		Gotong Royong	Tolong menolong, kerja sama, kerelawanan

3. Nilai-nilai Revolusi Mental dari setiap materi diklat yang diperoleh dapat diidentifikasi ke dalam sub nilai dan contoh perilaku yang sesuai dengan substansi materi diklat tersebut.
4. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seseorang memerlukan rencana/target/goal sebagai arah, motivasi dan pengawasan terhadap prosesnya. Nilai-nilai Revolusi mental yang diterapkan pada proses pencapaian tujuan tersebut menjamin diperolehnya hasil yang terbaik, berkualitas dan memuaskan.
5. Perencanaan personal goal setting terdiri dari :
 - a. Buat tujuan yang spesifik.
 - b. Miliki kriteria untuk mengukur progres
 - c. Tinjauan dukungan
 - d. Tinjauan kendala/hambatan
 - e. Tetapkan target waktu

BAB 02 | **MENYUSUN RENCANA AKTUALISASI**

A. Indikator Keberhasilan :

Setelah menyelesaikan modul ini peserta diklat diharapkan dapat menyusun rencana aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental dalam bentuk format.

B. Uraian Materi

Nilai-nilai Revolusi Mental yang dapat diaktualisasikan di tempat tugas, merupakan tuntutan dari hasil diklat Revolusi Mental bagi setiap peserta diklat. Oleh sebab itu perlu direncanakan dengan baik. Isi perencanaan aktualisasi adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat peserta diklat berada di tempat tugasnya masing-masing. Prakiraan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Kegiatan yang direncanakan ini bersumber dari pekerjaan individu peserta diklat atau kegiatan organisasi yang melibatkan dirinya sesuai dengan tugas dan jabatannya sebagai ASN. Jenis kegiatan selama kurun waktu tersebut di atas terdiri dari :

1. Kegiatan atas inisiatif sendiri.
2. Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan/tugas pokok.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan/tugas tambahan.
4. Kegiatan bersama unit kerja.
5. Kegiatan bersama organisasi.
6. Kegiatan lain di luar lembaga.

Jumlah kegiatan yang direncanakan minimal 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa diuraikan dengan tujuan dapat memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Revolusi Mental terkandung di dalamnya.

Format rencana Aktualisasi untuk menguraikan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut.

FORMAT RENCANA AKTUALISASI NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL

Nama Peserta Diklat :

Jabatan :

Unit Kerja/Instansi :

No	Kegiatan	Tujuan	Kriteria keberhasilan	Jenis dukungan	Kendala	Waktu pelaksanaan	Nilai RM yang diaktualisasikan
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

Kolom 1 : diisi nomor urut kegiatan.

Kolom 2 : diisi nama kegiatan.

Kolom 3 : diisi deskripsi tujuan.

Kolom 4 : diisi indikator/alat bukti yang menunjukkan kegiatan tersebut berhasil.

Kolom 5 : diisi sumber daya yang mendukung keberhasilan kegiatan tersebut.

Kolom 6 : diisi prediksi hambatan yang akan dihadapi.

Kolom 7 : diisi saat dimulai dan saat selesai.

Kolom 8 : diisi pilihan Nilai/sub nilai dan perilaku yang menyertai kegiatan tersebut.

Contoh :

RENCANA AKTUALISASI NILAI-NILAI REVOLUSI MENTAL

Nama Peserta Diklat : Heri Setiadi.

Jabatan : Pengumpul dan pengolah data

Unit Kerja/Instansi :

No	Kegiatan	Tujuan	Kriteria keberhasilan	Jenis dukungan	Kendala	Waktu pelaksanaan	Nilai RM yang diaktualisasikan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Membuat bank soal untuk tingkat SMA dan SMK kelas X	Tersedia bank soal untuk tingkat SMA dan SMK kelas X sebanyak 50 soal	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kisi-kisi soal. • Ada lembar soal. • Ada kunci jawaban 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum. • GBPP • Materi belajar. • Laptop. • Printer. 	Tingkat kesulitan soal. Uji validitas. Ketersediaan waktu.	25 April s.d. 3 Mei 2016.	Dapat dipercaya (anti suap), Profesional (tepat waktu), Mandiri, Kreatif (melakukan inovasi), Saling menghargai (anti diskriminasi), Gotong royong (kerjasama)

Berdasarkan pengisian tabel di atas, dapatkah Saudara menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menerapkan nilai Revolusi Mental yang diaktualisasikan.

C. Rangkuman

1. Nilai-nilai Revolusi Mental yang dapat diaktualisasikan di tempat tugas, merupakan tuntutan dari hasil diklat Revolusi Mental bagi setiap peserta diklat.
2. Perencanaan kegiatan dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Revolusi Mental di tempat tugas peserta diklat terdiri dari :
 - a. Kegiatan atas inisiatif sendiri.
 - b. Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan/tugas pokok.
 - c. Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan/tugas tambahan.
 - d. Kegiatan bersama organisasi.
 - e. Kegiatan lain di luar lembaga.
3. Jumlah kegiatan yang direncanakan minimal 5 kegiatan. Dilaksanakan selama 30 hari kerja terhitung mulai peserta kembali bertugas di unit kerjanya.

D. Evaluasi

Buatlah Rencana Aktualisasi Nilai-Nilai Revolusi Mental yang dapat Saudara laksanakan di tempat tugas Saudara. Minimal 5 (lima) kegiatan selama 30 hari kerja yang akan datang. Gunakan format Rencana Aktualisasi seperti di atas.

BAB 03 MENYUSUN LAPORAN AKTUALISASI

A. Indikator Keberhasilan

Setelah menyelesaikan modul ini peserta diklat diharapkan dapat menyusun Laporan aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental.

B. Uraian Materi

Peserta diklat yang telah melaksanakan kegiatan mengaktualisasikan nilai-nilai Revolusi Mental seperti yang direncanakan sebelumnya, wajib menyusun Laporan sebagai bagian akhir proses diklat. Laporan kegiatan tersebut melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya aktualisasi nilai-nilai Revolusi Mental serta hasil-hasil yang dapat dicapai.

Sistematika Laporan disusun sebagai berikut :

- **Cover/sampul.**
- **Kata Pengantar.**
- **Daftar isi.**
- **Tujuan.**

Apa yang ingin diperoleh dari penerapan revolusi Mental di instansi peserta diklat

- **Manfaat .**

Nilai tambah apa yang dirasakan oleh peserta diklat setelah melakukan aktualisasi.

- **Uraian Pelaksanaan** (diisi dalam tabel di bawah).

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Nilai RM yang diaktualisasikan	Aksi yang dilakukan	Bukti yang dilampirkan
1					
2					
3					
4					
5					

Diketahui dan disetujui

.....2016
Peserta Diklat,

.....
NIP

.....
NIP

- **Kesimpulan :**
Menjawab apa yang ingin dicapai pada tujuan.
- **Saran.**
- **Daftar Pustaka.**
- **Daftar Lampiran.**

Laporan yang telah selesai disusun, dikirim ke alamat **Pusdiklat Pegawai Kemendikbud**, Jalan Raya Ciputat – Parung Km. 19 Bojongsari Depok, 16517.

Kepada
Penyelenggara Diklat Revolusi Mental
PUSDIKLAT PEGAWAI KEMENDIKBUD
Jl. Raya Ciputat-Parung Km. 19
Bojongsari, Depok 16517

DAFTAR PUSTAKA

- Heri Setiadi, 2016, *Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Profesi PNS Pengumpul dan Pengolah Data di SEAMEO QITEP IN SCIENCE Sekretariat Jenderal Kemendikbud R.I*, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Bojongsari Depok.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015, *Nilai-nilai Strategis Revolusi Mental*, Gerakan Nasional Revolusi Mental, Sekretariat Revolusi Mental, Jakarta Pusat.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016, *Bahan ajar pelatihan Revolusi Mental bagi Aparatur Sipil Negara*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, LAN Jakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, *Panduan Aktualisasi Diklat Prajabatan Golongan III*, Pusdiklat Pegawai, Bojongsari, Depok.